



**RENCANA STRATEGIS  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019 REVISI**



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Jalan Pattimura No.6 Telp.(0761) 22921 - 34685 Fax.(0761) 23191**

---

## DAFTAR ISI

<i>Isi</i>	<i>Halaman</i>
DAFTAR ISI	
i	
DAFTAR TABEL	
ii	
DAFTAR GAMBAR	
v	
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	
1	
1.2. Landasan Hukum	
6	
1.3. Maksud dan Tujuan	
8	
1.4. Sistematika Penulisan	
8	
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU</b>	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	
10	
2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	
35	
2.2.1. Sumberdaya Manusia	
35	
2.2.2. Asset/Modal	
36	
2.2.3. Unit Usaha Yang Masih Operasional	
37	
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	
37	
2.3.1. Produksi Perikanan	
39	
2.3.2. Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya	
39	
2.3.3. Angka Konsumsi Ikan	
39	
2.3.4. Nilai Ekspor Hasil Perikanan	
39	
2.3.5. Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah	
40	
2.3.6. Jumlah Kelompok Masyarakat yang Aktif	
40	
2.3.7. Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
40	
2.3.5. Jumlah Sumberdaya Manusia Kelautan dan	

---

	Perikanan yang dilatih	41
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	60
2.4.1.	Kelautan dan Perikanan	60
2.4.2.	Kelautan dan Pengawasan	61

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU**

3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	65
3.2.	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	73
3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Riau	77
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Kajian Lingkungan Hidup Strategis	84
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis	86

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU**

		90
4.1.	Visi	90
4.2.	Misi	91
4.3.	Tujuan dan Sasaran	91
4.4.	Sasaran Strategis	92
4.5.	Kebijakan dan Strategi	94

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1.	Strategi	99
5.2.	Arah Kebijakan	100

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

102

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

---

**PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2015-2019**  
141

**BAB VIII. PENUTUP**  
144

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
2.1. Jumlah Sumberdaya Manusia menurut Tingkat Pendidikan, golongan dan jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017	35

- 
- 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dirinci menurut unit kerja Desember Tahun 2017  
35
- 2.3. Sarana dan Prasarana yang di Miliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2018  
36
- 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau  
38
- 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
42
- 2.6 . Luas Lahan Konservasi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Riau  
61
- 3.1. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah  
66
- 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
75
- 3.3. Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sasaran Renstra K/L  
78
- 3.4. Kawasan Minapolitan di Provinsi Riau  
80
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Jangka Panjang Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019  
94
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan

- 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  
101
- 7.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan  
Dan Perikanan  
110
- 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Riau yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Riau Tahun 2015-2019  
142

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Bagan Organisasi Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 12	
1.2. Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 24	

---

## **KATA PENGANTAR**

Bersyukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat, nikmat kesehatan dan kesempatan serta izin-Nya, dapat diselesaikan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019.

Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan adanya dokumen Rencana Strategis ini merupakan acuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai pedoman kerja dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi terwujudnya Pembangunan Kelautan dan Perikanan, yang Tangguh, Berdaya Saing dan Lestari di masa yang akan datang.

Akhir kata Saya atas nama seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen Rencana Strategis ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau.

Pekanbaru,     Maret 2018

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI RIAU**

**Ir. H. HERMAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630512 199303 1 006**

---

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sumber daya alam kelautan dan perikanan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka tak ada jalan lain kecuali mengimplementasikan prinsip tiga pilar: Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan. Tiga pilar inilah yang menjadi misi Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kabinet Kerja guna mewujudkan visi yang dicanangkan yakni **Laut Sebagai Masa Depan Bangsa**.

Sektor Perikanan Indonesia termasuk di Provinsi Riau selama ini belum sepenuhnya dikelola secara berdaulat, tidak berkelanjutan dan tidak mensejahterakan. Jika kondisi ini dibiarkan, *International Union for Conservation of Nature* memproyeksikan potensi tangkapan ikan di perairan Indonesia akan anjlok hingga 40 % pada Tahun 2050. Bahkan berdasarkan kajian University of California Santa Barbara (UCSB) dan Balitbang Kelautan dan Perikanan KKP RI, jika eksploitasi berlebihan terus dibiarkan, biomassa ikan di perairan nusantara akan anjlok hingga 81 persen pada tahun 2035.

Kapal-kapal ikan asing juga menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga merusak ekosistem dan mengancam kelestarian stok ikan. Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, unreported, unregulated/IUU Fishing*) memenuhi perairan Indonesia, menginjak-injak kedaulatan dan mengabaikan kelestarian.

Laut yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan nelayan lokal, makin lama tak bisa diandalkan sebagai mata pencaharian. Tangkapan nelayan lokal terus menurun akibat tidak mampu bersaing dengan kapal-kapal besar milik asing. Ikan pun seolah hilang seiring rusaknya ekosistem dan terumbu karang. Berdasarkan survey BPS periode 2003 – 2013, jumlah rumah tangga nelayan turun dari 1,6 juta menjadi hanya sekitar 800.000. Selain itu, sebanyak 115 perusahaan pengolahan ikan nasional gulung tikar akibat tak mendapat pasokan ikan mengingat kapal-kapal *illegal fishing* langsung membawa ikan curiannya ke luar negeri.

Untuk mewujudkan misi kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan tentu saja IUU Fishing, Overfishing, dan penangkapan yang merusak (*destructive fishing*) harus diberantas. KKP pun merumuskan secara matang dan komprehensif kebijakan reformasi total sektor perikanan termasuk target-target pencapaiannya.

---

Sebagai langkah awal pemberantasan IUU Fishing, KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 tahun 2014 tentang moratorium izin untuk kapal eks asing . Kapal eks asing merupakan kapal yang awalnya dimiliki asing atau kapal yang diimport dari Negara lain yang kemudian benderanya diganti dengan bendera Indonesia sehingga menjadi kapal nasional.

KKP juga menerbitkan Permen KP nomor 57/2014 tentang larangan alih muat (*transshipment*) di tengah laut. Kebijakan ini dikeluarkan lantaran *transshipment* banyak disalahgunakan dengan langsung membawa hasil tangkapan ikan ke luar negeri tanpa dilaporkan ke otoritas setempat. Sejak *transshipment* dilarang, pasokan ikan ke industri pengolahan di sejumlah Negara turun drastis. Ini membuktikan bahwa sebagian besar pasokan ikan-ikan ke Negara-negara tetangga merupakan hasil *illegal fishing* dari perairan Indonesia.

Pemberantasan IUU Fishing telah membuat produksi perikanan tangkap laut nasional melonjak drastis 11,3 % pada tahun 2017. Seiring melonjaknya produksi ikan yang ditangkap kesejahteraan nelayanpun kian meningkat. Hal ini terlihat dari Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) maupun Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUN) yang terus membaik secara signifikan. Meningkatnya produksi tangkapan laut yang tercatat dari nelayan-nelayan nasional pun akan menguntungkan keuangan Negara baik berupa pajak maupun penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). Pemberantasan IUU Fishing tidak hanya menguntungkan Negara dari segi penerimaan pajak PNBP, tapi juga menyelamatkan uang negara trillinunan rupiah dari BBM bersubsidi yang banyak dipakai kapal *illegal fishing*.

Selanjutnya pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Riau mengacu pada konsep kebijakan KKP mengarahkan kepada pembangunan di wilayah pesisir dan laut, karena daya dukung sumberdaya darat (*carring capacity*) dari waktu ke waktu semakin berkurang karena digerus pertambahan penduduk. Untuk mengoptimalkan dan mendorong industri perikanan, KKP membuat Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dan sistim logistik ikan. SKPT merupakan pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama. Tak hanya mendorong industri perikanan di pulau-pulau kecil, konsep SKPT juga merupakan upaya membangun Indonesia dari pinggiran menjadikan daerah-daerah terluar sebagai beranda depan Indonesia.

---

Pembangunan di wilayah pesisir dan laut merupakan upaya pemberian alternatif pilihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan (welfare) hidupnya sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas pelaku usaha yang dilakukan secara berkelanjutan dengan basis komoditas lokal yang kompetitif berlandaskan kemampuan regional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Hal ini sesuai dengan Undang-undang no 23 tahun 2014 yang membatasi kewenangan Provinsi adalah di wilayah pesisir dan laut untuk kegiatan budidaya dan penangkapan.

Untuk mendayagunakan potensi sumber daya kelautan dan perikanan diperlukan kesungguhan dan dukungan politik, ekonomi social untuk menjadikan sector kelautan dan perikanan sebagai prime mover (penggerak) pembangunan ekonomi di Provinsi Riau. Dengan kata lain sudah seharusnya sector kelautan dan perikanan Riau dijadikan *main stream* (ARUS UTAMA) Pembangunan Riau untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran dari Tahun 2014 sampai Tahun 2019.

Revisi rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2019 ini merupakan revisi dokumen Rencana Strategis sebelumnya yang telah disusun, hal ini didasarkan pada beberapa faktor dan pertimbangan antara lain:

1. Adanya perubahan RPJMD Perubahan yang telah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.
2. Adanya beberapa Indikator Kinerja yang perlu penyesuaian lebih lanjut.
3. Keperluan penyesuaian lebih lanjut dengan substansi yang telah termuat dalam perubahn RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

---

Kemudian penyesuaian arah kebijakan pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015-2019 yang termuat dalam perubahan RPJMD Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- 1) Menguatkan dan memantapkan jaringan infrastruktur
- 2) Meningkatkan SDM yang berkualitas.
- 3) Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat
- 4) Meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan
- 5) Meningkatkan penerapan nilai budaya melayu dan agama
- 6) Menciptakan perekonomian yang berdaya saing
- 7) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan pariwisata serta mengoptimal pengelolaan wilayah pesisir dan laut
- 8) Meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif

Revisi renstra OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 ini merupakan penjabaran visi, misi dan program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang akan dilaksanakan dalam sisa periode dan tahun terakhir yaitu untuk Tahun 2017 sampai dengan 2019 menyesuaikan dengan perubahan RPJMD Provinsi Riau, penyusunan Revisi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 berpedoman pada RPJMD Tahun 2005-2025 dan Revisi RPJMD dan Revisi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang, mengingat peran dan fungsi renstra OPD Provinsi Riau, sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan renstra OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di rencana kerja (Renja) Dinas.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 2019 – 2023 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau; yang memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur, dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

---

Berdasarkan paparan Visi Gubernur Riau Tahun 2014 – 2019 adalah **“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pematapan aparatur”**, dengan Misi yaitu sebagai berikut : 1) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, 2) Meningkatkan Pelayanan Pendidikan, 3) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan, 4) Menurunkan Kemiskinan, 5) Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan terpercaya serta pematapan, 6) Pembangunan Masyarakat yang ber-budaya melayu, beriman dan bertaqwa, 7) Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan, 8) Meningkatkan Perlindungan dan Penge-lolan Lingkungan Hidup serta Pariwisata, 9) Meningkatkan peran Swasta dalam Pembangunan.

Sebagai lembaga teknis di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dapat mengambil peran dalam pelaksanaan misi ke tujuh yaitu “Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan”. Dengan penekanan Visi pada “Terwujudnya Perikanan dan Kelautan Riau Yang Tangguh Serta Lestari” hal ini berarti : 1) Perikanan dan Kelautan yang tangguh, berarti mampu menghasilkan produk perikanan dan kelautan yang kontinyu, berkualitas unggul secara kompetitif dan komparatif. 2) Perikanan dan Kelautan yang lestari, artinya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan mampu bertahan dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang strategis.

Posisi ini mempunyai konsekwensi pada pembangunan pertanian dan perkebunan dengan basis kelautan termasuk aspek perikanan dan kegiatan perekonomian masyarakat pesisir, hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan ke wilayah pesisir dan laut.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2014 – 2019 telah direvisi dan diselaraskan dengan Perubahan RPJMD 2014 – 2019. Pemerintah Provinsi Riau. Dimana bidang Kelautan dan Perikanan menjadi Isu Strategis no 4 yaitu Pengoptimalisasian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut, yaitu difokuskan pada : a) Potensi Sumber Daya Air (SDA) di wilayah pesisir dan lautan belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal. b) Menurunnya produksi perikanan tangkap di wilayah pesisir dan laut serta pencemaran di Selat Malaka.

---

Keselarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada perubahan RPJMD 2014 – 2019 untuk bidang kelautan dan perikanan masuk pada Misi 7 yaitu memperkuat “Pembangunan Pertanian dan Perkebunan” :

- a. Tujuan adalah “Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan”,
- b. Sasaran/Indikator Sasaran/Impact adalah: Meningkatnya pembangunan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan), dengan indikator
  - Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (Produksi Padi, Jagung, Kedele, Gula, Daging Sapi dan Ikan)
  - Nilai Tukar Petani (NTP)

Renstra ini mempunyai fungsi penting sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun), yaitu Rencana Kerja Instansi, Rencana Kerja Anggaran serta untuk pedoman pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun kedepan .

Dokumen Renstra ini merupakan arah kebijakan dan tujuan instansi bagi satuan kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan selama tahun 2017-2019 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan efektif. Dokumen ini juga sebagai pengikat instansi agar tidak berjalan sendiri-sendiri antar bagian, karena OPD ini mempunyai tujuan dan sasaran yang bersumber dari visi dan misi yang sama. Sehingga semuanya terikat dalam wadah yang satu dan saling sinergi. Dengan tersedianya Revisi Renstra 2017-2019 ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Riau akan berjalan lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Meskipun dokumen Renstra ini disusun sedemikian rupa pada saat ini, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam perjalanannya ke depan terjadi penyempurnaan atau perubahan. Hal ini disebabkan Renstra merupakan *living document* (dokumen yang hidup) yang sifatnya dinamis. Jika terjadi situasi baik internal maupun eksternal yang mengharuskan ada penyempurnaan, maka hal tersebut sangat mungkin dilakukan demi perencanaan yang lebih strategis dan pelaksanaan yang lebih baik, dengan kata lain dari waktu ke waktu kita akan kembali membuka dokumen ini dan melakukan revisi-revisi terhadap dokumen ini dan kembali mereview dan menyesuaikan perencanaannya.

## **b.2. Landasan Hukum**

---

Pembuatan Dokumen dari penyusunan revisi Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau merupakan tindak lanjut ketentuan pasal 89, dengan sistematika penulisan mengacu pada ketentuan pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Regulasi-regulasi yang menjadi acuan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ;
5. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Perubahan Tata Cara RPJPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025;

- 
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau
  15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Tahun 2014-2019.
  17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Riau;
  18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
  19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

### **19.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2014–2019 adalah Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tujuan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Tahun 2014 - 2019 sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di bidang kelautan dan perikanan.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Kelautan dan Perikanan serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan kelautan dan perikanan
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

### **3.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan mengacu pada ketentuan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat yang terdiri dari :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat tentang; Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

---

## **PROVINSI RIAU**

Memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU**

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU**

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU TAHUN 2015 - 2019**

Memuat Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini di kemukakan rencana program dan kegiatan, dan sumber pendanaan.

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017 - 2019**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RJPMD.

### **BAB VIII. PENUTUP**

---

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau**

Peraturan Gubernur Riau Nomor: 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mengamanatkan, bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai instansi teknis di lingkungan pemerintah Provinsi Riau bertanggungjawab kepada Gubernur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan

Adapun program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang disusun berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Riau ini telah selaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui agenda Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan secara nasional ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni Sumber Daya Manusia (SDM), Sektor Unggulan, dan Kewilayahan. Untuk itu penjabaran yang dilakukan adalah dengan pendekatan fungsi bisnis proses mulai dari hulu sampai dengan hilir

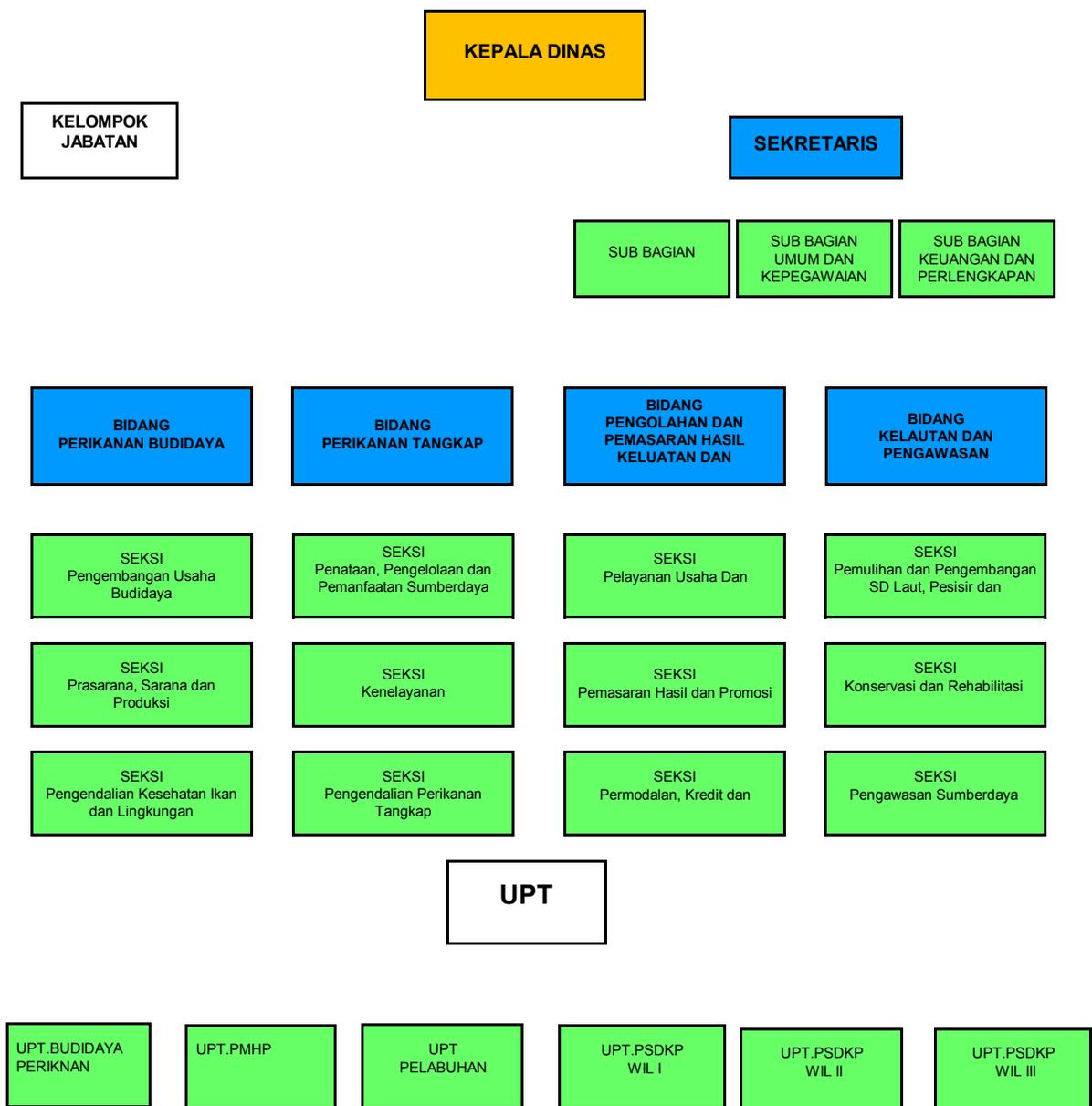
Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Gubernur Riau ditetapkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yaitu :

Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Riau kemudian Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Kelautan dan Pengawasan, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan.

- 
2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Kelautan dan Pengawasan, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan.
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Kelautan dan Pengawasan, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan.
  4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Kelautan dan Pengawasan, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan.
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 2.1. Bagan Organisasi Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Dari bagan diatas Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau :

1. Kepala Dinas, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :
  - Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Kelautan dan Perikanan.
  - Menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
2. Sekretaris, Sekretaris mempunyai tugas :

- 
- Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
  - Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat; b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat; c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; dan d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

A. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub bagian Perencanaan Program;
- Membagi tugas memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
  
- Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
  
- Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- Memerpesiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
  
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

---

B. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai Tugas :

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- Mengelola keuangan dan menyiapkan pembayaran gaji pegawai;
- Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset;
- Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas :

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;

- 
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
  - Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
  - Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
  - Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
  - Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
  - Menyelenggarakan urusan kehumasan;
  - Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
  - Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
  - Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
  - Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya, mempunyai Tugas :

- (1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Produksi dan Usaha Budidaya, Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya, dan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perikanan Budidaya;

- 
- Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perikanan Budidaya;
  - Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
  - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

A. Kepala Seksi Produksi dan Usaha Budidaya, mempunyai tugas:

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
- Melakukan proses standarisasi dan sertifikasi usaha budidaya;
- Melakukan proses penerbitan perizinan perikanan budidaya lintas Kabupaten/Kota;
- Melakukan pengembangan dan pelayanan usaha perikanan budidaya;
- Melaksanakan fasilitasi teknis budidaya dan perbenihan ikan air tawar, air payau dan laut;
- Melakukan pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Produksi dan Usaha Budidaya; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya, mempunyai tugas:

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya;
- Melakukan identifikasi potensi dan pemanfaatan lahan dan air;
- Melakukan proses pemantauan pembangunan kawasan perikanan budidaya;

- 
- Melakukan pengembangan sarana dan prasarana serta pemanfaatan fasilitas kawasan perikanan budidaya;
  - Melakukan pengembangan kawasan minapolitan budidaya;
  - Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pe-laksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan, mempunyai tugas:

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- Melaksanakan identifikasi dan pengendalian hama penyakit ikan, obat ikan dan residu;
- Melakukan inventarisasi dan pemantauan obat ikan;
- Melakukan pelestarian lingkungan perikanan budidaya;
- Melaksanakan fasilitasi teknis pemberantasan hama, penyakit ikan, obat ikan dan residu;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan, Seksi Kenelayanan, dan Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perikanan Tangkap;
- Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perikanan Tangkap;

- 
- Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
  - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

A. Kepala Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan, mempunyai tugas :

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan;
- Melakukan inventarisasi, potensi dan penataan perikanan tangkap;
- Melaksanakan pemulihan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan umum daratan;
- Melaksanakan fasilitasi teknis sumber daya ikan perairan umum dan perairan Laut (Teritorial);
- Melaksanakan monitoring, pengumpulan dan penyusunan data Statistik Perikanan;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kepala Seksi Kenelayanan, mempunyai tugas:

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kenelayanan;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kenelayanan;
- Melakukan identifikasi dan klarifikasi data kenelayanan;
- Melakukan penguatan kelembagaan kelompok dan fasilitas kemitraan usaha serta pengembangan usaha nelayan;
- Melakukan pembinaan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan dan sentra-sentra nelayan;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kenelayanan; dan

- 
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan, mempunyai tugas :

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan;
- Melakukan pengelolaan penangkapan ikan di perairan umum dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- Melaksanakan pengendalian perizinan usaha perikanan tangkap;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengendalian dan Penangkapan Ikan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan, mempunyai tugas :

- Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem, dan Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kelautan Dan Pengawasan; b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kelautan dan Pengawasan;
- Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; dan d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

A. Kepala Seksi Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas:

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- 
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - Melaksanakan proses penerbitan izin pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - Melakukan koordinasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lintas sektor;
  - Melakukan pengelolaan jasa kelautan;
  - Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem, mempunyai tugas :

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem; c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan perikanan;
- Melakukan pengembangan konservasi, mitigasi bencana dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut;
- Melakukan rehabilitasi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- Melaksanakan fasilitasi teknis konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan perikanan;
- Melakukan pengembangan sarana prasarana dan pengelolaan kawasan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

---

C. Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas:

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- Melakukan proses tindak lanjut pelanggaran dan tindak pidana perikanan, pengelolaan dan pemasaran hasil sumber daya kelautan dan perikanan;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Usaha dan Kelembagaan, Seksi Pemasaran dan Promosi, dan Seksi Pembinaan Mutu Produk. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
- Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
- Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

A. Kepala Seksi Usaha dan Kelembagaan, mempunyai tugas :

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Usaha dan Kelembagaan;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Usaha dan Kelembagaan;

- 
- Melakukan pendataan pelaku usaha di bidang pengolahan produk kelautan dan perikanan;
  - Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelompok pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
  - Melakukan fasilitasi penerbitan Surat Kelayakan Pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
  - Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Usaha dan Kelembagaan; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kepala Seksi Pembinaan Mutu Produk, mempunyai tugas:

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembinaan Mutu Produk;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Mutu Produk;
- Melakukan fasilitasi teknis peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan;
- Melakukan fasilitasi sarana dan prasarana mutu produk kelautan dan perikanan;
- Melakukan pengawasan mutu produk kelautan dan perikanan;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Mutu Produk; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

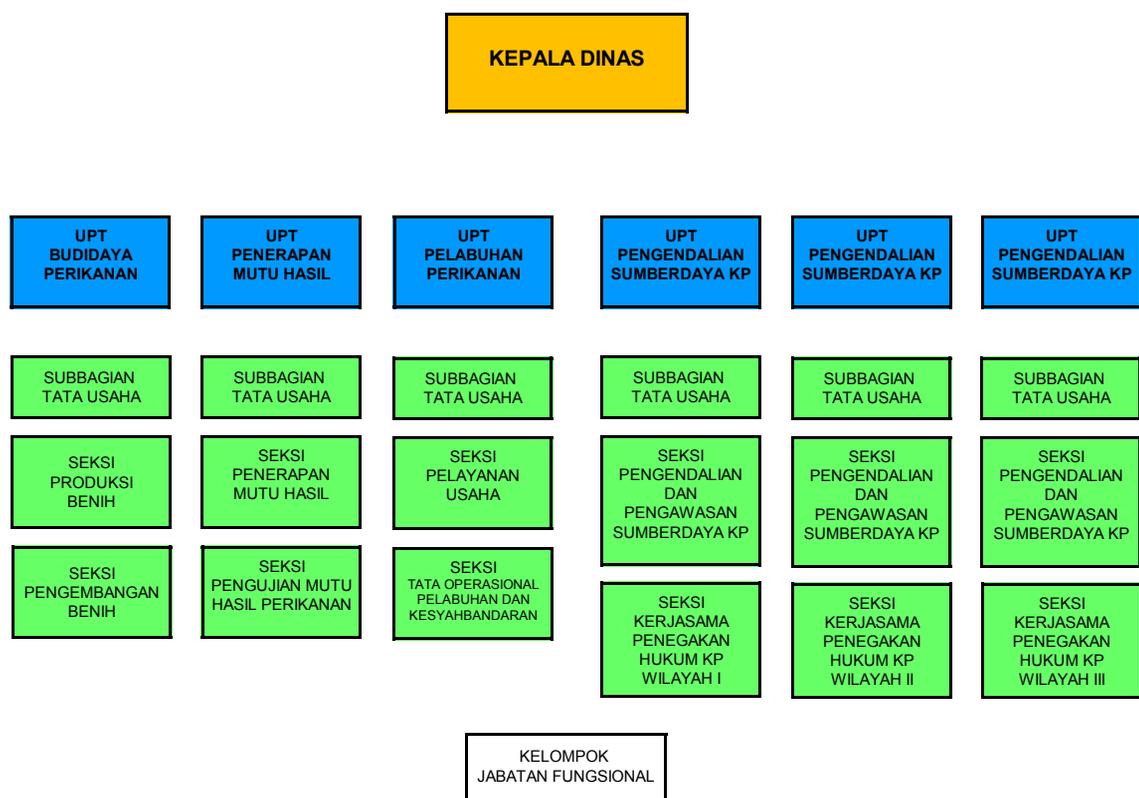
C. Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi, mempunyai tugas:

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemasaran dan Promosi;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemasaran dan Promosi;
- Memfasilitasi pemasaran dan promosi produk kelautan dan perikanan;
- Memfasilitasi sarana dan prasana hasil produk kelautan dan perikanan;

- 
- Menghimpun data harga produk kelautan dan perikanan;
  - Melaksanakan pendataan perdagangan hasil produk kelautan dan perikanan;
  - Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pemasaran dan Promosi; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Selanjutnya untuk menangani masalah-masalah teknis tertentu seperti pengendalian dan pengawasan wilayah laut; perbenihan; pembudidayaan ikan; penerapan mutu hasil; dan pelabuhan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Berikut adalah Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.



Gambar 2.2. Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Riau

1. UPT Budidaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang budidaya perikanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi:
  - Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih, dan Seksi Pengembangan Benih;
  - Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih, dan Seksi Pengembangan Benih;
  - Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih, dan Seksi Pengembangan Benih;
  - Penyelenggaraan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;

- 
- Peningkatan kerjasama penegakan hukum kelautan dan perikanan; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Kepala UPT Budidaya Perikanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih, dan Seksi Pengembangan Benih di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Budidaya Perikanan di wilayah kerjanya;
- Penyelenggaraan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Budidaya Perikanan wilayah kerjanya;
- Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala,Dinas; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

A. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional Prosedur;
- Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi ke-uangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- Melaksanakan penyrsunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan pra-sarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor; Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan

- 
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kepala Seksi Produksi Benih, mempunyai tugas:

- Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Produksi Benih di wilayah kerjanya;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Produksi Benih di wilayah kerjanya;
- Melaksanakan teknologi dan perekayasaan pembenihan perikanan untuk meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas benih serta calon induk; d. melaksanakan monitoring produksi benih;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Produksi Benih di wilayah kerjanya; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Seksi Pengembangan Benih mempunyai tugas:

- Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Benih di wilayah kerjanya;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pengembangan Benih wilayah kerjanya;
- Melaksanakan kerjasama penegakan hukum bidang Pengembangan Benih;
- Menyusun rencana pengembangan benih;
- Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia per-ikanan dan kelautan yang berdaya saing;
- Meningkatkan pengetahuan keterampilan para pembenih melalui kegiatan peningkatan kinerja dan praktek lapangan;
- Melakukan pembinaan ke unit pembenihan (BBI dan UPR);
- Melaksanakan pemberian informasi dan promosi hasil pengem-bangan teknologi benih perikanan;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Benih di wilayah kerjanya; dan

- 
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang Pengendalian sumberdaya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan, dan Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
  - Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pen-yelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan, dan Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
  - Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan, dan Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
  - Penyelenggaraan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - Peningkatan kerjasama penegakan hukum kelautan dan perikanan; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan, dan Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan di wilayah kerjanya;
- Penyelenggaraan -pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan wilayah kerjanya;

- 
- Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
  - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

A. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas . dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan, mempunyai tugas:

- Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan di wilayah kerjanya;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan di wilayah kerjanya;
- Melaksanakan penyiapan, pengendalian, pembinaan dan bimbingan teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan hasil perikanan;
- Melaksanakan sistem mutu dan pemutakhiran sistem mutu ISO 17065 sebagai Lembaga Serifikasi Produk Hasil Perikanan (LSPPro-HP) sesuai dengan persyaratan akreditasi;

- 
- Melaksanakan pembinaan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam rangka peningkatan daya saing hasil perikanan;
  - Menyiapkan usulan Rancangan Standarisasi Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil perikanan;
  - Melaksanakan monitoring, koordinasi dan sinkronisasi UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
  - Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan di wilayah kerjanya; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, mempunyai tugas:
- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan di wilayah kerjanya;
  - Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan di wilayah kerjanya;
  - Mengumpulkan dan menyusun bahan petunjuk teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
  - Melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
  - Melaksanakan sistem mutu dan pemutakhiran sistem mutu ISO 17025 sebagai laboratorium penguji sesuai standar akreditasi yang ditetapkan;
  - Melaksanakan monitoring mutu hasil perikanan;
  - Melaksanakan pembinaan pengujian mutu kepada Unit Pengolah Ikan (UPI);
  - Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan di wilayah kerjanya; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### 3. UPT Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang Pengendalian Sumberdaya. UPT Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 
- Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran dan Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
  - Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran dan Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
  - Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan -tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran dan Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
  - Penyelenggaraan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - Peningkatan kerjasama penegakan hukum kelautan dan perikanan;
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya

Kepala UPT Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran dan Seksi Pelayanan Usaha Perikanan di wilayah kerjanya. Kepala UPT Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pelabuhan Perikanan di wilayah kerjanya;
- Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pelabuhan Perikanan pada wilayah kerjanya;
- Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

A. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub Bagian Tata Usaha;

- 
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
  - Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
  - Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
  - Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
  - Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
  - Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
  - Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas:

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran di wilayah kerjanya;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran di wilayah kerjanya;
- Melakukan pembinaan dan fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan pada pelabuhan perikanan;
- Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perikanan;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Tata operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran di wilayah kerjanya; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 
- C. Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan, mempunyai tugas:
- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran Seksi Pelayanan Usaha Perikanan di wilayah kerjanya.
  - Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan usaha Perikanan di wilayah kerjanya;
  - Melaksanakan inpeksi pembokaran ikan, pengaturan keberangkatan kedatangan dan keberadaan kapal perikanan;
  - Melaksanakan pelayanan penertiban surat tanda bukti lapor, pemeriksaan log book dan penertiban surat persetujuan berlayar;
  - Menyelenggarakan kegiatan pengembangan, pelayanan peman-faatan jasa dan sarana pelabuhan Perikanan;
  - Melakukan pelayan teknis kapal, perikanan dan pelabuhan perikanan;
  - Melakukan pengelolaan dan peningkatan SDM, penataa usahaan' urusan rumah tangga, kelompok fungsional dibidang pengembangan, pelayanan jasa dan sarana pelabuhan Perikanan;
  - Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Usaha Per-ikanan diwilayah kerjanya; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Peraturan Gubernur Riau nomor 54 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada dinas kelautan dan perikanan Provinsi Riau, membentuk UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah 1 (Indragiri Hilir dengan area sampai Kabupaten Pelalawan), Wilayah 2 (Bengkalis dengan wilayah jelajah Kepulauan Meranti dan Siak) dan Wilayah 3 (Rokan Hilir dengan wilayah jelajah sampai Dumai)

Mempunyai tugas Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan, serta Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,

---

Seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan, serta Jabatan Fungsional.

Kepala UPT pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah I, II, dan III menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah kerjanya;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

A. Kepada Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

- 
- Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor;
  - Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;
- Melaksanakan pengendalian dan Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
- Melakukan pengelolaan dan koordinasi sumberdaya Barang Muatan Kapal Tenggelam di wilayah kerjanya;
- Melakukan fasilitasi terhadap kelompok masyarakat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
- Melaksanakan kerjasama monitoring, kontrol dan pengawasan terhadap ekspor komoditi kelautan di wilayah kerjanya;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;
- Melaksanakan kerjasama penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
- Mengumpulkan dan menyusun bahan petunjuk teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya.
- Melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan atasan sesuai tugas dan fungsi

## 2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pencapaian kinerja suatu organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan ditentukan oleh tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga. Ketersediaan pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jumlah Sumberdaya Manusia menurut Tingkat Pendidikan, Golongan dan Jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	JUMLAH PEGAWAI				JLH	JABATAN STRUKTURAL			
		PNS GOLONGAN					ESSELON			NON ESSELON
		IV	III	II	I		II	III	IV	
1	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	S2	25	-	-	-	25	1	7	6	13
3	S1	-	71	-	-	71	-	2	18	49

4	D4	-	-	-	-	0	-	-	-	0
5	D3	-	6	-	-	6	-	-	-	6
6	D2	-	-	-	-	0	-	-	-	0
7	D1	-	-	-	-	0	-	-	-	0
8	SLTA	-	6	19	-	25	-	-	-	25
9	SLTP	-	-	2	-	2	-	-	-	2
10	SD	-	-	-	2	2	-	-	-	2
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>	<b>83</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>131</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>97</b>

Sarana dan prasarana aparatur di Dinas Kelautan dan Perikanan telah cukup untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Namun sarana dan prasara aparatur ini belum berada pada kondisi ideal, karena keadaan sarana dan prasarana ideal berdasarkan pada analisis kebutuhan terhadap jumlah pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dirinci menurut Unit Kerja Desember Tahun 2017

No	Unit Kerja	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sekretariat	31	23,66
2	Bidang Budidaya	9	6,87
3	Bidang Tangkap	13	9,92
4	Bidang P2HKP	12	9,16
5	Bidang Kelautan dan Pengawasan	12	9,16
6	UPT Perbenihan Perikanan	12	9,16
7	UPT Pelabuhan	5	3,82
8	UPT Pelatihan	20	15,27
9	UPT LPPMHP	10	7,63
10	Penyuluh Perikanan	7	5,34
<b>Jumlah</b>		<b>131</b>	<b>100</b>

### 2.2.2. Asset/Modal

Upaya untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Dinas Kelautan dan Perikanan Povinsi Riau, antara lain melalui kegiatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan kendaraan dinas maupun escavator, selengkapny mengenai kondisi rill sarana dan prasarana aparatur dibandingkan dengan kondisi idealnya diuraikan pada tabel

dibawah ini. Data Asset dan Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017

<b>No</b>	<b>Golongan</b>	<b>Kode Bidang Barang</b>	<b>Nama Bidang Barang</b>	<b>Jumlah Barang dalam Bidang</b>
1.	01		<b>TANAH</b>	
2.	02		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	
		01	a. Alat Berat	3
		02	b. Alat Alat Angkutan	
			Alat Angkutan Darat bermotor	31
			Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	21
			Alat Angkutan Apung Bermotor	38
			Alat Angkut Apung Tak Bermotor	1
		03	c. Alat-alat Bengkel	
			Alat Bengkel Bermesin	14
			Alat Bengkel Tak Bermesin	2
		04	d, Alat Ukur	20
		05	e. Alat alat Pertanian/Peternakan	684
		06	f. Alat alat Kantor	737
		07	g. Alat Rumah Tangga	1753
		08	h. Alat Studio	38
		09	i. Alat Komunikasi	63
		10	j. Alat-alat Kedokteran	1
		11	k. Unit-unit laboratorium	81
		12	l. Alat Laboratorium Lingk. Hidup	10
		13	i. Persenjataan Non Sentaja Api	1
			Alat Keamanan	
3.	03		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	
		14	a. Bangunan Bedung Tempat Kerja	71
		15	b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10
		16	c. Bangunan Monumen	-
4.	04		<b>JALAN IRIGASI dan JARINGAN</b>	
		17	a. Jalan dan Jembatan	
			Jalan	10
			Jembatan	5
		18	b. Bangunan Air/Irigasi	
			Bangunan Air Irigasi	46
			Bangunan Air Pasang Surut	42
			Bangunan Air Rawa	1
			Bangunan Air Bersih/Baku	3
			Bangunan Air Kotor	1
		19	c. Instalasi	
			Instalasi Air Minum Bersih	7
			Instalasi Gardu Listrik	2
5.	05	20	d. Jaringan	
			Jaringan Air	5
			Jaringan Listrik	22
			Jaringan Telepon	3
6.	06		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	
			a. Perpustakaan	
			b. Barang Bercorak kesenian/ kebudayaan	18
			c. Hewan Ternak & Tumbuhan	
			<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	

---

### **2.2.3. Unit Usaha yang Masih Operasional**

Dari hasil verifikasi asset dan modal yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan, yang masih operasional dan mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah :

- Escavator, ada 4 tapi yang operasional hanya 1
- Kantin Dinas di Provinsi
- Gedung Olah Raga di Dinas Provinsi
- Balai Benih Ikan di Sei Tibun
- Kolam-kolam pembesaran ikan di bekas UPT Pelatihan Rumbai
- Tambak-tambah di Sei Suir Selat Panjang

#### **2.2.3.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Kelautan**

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun 2014-2018, dapat dilihat dengan membandingkan antara target atau sasaran dengan capaian kinerja, sebagaimana tergambar pada Tabel 2.4. ( Tabel TC-23), Uraian dari Tabel 2.4 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4. ( Tabel TC-23) Capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau  
Tahun 2014-2018**

No.	Indikator	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Produksi Perikanan (ton)	216.763,79	220.711,00	233.718,52	246.023,02	260.776,47	211.743	209.692	219.886	240.040		97,68	95,01	94,08	97,57	
	- Penangkapan	130.312,00	131.615,00	132.931,00	134.261,00	135.603,00	125.690	122.395	129.508	129.960		96,45	92,99	97,42	97,42	
	- Budidaya	86.451,79	89.096	100.787,52	111.762,02	125.173,47	86.297	87.297	90.378	110.081		99,82	97,98	89,67	89,67	
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)	102,6	103,1	103,7	104,35	105,10	104,40	103,58	103,99	104,05		101,75	100,47	100,28	100,28	
	Nilai Tukar Pembudidaya (NTP-Pi) (%)	103,21	103,58	103,99	104,05	104,5	104,5	102,05	101,45	106,31		101,25	98,52	97,56	97,56	
3.	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)	41,74	41,85	42	42,06	42,18	40	40	40	40,8		95,83	95,58	95,24	95,24	
4.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US \$)	7.500.000	8.000.000	8.200.000	8.500.000	8.800.000	6710098	7726803	16815405	4310900		89,47	96,59	205,07	205,07	
5.	Luasan kawasan konservasi perairan daerah (ha)	18	26	34	42	50	40,81	387,53	411,02			226,72	1490,50	1208,88		
6.	Jumlah kelompok masyarakat pengawas yg aktif	10	15	15	15	15	129	142	143	143		1290,00	946,67	953,33	953,33	
8.	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	1	1	2	1	-			1			0,00	0,00	50,00	50,00	
9	Jumlah Sumberdaya Manusia Perikanan dan Kelautan yang dilatih (orang)	254	255	531	539	578	98	254	255	539		38,58	99,61	48,02	48,02	

---

#### **2.2.3.3.1. Produksi Perikanan**

Selama periode 2014-2018 menunjukkan bahwa produksi perikanan Provinsi Riau pada Tahun 2014 target 216.763,79 Ton dengan realisasi 211.743 Ton dengan persentase 97,68 %. Sedangkan pada Tahun 2014 target 246.023,02 Ton dengan realisasi 240.040 Ton dengan persentase 97,57 %, berdasarkan tabel persentase capaian produksi perikanan darai target yang ditetapkan adalah 97 %.

#### **2.2.3.3.2. Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya**

Berdasarkan hasil perhitungan BPS, NTN Tahun 2017 bulan Desember dengan nilai 104,35 % dan NTPi dengan nilai 104,05 % artinya nelayan/pembudidaya masih dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan/budidaya ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

#### **2.2.3.3.3. Angka Konsumsi Ikan**

Capaian Angka Konsumsi Ikan (Kg/perkapita) dari Tahun 2013-2017 masih dibawah target seperti Tahun 2017 yaitu sebesar 40,80 kg/kapita atau 95,24 % dari target 42,06 kg/kapita, tidak tercapainya target konsumsi ikan adalah karena kekurangan produksi pada Tahun 2016 sebesar 13.832,94 Ton, sedangkan kebutuhan konsumsi penduduk adalah 260.039 ton, kemudian apabila dilihat dari produksi ikan pada kabupaten/kota sebagian telah melebihi kebutuhan antara lain Kabupaten Indragiri Hilir, Kampar dan Rokan Hilir. Permasalahannya tidak terpenuhinya kekurangan produksi bila dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi ikan hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari produksi ikan.

#### **2.2.3.3.4. Nilai Ekspor Hasil Perikanan**

Data nilai ekspor hasil perikanan selalu diambil atau diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Stasiun Karantina Ikan, dimana nilai ekspor hasil kelautan dan perikanan dari tahun 2013-2017 tidak pernah mencapai target. Hal ini kedepannya harus menjadi perhatian apakah nilai ekspor hasil perikanan menjadu IKU Dinas Kelautan dan Perikanan, karena selama ini jenis usaha pengolahan hanya baru seba tas UPI (unit Pengolahan Ikan) masih skala kecil, kalau yang dikerjakan masih skala kecil, sehingga yang menjadi tolak ukur

---

keberhasilan adalah nilai ekspor dalam \$ US, dan data data diambil dari Karantina Ikan dan Dinas Perdagangan, disarankan untuk menggali IKU nilai volume ekspor hasil perikanan “Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dan Kelautan menjadi Rupiah (Rp).

#### **2.2.3.3.5. Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah**

Indikator ini dihitung dari capaian luas kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan, pada Tahun 2014 target kawasan konservasi yang dikelola 18 Ha, sementara capaiannya adalah sebesar 40.741,80 Ha Lebih dari 100 %).

Capaian tersebut diatas berdasarkan kepada peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2012 yang telah menetapkan Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Siak sebagai kawasan konservasi ikan terubuj, pada Tahun 2014 telah dibentuk Forum Koordinasi Pengelola Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.823/XII/2014.

Kondisi ini juga sudah melebihi target nasional 4,5 Ha hal ini disebabkan besarnya dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menjaga kelestarian sumberdaya perikanan.

#### **2.2.3.3.6. Jumlah Kelompok Masyarakat yang Aktif**

Dalam rangka penanggulangan Illegal Fishing dan penanggulangan kerusakan perairan dilaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dimana untuk mendukung kegiatan pengawasan dari aktivitas yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan, maka dibentuk dan dibina kelompok masyarakat pengawas yang aktif sampai Tahun 2017 adalah 143 kelompok yang melebihi target sebanyak 14 kelompok.

#### **2.2.3.3.7. Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Berdasarkan amanat pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, provinsi diberi kewenangan melakukan pengaturan Tata Ruang dalam mengelola sumberdaya alam dilaut.

---

Dimana pengaturan Tata Ruang diawali dengan proses penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang teknis perumusannya berpedoman pada peraturan menteri kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Laut.

Capaian kinerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), samapai Tahun 2017 telah dilaksanakan dalam bentuk Draft awal dan direncanakan 2018 sudah selesai dalam bentuk Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Riau.

#### **2.2.3.3.8. Jumlah Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan yang diLatih.**

Dalam rangka peningkatan produksi perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai target sasaran yang diinginkan. Beberapa upaya startegis dilakukan untuk mewujudkan salah satunya pengembangan sumberdaya manusia masyarakat.

Dalam capain kinerja dari tahun 2014-2-17 tidak mencapai target karena Tahun 2017 UPT Pelatihan melalui pelaksana kegiatan pelatihan telah dihilangkan diserahkan tugasnya kepada Dinas Tenaga Kerja.

Berdasarkan evaluasi bahwa penganggaran di UPT Pelatihan lebih besar untuk pembangunan fisik dan melengkapi sarana dan prasarana UPT Pelatihan sementara jumlah pembudidaya, nelayan dan pengolah yang seharusnya di latih tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja tidak hanya dilihat dari pencapaian kinerja pelaksanaan saja, namun juga kinerja anggarannya. Logikanya penyerapan anggaran akan mempengaruhi pelaksanaan program. Semakin besar serapan anggaran, maka semakin bagus kinerjanya, meskipun dalam beberapa kasus terjadi pencapaian tinggi dengan anggaran kecil. Hal tersebut dapat terjadi karena efisiensi atau

---

ada dukungan kebijakan dari instansi lain. Untuk melihat kinerja anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.5 (T.C.24) dibawah ini.

**Tabel 2.5. (T-C.2.4)  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR</b>	436.000.000	519.700.000	-	-	-	431.030.000	503.511.000	-	-	-							
Peningkatan Wawasan Sumberdaya Masyarakat Pesisir	291.000.000	-	-	-	-	287.530.000	-	-	-	-	98,81	-	-	-	-	58.200.000	57.506.000
Money PEMP, Pembinaan dan Pengembangan Pengelola Dana PEMP	145.000.000	199.700.000	-	-	-	143.500.000	197.086.000	-	-	-	98,97	98,69	-	-	-	68.940.000	68.117.200
Peningkatan Operasional Pengawasan dan Pembinaan Pokmaswas	-	320.000.000	-	-	-	-	306.425.000	-	-	-	-	95,76	-	-	-	64.000.000	61.285.000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN</b>	597.550.000	-	5.410.000.000	1.391.980.000	1.620.000.000	485.817.000	-	4.043.805.250	1.164.143.000	1.560.110.000							

Pengadaan Peralatan Produk Perikanan untuk Kelompok Mitra Bahari	147.550.000	-	-	-	-	91.800.000	-	-	-	-	62,22	-	-	-	-	29.510.000	18.360.000
Peningkatan Operasional Pengawasan dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan/Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas serta gelar Operasi Pengawasan terpadu	300.000.000	-	-	-	-	252.167.000	-	-	-	-	84,06	-	-	-	-	60.000.000	50.433.400
Pengembangan dan Penilaian Kelompok Masyarakat Pengawas	150.000.000	-	-	-	-	141.850.000	-	-	-	-	94,57	-	-	-	-	30.000.000	28.370.000
Pengelolaan Wilayah Pesisir berbasis Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif	-	-	150.000.000	-	-	-	-	139.590.000	-	-	-	-	93,06	-	-	30.000.000	27.918.000
Peningkatan Operasional kapal pengawas serta Gelar Operasional Pengawasan Perikanan dan Penilaian serta lomba POKMASWAS	-	-	260.000.000	661.980.000	-	-	-	258.395.000	593.434.500	-	-	-	99,38	89,65	-	184.396.000	170.365.900
Peringatan Hari Nusantara ke XIII	-	-	5.000.000.000	-	-	-	-	3.645.820.250	-	-	-	-	72,92	-	-	1.000.000.000	729.164.050
Peningkatan Ekonomi Masyarakat Skala Kecil	-	-	-	350.000.000	700.000.000	-	-	-	343.498.500	678.960.000	-	-	-	98,14	96,99	210.000.000	204.491.700
Penyiapan Dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	52.210.000	-	-	-	-	26,11	-	40.000.000	10.442.000

Pengadaan Speed Boat Fiberglass	-	-	-	180.000.000	-	-	-	-	175.000.000	-	-	-	-	97,22	-	36.000.000	35.000.000
Gelar Operasi Pengawasan Terpadu Perairan Riau	-	-	-	-	420.000.000	-	-	-	-	393.739.000	-	-	-	-	93,75	84.000.000	78.747.800
Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan Penilaian serta lomba POKMASWAS	-	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	487.411.000	-	-	-	-	97,48	100.000.000	97.482.200
<b>PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEKAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT</b>	<b>88.300.000</b>	-	-	-	-	<b>69.270.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelamatan dan Penyadaran masyarakat dalam upaya Pelestarian Penyu di Pulau Jemur	88.300.000	-	-	-	-	69.270.000	-	-	-	-	78,45	-	-	-	-	17.660.000	13.854.000
<b>PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PERKIRAAN IKLIM LAUT</b>	<b>350.000.000</b>	-	-	-	-	<b>319.530.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembuatan dan Pemasangan Kongkret blok sebagai terumbu buatan dan alat pengumpul ikan di pulau Jemur	350.000.000	-	-	-	-	319.530.000	-	-	-	-	91,29	-	-	-	-	70.000.000	63.906.000
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN TAWAR</b>	<b>1.581.950.000</b>	-	-	-	-	<b>1.546.547.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rivitalisasi Kawasan Budidaya Laut, Payau dan Tawar	990.800.000	-	-	-	-	968.547.000	-	-	-	-	97,75	-	-	-	-	198.160.000	193.709.400
Revitalisasi Penyuluhan dan Bimbingan Teknologi	198.500.000	-	-	-	-	187.300.000	-	-	-	-	94,36	-	-	-	-	39.700.000	37.460.000
Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan UPP Se- Provinsi Riau	392.650.000	-	-	-	-	390.700.000	-	-	-	-	99,50	-	-	-	-	78.530.000	78.140.000
<b>PROGRAM KEIKUTSERTAAN DALAM PAMERAN /BAZAR TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL</b>	<b>500.000.000</b>	-	-	-	-	<b>482.400.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pameran Bazar Tk Provinsi dan Nasional, Gemar Ikan serta Etalase Pemasaran Produk Perikanan di Pekanbaru	300.000.000	-	-	-	-	284.100.000	-	-	-	-	94,70	-	-	-	-	60.000.000	56.820.000
Pekan Promosi /Pameran /Seminar/Expo tingkat Nasional (Jaksefo,Indoaqua, seminar Aquakultur)	200.000.000	-	-	-	-	198.300.000	-	-	-	-	99,15	-	-	-	-	40.000.000	39.660.000
<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA DAN KELAUTAN PERIKANAN</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>876.720.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>550.000.000</b>	<b>1.355.905.000</b>	<b>802.457.000</b>	<b>196.070.000</b>	<b>478.467.000</b>	<b>394.901.400</b>	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Instansi Domestifikasi Ikan Langka dan Ekonomis Penting Perairan Pantai	1.500.000.000	-	-	-	-	1.124.555.000	-	-	-	-	74,97	-	-	-	-	300.000.000	224.911.000

Pemulihan Potensi Sumberdaya ( Suaka/Restocking ) Perikanan Perairan Umum	250.000.000	-	-	-	-	231.350.000	-	-	-	-	92,54	-	-	-	-	50.000.000	46.270.000
Pembangunan Instalasi Domestikfikasi Ikan Langka dan Ekonomis Penting	-	876.720.000	-	-	-	-	802.457.000	-	-	-	-	91,53	-	-	-	175.344.000	160.491.400
Peningkatan Sarana Pendukung Kegiatan Domestikikasi Ikan Langka dan Ekonomis Penting Perairan Pantai	-	-	200.000.000	250.000.000	-	-	-	196.070.000	247.108.000	-	-	-	98,04	98,84	-	90.000.000	88.635.600
Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Domestik ikan Perairan Pantai	-	-	-	-	250.000.000	-	-	-	-	105.450.000	-	-	-	-	42,18	50.000.000	21.090.000
Perlindungan dan Pengkayaan Sumber Daya Ikan Perairan Umum	-	-	-	250.000.000	300.000.000	-	-	-	231.359.000	289.451.400	-	-	-	92,54	96,48	110.000.000	104.162.080
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERIKANAN DAN KELAUTAN</b>	-	<b>3.529.700.000</b>	<b>4.965.668.000</b>	<b>8.628.150.000</b>	<b>10.125.000.000</b>	-	<b>3.038.900.680</b>	<b>4.424.130.925</b>	<b>8.018.622.175</b>	<b>9.579.125.835</b>							
Dukungan Operasional SUPM Internasional Prov. Riau	-	2.205.000.000	-	-	-	-	1.809.368.930	-	-	-	-	82,06	-	-	-	441.000.000	361.873.786
Peningkatan Sarana dan Prasarana SUPM Internasional Prov. Riau	-	195.000.000	100.000.000	-	-	-	121.676.000	97.093.000	-	-	-	62,40	97,09	-	-	59.000.000	43.753.800

Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Perikanan dan Kelautan	-	149.200.000	-	-	-	-	140.988.000	-	-	-	-	94,50	-	-	-	29.840.000	28.197.600
Dukungan Operasional UPT Pelatihan Perikanan	-	200.000.000	-	-	-	-	189.492.750	-	-	-	-	94,75	-	-	-	40.000.000	37.898.550
Pelatihan Pengolahan Ikan bagi Instruktur	-	150.000.000	-	-	-	-	149.800.000	-	-	-	-	99,87	-	-	-	30.000.000	29.960.000
Pelatihan Budidaya Air Tawar bagi Pembudidaya	-	150.000.000	-	-	-	-	149.400.000	-	-	-	-	99,60	-	-	-	30.000.000	29.880.000
Pelatihan Budidaya Air Payau bagi Pembudidaya	-	180.500.000	-	-	-	-	180.045.000	-	-	-	-	99,75	-	-	-	36.100.000	36.009.000
Operasional Riset dan Penelitian Perikanan dan Kelautan	-	300.000.000	200.000.000	526.700.000	450.000.000	-	298.130.000	195.670.000	488.353.000	431.680.300	-	99,38	97,84	92,72	95,93	295.340.000	282.766.660
Pendidikan dan Praktek Lapang Siswa SUPM Internasional Provinsi Riau	-	-	2.250.000.000	-	-	-	-	1.749.591.425	-	-	-	-	77,76	-	-	450.000.000	349.918.285
Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan Perikanan dan Kelautan	-	-	826.600.000	3.913.500.000	3.000.000.000	-	-	819.136.500	3.540.954.875	2.817.025.150	-	-	99,10	90,48	93,90	1.548.020.000	1.435.423.305
Dukungan Pengembangan UPT Pelatihan Perikanan dan Kelautan	-	-	1.108.568.000	698.950.000	1.090.000.000	-	-	1.099.930.000	684.445.000	1.058.942.000	-	-	99,22	97,92	97,15	579.503.600	568.663.400
Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan dan Hama Penyakit Ikan Air tawar dan Air Payau bagi Instruktur	-	-	150.000.000	-	-	-	-	148.700.000	-	-	-	-	99,13	-	-	30.000.000	29.740.000

Pelatihan Budidaya se-Provinsi Riau di UPT Pelatihan Perikanan Pelatihan Budidaya Air Payau bagi pembudidaya	-	-	180.500.000	-	-	-	-	179.220.000	-	-	-	-	99,29	-	-	36.100.000	35.844.000
Pelatihan Pembudidaya Ikan Air Tawar di UPT Pelatihan Perikanan	-	-	150.000.000	-	-	-	-	134.790.000	-	-	-	-	89,86	-	-	30.000.000	26.958.000
Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan SUPM Internasional Prov. Riau	-	-	-	550.000.000	350.000.000	-	-	-	519.643.950	333.870.900	-	-	-	94,48	95,39	180.000.000	170.702.970
Praktek Lapangan Siswa SUPM Internasional Dumai	-	-	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-	404.950.700	459.075.500	-	-	-	80,99	91,82	200.000.000	172.805.240
Makan dan Minum Harian Siswa SUPM Internasional Dumai	-	-	-	929.000.000	1.100.000.000	-	-	-	925.289.500	1.066.635.000	-	-	-	99,60	96,97	405.800.000	398.384.900
Pelatihan Hama Penyakit Ikan Air Tawar	-	-	-	185.000.000	185.000.000	-	-	-	181.878.000	180.750.000	-	-	-	98,31	97,70	74.000.000	72.525.600
Dukungan Pengembangan Instalasi Pelatihan Ikan Air Tawar	-	-	-	200.000.000	200.000.000	-	-	-	199.250.000	200.000.000	-	-	-	99,63	100,00	80.000.000	79.850.000
Pelatihan Budidaya Air Payau dan Air Tawar pada UPT Pelatihan	-	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	357.192.500	-	-	-	-	89,30	80.000.000	71.438.500
Pelatihan Budidaya Air Payau untuk Instruktur pada UPT Pelatihan	-	-	-	200.000.000	200.000.000	-	-	-	196.748.000	195.205.000	-	-	-	98,37	97,60	80.000.000	78.390.600
Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	-	-	-	200.000.000	200.000.000	-	-	-	196.989.000	195.630.000	-	-	-	98,49	97,82	80.000.000	78.523.800

Pelatihan Pembenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	121.190.000	-	-	-	-	80,79	30.000.000	24.238.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana SUPM Dumai	-	-	-	-	2.000.000.000	-	-	-	-	1.920.816.485	-	-	-	-	96,04	400.000.000	384.163.297
Peningkatan Kapasitas dan Operasional Komisi Penyuluh Perikanan dan Kelautan	-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	241.113.000	-	-	-	-	80,37	60.000.000	48.222.600
Pelatihan Budidaya Air Payau pada UPT Pelatihan	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	190.350.000	-	-	-	-	95,18	-	40.000.000	38.070.000
Pelatihan Budidaya Air Tawar pada UPT Pelatihan	-	-	-	175.000.000	-	-	-	-	152.982.500	-	-	-	-	87,42	-	35.000.000	30.596.500
Kajian Rumah Tangga Miskin Perikanan	-	-	-	350.000.000	-	-	-	-	336.787.650	-	-	-	-	96,23	-	70.000.000	67.357.530
<b>PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN</b>	<b>22.457.300.000</b>	<b>14.087.381.000</b>	<b>3.711.491.000</b>	<b>18.337.690.000</b>	<b>20.597.345.000</b>	<b>21.016.212.350</b>	<b>12.896.893.885</b>	<b>3.550.978.750</b>	<b>10.617.194.600</b>	<b>17.678.320.550</b>							
Operasional Balai Pelatihan Perikanan dan Kelautan, UPBAT Rumbai dan UPBAP Sei Suir Selat Panjang	600.000.000	-	-	-	-	570.573.000	-	-	-	-	95,10	-	-	-	-	120.000.000	114.114.600
Dukungan untuk Pendidikan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Dumai	2.000.000.000	-	-	-	-	1.855.321.600	-	-	-	-	92,77	-	-	-	-	400.000.000	371.064.320
Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Perikanan dan Kelautan	585.000.000	-	-	-	-	578.574.500	-	-	-	-	98,90	-	-	-	-	117.000.000	115.714.900

Peningkatan Sarana dan Prasarana SUPM Dumai	300.000.000	-	-	-	-	293.574.500	-	-	-	-	97,86	-	-	-	-	60.000.000	58.714.900
Dukungan Praktek Kerja Lapangan pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Provinsi Riau di Dumai	500.000.000	-	-	-	-	397.075.600	-	-	-	-	79,42	-	-	-	-	100.000.000	79.415.120
Pelatihan Instruktur dan Petani Nelayan Balai Pelatihan Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau ( Pelatihan Budidaya Air Tawar bagi Petani Nelayan, 30 org)	200.000.000	-	-	-	-	199.875.000	-	-	-	-	99,94	-	-	-	-	40.000.000	39.975.000
Pelatihan Instruktur dan Petani Nelayan Balai Pelatihan Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau ( Pelatihan Budidaya Air Payau bagi Petani Nelayan, 40 org)	248.750.000	-	-	-	-	247.820.000	-	-	-	-	99,63	-	-	-	-	49.750.000	49.564.000
Pelatihan Instruktur dan Petani Nelayan Balai Pelatihan Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau ( Pelatihan Budidaya Air Laut bagi Instruktur,20 org)	292.000.000	-	-	-	-	291.700.000	-	-	-	-	99,90	-	-	-	-	58.400.000	58.340.000

Pelatihan Instruktur dan Petani Nelayan Balai Pelatihan Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau (Pelatihan Budidaya Air Payau bagi Instruktur,20 org)	300.000.000	-	-	-	-	298.098.500	-	-	-	-	99,37	-	-	-	-	60.000.000	59.619.700
Subsidi benih ikan dan udang untuk Masyarakat	710.800.000	630.791.000	-	-	411.450.000	699.741.700	581.491.000	-	-	390.805.800	98,44	92,18	-	-	94,98	350.608.200	334.407.700
Pengembangan Bibit Ikan Unggul	476.700.000	394.476.000	559.806.000	465.000.000	666.900.000	458.247.450	390.870.600	534.769.750	448.885.200	614.041.700	96,13	99,09	95,53	96,53	92,07	512.576.400	489.362.940
Peningkatan Operasional Balai Benih Perikanan	500.000.000	885.064.000	1.136.625.000			499.800.000	864.384.000	1.129.039.000			99,96	97,66	99,33	-	-	504.337.800	498.644.600
Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih ikan dan udang	600.000.000	-	175.060.000			281.537.000	-	174.120.000			46,92	-	99,46	-	-	155.012.000	91.131.400
Pembangunan Keramba /KJA ( Lanjutan)	14.196.150.000	7.907.200.000	-	5.432.460.000	4.500.000.000	13.505.042.500	7.184.557.400	-	1.330.078.800	4.147.666.000	95,13	90,86	-	24,48	92,17	6.407.162.000	5.233.468.940
Pembangunan Irigasi Perikanan Lanjutan)	500.000.000	-				412.764.000	-				82,55	-	-	-	-	100.000.000	82.552.800
Pengadaan Mesin Pakan Ikan skala rumah tangga dan mesin dishmilk	447.900.000	1.810.292.000	-	1.157.110.000	1.650.000.000	426.467.000	1.722.086.935	-	1.046.709.000	1.308.792.000	95,21	95,13	-	90,46	79,32	1.013.060.400	900.810.987
Revitalisasi kawasan budidaya laut,payau dan tawar	-	1.139.408.000	-	420.480.000	2.600.000.000	-	1.060.806.950	-	404.373.000	2.364.228.700	-	93,10	-	96,17	90,93	831.977.600	765.881.730

Pembinaan dan pengembangan kelembagaan UPP se-Prov. Riau	-	332.150.000	440.000.000	-	-	-	320.950.000	362.530.000	-	-	-	96,63	82,39	-	-	154.430.000	136.696.000
Pekan Promosi /pameran/seminar/eks po tingkat nasional ( Indoaqua, seminar aquaculture )	-	300.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	-	202.250.000	185.450.000	242.968.800	248.195.000	-	67,42	92,73	97,19	99,28	200.000.000	175.772.760
Pameran bazar/ekspos aktualisasi perikanan budidaya di tingkat Provinsi	-	300.000.000	-	-	-	-	188.050.000	-	-	-	-	62,68	-	-	-	60.000.000	37.610.000
Master plan ( Penelaan ) lokasi pembenihan di BBIS sei tibun	-	388.000.000	-	-	-	-	381.447.000	-	-	-	-	98,31	-	-	-	77.600.000	76.289.400
Forum Singkronisasi Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya Tingkat Provinsi	-	-	225.000.000	-	-	-	-	216.800.000	-	-	-	-	96,36	-	-	45.000.000	43.360.000
Pembinaan dan Pengembangan, Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	-	-	150.000.000	450.000.000	350.000.000	-	-	144.670.000	379.020.000	339.700.000	-	-	96,45	84,23	97,06	190.000.000	172.678.000
Forum Singkronisasi Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya Tingkat Provinsi	-	-	225.000.000	-	-	-	-	216.800.000	-	-	-	-	96,36	-	-	45.000.000	43.360.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Program Minapolitan (Sharing Program)	-	-	600.000.000	600.000.000	-	-	-	586.800.000	579.296.000	-	-	-	97,80	96,55	-	240.000.000	233.219.200
Pembangunan Tambak Rakyat	-	-	-	859.415.000	-	-	-	-	820.155.100	-	-	-	-	95,43	-	171.883.000	164.031.020
Pembangunan kolam rakyat	-	-	-	1.874.000.000	1.220.148.000	-	-	-	1.661.352.500	1.154.055.000	-	-	-	88,65	94,58	618.829.600	563.081.500

Operasional dan Pengembangan kelembagaan UPP se-Riau	-	-	-	250.000.000	300.000.000	-	-	-	244.150.000	296.301.600	-	-	-	97,66	98,77	110.000.000	108.090.320
Workshop teknis pembenihan ikan air tawar	-	-	-	412.845.000	250.000.000	-	-	-	411.072.800	205.470.650	-	-	-	99,57	82,19	132.569.000	123.308.690
Peningkatan sarana dan prasarana UPT Pembenihan ikan	-	-	-	870.800.000	250.000.000	-	-	-	860.617.700	239.929.800	-	-	-	98,83	95,97	224.160.000	220.109.500
Dukungan peningkatan operasional UPT Pembenihan	-	-	-	1.170.580.000	1.013.547.000	-	-	-	1.152.339.000	1.008.537.700	-	-	-	98,44	99,51	436.825.400	432.175.340
Pengadaan hatchery untuk Perbenihan Ikan	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	196.483.000	-	-	-	-	98,24	-	40.000.000	39.296.600
Operasional dan Pemeliharaan Alat Berat	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	179.439.700	-	-	-	-	89,72	-	40.000.000	35.887.940
Pengadaan jaring dan Keramba untuk 100 nelayan Pinggir sungai Siak Pekanbaru	-	-	-	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	-
Pengadaan jaring/Penangkapan ikan untuk 29 KUB nelayan di Rohil	-	-	-	725.000.000	-	-	-	-	660.254.000	-	-	-	-	91,07	-	145.000.000	132.050.800
Pengadaan Bibit dan Pakan Ikan untuk Masyarakat	-	-	-	-	1.285.300.000	-	-	-	-	796.487.000	-	-	-	-	61,97	257.060.000	159.297.400
Pembangunan Sarana dan Prasarana Stasiun Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Tawar	-	-	-	-	350.000.000	-	-	-	-	342.023.300	-	-	-	-	97,72	70.000.000	68.404.660

Sosialisasi Pelatihan dan Pembinaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) se Riau	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	184.050.000	-	-	-	-	92,03	40.000.000	36.810.000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Pembenihan	-	-	-	5.000.000.000	-	-	-	-	3.750.976.300	-	-	-	-	75,02	1.000.000.000	750.195.260	
Bimbingan Teknis Budidaya Air Laut	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	287.060.000	-	-	-	-	95,69	60.000.000	57.412.000	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN TANGKAP</b>	<b>1.568.250.000</b>	<b>1.625.440.000</b>	<b>11.778.807.798</b>	<b>12.678.546.000</b>	<b>17.780.708.000</b>	<b>1.530.232.690</b>	<b>1.440.260.000</b>	<b>10.824.608.050</b>	<b>12.316.783.300</b>	<b>14.882.442.720</b>							
Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil	350.000.000	356.000.000	206.000.000	-	-	335.044.000	294.320.000	205.560.000	-	-	95,73	82,67	99,79	-	-	182.400.000	166.984.800
Pembangunan Dermaga Rakyat	1.000.000.000	606.155.000	-	-	-	978.538.690	515.895.000	-	-	-	97,85	85,11	-	-	-	321.231.000	298.886.738
Bimbingan Teknologi aplikasi dalam upaya Peningkatan Teknis Penangkapan	218.250.000	-	-	-	-	216.650.000	-	-	-	-	99,27	-	-	-	-	43.650.000	43.330.000
Pengelolaan perizinan perikanan di provinsi Riau	-	351.700.000	209.992.000	150.000.000	150.000.000	-	346.910.000	196.624.000	143.140.000	142.742.100	-	98,64	93,63	95,43	95,16	172.338.400	165.883.220
Pertemuan FKPPS dan Pertemuan koordinasi log book	-	171.585.000	121.585.000	200.000.000	200.000.000	-	171.585.000	105.230.000	143.720.000	178.247.700	-	100,00	86,55	71,86	89,12	138.634.000	119.756.540
Operasional pelabuhan perikanan tanjung samak	-	140.000.000	200.000.000	-	-	-	111.550.000	197.435.750	-	-	-	79,68	98,72	-	-	68.000.000	61.797.150

Perlindungan dan Pengkayaan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum	-	-	191.470.000	-	-	-	-	180.030.000	-	-	-	-	94,03	-	-	38.294.000	36.006.000
Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	-	-	742.674.800	2.146.466.000	3.345.000.000	-	-	601.609.800	2.058.389.000	2.999.595.500	-	-	81,01	95,90	89,67	1.246.828.160	1.131.918.860
Pengadaan Kapal Ikan dan Alat Penangkap Ikan	-	-	10.007.599.998	8.369.040.000	4.463.000.000	-	-	9.238.712.500	8.209.701.500	2.131.878.000	-	-	92,32	98,10	47,77	4.567.928.000	3.916.058.400
Pengadaan Alat Penangkap Ikan	-	-	99.486.000	-	-	-	-	99.406.000	-	-	-	-	99,92	-	-	19.897.200	19.881.200
Peningkatan kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak	-	-	-	561.120.000	439.148.000	-	-	-	560.167.800	395.386.900	-	-	-	99,83	90,03	200.053.600	191.110.940
Sosialisasi pendaftaran dan penandaan kapal ikan dan keikutsertaan dalam promosi tkt Nasional dan Provinsi	-	-	-	150.000.000	150.000.000	-	-	-	135.870.000	129.351.720	-	-	-	90,58	86,23	60.000.000	53.044.344
Bimbingan Teknis Manajemen Usaha Perikanan Tangkap Perikanan	-	-	-	200.000.000	200.000.000	-	-	-	197.540.000	191.130.500	-	-	-	98,77	95,57	80.000.000	77.734.100
Apresiasi Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap	-	-	-	133.920.000	133.920.000	-	-	-	123.904.000	128.840.000	-	-	-	92,52	96,21	53.568.000	50.548.800
Pengadaan kapal nelayan dan alat tangkap nelayan	-	-	-	600.000.000	-	-	-	-	591.656.000	-	-	-	98,61	#DIV/0!		120.000.000	118.331.200
Pengadaan jaring penangkap ikan untuk Masyarakat Nelayan	-	-	-	168.000.000	200.000.000	-	-	-	152.695.000	191.250.000	-	-	-	90,89	95,63	73.600.000	68.789.000

Pembangunan Kapal Perikanan > 30 GT (DAK dan Pendamping)	-	-	-	-	8.499.640.000	-	-	-	-	8.394.020.300	-	-	-	-	98,76	1.699.928.000	1.678.804.060
<b>PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN</b>	<b>3.826.570.000</b>	<b>4.932.650.000</b>	<b>2.841.428.000</b>	<b>3.280.684.022</b>	<b>2.608.000.000</b>	<b>3.558.428.650</b>	<b>4.376.949.732</b>	<b>2.681.948.300</b>	<b>2.536.628.636</b>	<b>2.246.885.700</b>							
Revitalisasi Pengolahan Hasil Perikanan (Pasca panen ) se Provinsi Riau	150.000.000	240.000.000	-	250.000.000	250.000.000	136.000.000	223.725.000	-	182.480.000	209.325.000	90,67	93,22	-	72,99	83,73	178.000.000	150.306.000
Pengadaan peralatan pasca panen (mesin pengolahan tepung ikan)	1.489.800.000	-				1.281.840.750	-				86,04	-	-	-	-	297.960.000	256.368.150
Peningkatan Sarana dan Prasarana serta operasional LPPMHP Dumai	628.950.000	-				612.857.450	-				97,44	-	-	-	-	125.790.000	122.571.490
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Sentra Pengolahan Ikan (Sharing Program)	977.600.000	-	450.000.000	450.000.000	350.000.000	950.560.450	-	414.802.300	313.432.800	247.386.000	97,23	-	92,18	69,65	70,68	445.520.000	385.236.310
Temu Usaha, Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan kelompok pengolah dan Pemasaran	171.520.000	-	-	-		171.320.000	-	-	-		99,88	-	-	-	-	34.304.000	34.264.000
Identifikasi dan Inventarisasi Kelembagaan Pengolahan Hasil Perikanan serta Kelembagaan Perikanan dan Kelautan	137.700.000	242.650.000	-	-		135.900.000	238.275.000	-	-		98,69	98,20	-	-	-	76.070.000	74.835.000
Pembinaan dan Pengembangan Wawasan KUB Pengolahan Hasil Perikanan serta Kelembagaan Perikanan dan Kelautan	150.000.000	-	-			149.450.000	-	-	-		99,63	-	-	-	-	30.000.000	29.890.000

Bimtek Peningkatan Bisnis KKMB sektor Kelautan dan Perikanan	121.000.000	-	-	-	-	120.500.000	-	-	-	-	99,59	-	-	-	-	24.200.000	24.100.000
Peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur pemasaran hasil perikanan	-	250.000.000	175.000.000	175.000.000	350.000.000	-	250.000.000	172.635.000	121.430.000	328.163.000	-	100,00	98,65	69,39	93,76	190.000.000	174.445.600
Temu bisnis pembudidaya -nelayan dengan pengusaha dan pendampingan usaha	-	150.000.000	-	-	-	-	148.800.000	-	-	-	-	99,20	-	-	-	30.000.000	29.760.000
Implementasi bisnis dan cluster industri perikanan	-	250.000.000	-	-	-	-	249.875.000	-	-	-	-	99,95	-	-	-	50.000.000	49.975.000
Pembangunan pasar higienis terpadu	-	3.250.000.000	-	-	-	-	2.593.319.732	-	-	-	-	79,79	-	-	-	650.000.000	518.663.946
Pengembangan menu ikan , kampanye makan ikan, aktivitas pemasaran ikan serta sosialisasi sentera pengolahan ikan terhadap masyarakat	-	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	199.575.000	-	195.680.000	198.278.000	-	99,79	-	97,84	99,14	120.000.000	118.706.600
Peningkatan kapasitas dan Operasional LPPMHP Dumai Provinsi Riau	-	350.000.000	515.828.000	595.684.022	400.000.000	-	349.100.000	501.378.000	492.710.700	386.290.100	-	99,74	97,20	82,71	96,57	372.302.404	345.895.760
Penyediaan Daya Listrik untuk Pasar Ikan Higienis	-	-	840.600.000	-	-	-	-	816.038.500	-	-	-	-	97,08	-	-	168.120.000	163.207.700
Temu Teknis Permodalan UKM Pengolahan Hasil Perikanan	-	-	85.000.000	85.000.000	85.000.000	-	-	84.992.500	56.128.000	82.970.000	-	-	99,99	66,03	97,61	51.000.000	44.818.100

Pameran/Bazar Tingkat Provinsi dan Nasional, Gemar Ikan dan Etalase Pemasaran Produk Perikanan dan Kelautan	-	-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	-	108.020.000	119.180.000	128.868.000	-	-	72,01	79,45	85,91	90.000.000	71.213.600
Catfishday	-	-	500.000.000			-	-	469.870.000			-	-	93,97	-	-	100.000.000	93.974.000
Temu usaha KUB Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan Pengusaha Perikanan serta pendamping usaha	-	-	125.000.000	125.000.000	125.000.000	-	124.280.000	114.212.000	113.071.200		-	-	91,37	90,46	-	75.000.000	70.312.640
Peningkatan kinerja KKMB se- Provinsi Riau	-	-	-	200.000.000	200.000.000	-	-	-	166.947.000	176.667.400	-	-	-	83,47	88,33	80.000.000	68.722.880
Pembangunan fasilitas prasarana areal parkir pasar ikan higienis	-	-	-	1.050.000.000		-	-	-	775.568.936		-	-	-	73,86	-	210.000.000	155.113.787
Operasional Pasar Ikan Higienis	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	146.843.400	-	-	-	-	97,90	30.000.000	29.368.680
Pembangunan Pasar Nelayan Sejahtera	-	-	-	-	348.000.000	-	-	-	-	342.094.800	-	-	-	-	98,30	69.600.000	68.418.960



---

#### **2.2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan**

Sudah saatnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu dilakukan secara lestari dan berkelanjutan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Usaha di bidang perikanan dan kelautan dilaksanakan berdasarkan jenis usaha yakni usaha perikanan tangkap di perairan laut dan perairan umum, usaha perikanan budidaya ikan di laut, air tawar dan payau. Adapun potensi pengelolaan usaha tersebut adalah sebagai berikut :

##### **2.2.3.4.1. Kelautan dan Perikanan**

Provinsi Riau memiliki wilayah seluas 107.932,71 km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai 2.078,2 km. Wilayah perairan yang cukup luas tersebut, Provinsi Riau memiliki potensi yang cukup besar di sektor kelautan dan perikanan. Di samping potensi sumberdaya perikanan laut tersebut, Provinsi Riau juga mempunyai potensi sumberdaya perikanan di perairan umum, yang tersebar pada 4 (empat) aliran sungai besar, danau, waduk dan tasik. Daerah daerah tersebut potensil untuk dikembangkan di bidang usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Kondisi potensi sumberdaya perikanan tangkap di Provinsi Riau, saat ini sudah dikategorikan kondisi padat tangkap baik yang dilakukan pada perairan laut (WPP 571 Selat Melaka) maupun perairan umum, sehingga pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap diarahkan pada WPP 711 wilayah perairan Laut Cina Selatan.

Kegiatan penurunan aktifitas *Illegal, Unreport* dan *Unregulated (IUU Fishing)* yang dimulai tahun 2015, menunjukkan dampak yang positif. Pada tahun 2015 sumber daya ikan yang diselamatkan melalui *IUU Fishing* bernilai Rp. 1.472.938.150 meningkat menjadi Rp. 2.691.516.000 pada tahun 2017. Angka tersebut merupakan realisasi dari target Rp. 2.530.000.000 pada tahun 2015 dan Rp. 2.981.497.000 pada tahun 2017. Atau tahun 2015 terealisasi sebesar 58,22 %, dan 90,27% pada tahun 2017. Pencapaian target tersebut adalah upaya maksimal dari kondisi minimal sarana dan prasarana yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan UPT Pengawasan diseluruh Indonesia.

Adapun pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya diarahkan pada pengembangan diversifikasi usaha budidaya ikan di kolam, keramba jaring apung, budidaya ikan di laut maupun budidaya ikan di air payau khususnya untuk revitalisasi budidaya udang di tambak, serta *silvofishery*.

#### 2.2.3.4.2. Kelautan dan Pengawasan

Sumberdaya laut Provinsi Riau berupa wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, beserta kekayaan alamnya berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan juga untuk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya di masa kini maupun di masa yang akan datang. Sumberdaya laut tersebut menyimpan potensi untuk tumpuan masa depan. Baik sumberdaya alam hayati termasuk ikan, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan biota laut lainnya serta sumberdaya non hayati seperti minyak bumi, mineral, pasir laut, maupun energi laut lainnya serta jasa lingkungan dan kelautan dapat dimanfaatkan untuk industri berbasis kelautan seperti perikanan, pelayaran, wisata bahari, budidaya laut, industri mineral dan bioteknologi. Sejak tahun 2013 telah dilakukan berbagai usaha dan kegiatan untuk menjaga kelestarian di kawasan pesisir, sungai maupun danau. Data luas lahan konservasi perikanan dan kelautan dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6. Luas Lahan Konservasi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Riau

No.	Kabupaten-Kota	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Rokan Hilir	• Kawasan Konservasi Pulau Jemur	202,5
2.	Bengkalis	• Suaka Perikanan Ikan Terubuk	40.741,80
3.	Dumai	• Hutan mangrove P. Sesai, Dumai Barat	12
		• JI TPI Kel. Laksamana/Lanjutan Bandar Bakau	30
4.	Siak	• DAS Siak Kecil, Tasik Bunian Kecil, Sikurus Merbau Besar, Betung dan Besingan) Kec. Sungai Mandau	1.534.520
5.	Indragiri Hilir	• Pulau Cawan, dan P. Bakung	7.043,72
6.	Pelalawan	• Danau Besar, Buntung, Sobolong dan D. Tongah, Desa Teluk Meranti, Kec. Meranti	642.290
7.	Rokan Hulu	• Kawasan Konservasi Arwana Mahato	3.700
8.	Kampar	• Waduh PLTA Kotopanjang	12.000
9.	Indragiri Hulu	-	-
10.	Kuantan Singigi	• Lubuk Larangan Indarung Pangkalan Indarung	153 M2
		• Lubuk larangan Sungai Paku	150.000 Ha
		• Bantahan Desa Pelukahan, Kec. Kuantan Hilir Seberang	150 M2
		• Calon Kawasan Konservasi Zona	8 Ha.

		Larangan Desa Sungai Sorik	
11.	Pekanbaru	• Danau Kayangan Rumbai	Inisiasi
12.	Meranti	• Kawasan Mangrove Sentau • Calon Kawasan Konservasi Ikan Kurau	1.500 Ha Inisiasi

Pemanfaatan potensi sumberdaya laut Provinsi Riau berupa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut di atas tentu memerlukan pengendalian dan pengawasan. Adapun kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber perikanan perairan umum, setiap tahun Dinas Kelautan dan Perikanan selalu melakukan *restocking* ikan lokal pada lokasi yang diduga ada gejala penurunan/kerusakan sumber daya ikan. Pada tahun 2017 telah dilakukan penebaran ikan baung sebanyak 285.000 ekor di perairan pedalaman yang ada di Kabupaten Kampar, Rokan Hilir, Bengkalis dan Indragiri Hulu.

Selanjutnya, beberapa komoditas sumberdaya kelautan dan perikanan yang memerlukan perhatian khusus dan terus menerus diupayakan kelestariannya guna menunjang keberadaan sumberdaya ikan adalah sebagai berikut :

a. Mangrove

Hutan mangrove atau kawasan bakau di Provinsi Riau diperkirakan seluas 145.102 ha atau 30 % dari luas kawasan bakau yang terdapat di Sumatera (507.775 ha). Habitat kawasan bakau tersebut pada perikanan dan kelautan adalah habitat penyedia areal peteluran dan pembesaran bagi berbagai jenis ikan, baik yang hidup di air tawar maupun yang hidup di air asin. Oleh karenanya kelestarian kawasan bakau, sangat menentukan keberlangsungan perikanan di wilayah pesisir.

Pada sisi lain, wilayah kawasan bakau dimanfaatkan juga sebagai kawasan perikanan utamanya budidaya udang dan ikan di tambak, di samping dimanfaatkan juga sebagai usaha *silvofisheries*, berupa memelihara ikan pada celah-celah pepohonan bakau, khususnya pemeliharaan kepiting “asoka” di keranjang yang saat ini mulai digemari masyarakat, khususnya pengusaha budidaya di Dumai, Meranti, dan Indragiri Hilir.

Kawasan bakau yang tumbuh di kawasan pesisir sangat rentan terhadap gangguan atau kerusakan. Saat ini, kawasan bakau di Provinsi Riau seluas 145.102 ha, telah mengalami kerusakan, seluas 139.496 ha dengan

---

kondisi “kurang rapat” dan hanya seluas 5.601 ha yang tergolong baik (“rapat”). Kerusakan hutan bakau, sangat mempengaruhi keberlanjutan ekosistem perairan pantai, khususnya ketersediaan stock ikan.

Kerusakan tersebut diakibatkan tekanan dari beberapa kepentingan berupa penebangan/pengrusakan sehingga perlu dilakukan rehabilitasi lahan. Sesuai dengan kepentingan, rehabilitasi kawasan bakau, di Provinsi Riau dilakukan di berbagai instansi, yakni, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Riau.

Rehabilitasi kawasan bakau yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, pada tahun 2017 telah dilaksanakan penanaman mangrove sebanyak 14.100 batang di Kecamatan Ransang, Kabupaten Meranti.

b. Terumbu karang

Ekosistem terumbu karang terdiri dari karang penghalang dan karang tepi. Berdasarkan geografis, penyebaran terumbu karang di perairan Provinsi Riau hanya terdapat di perairan Kabupaten Rokan Hilir, yakni seluas 1,2 Ha.

Akibat cara penangkapan ikan yang *destruktif*, terumbu karang tersebut mengalami kerusakan. Untuk itu pemerintah Provinsi Riau ke depan akan melakukan upaya rehabilitasi ekosistem terumbu karang dengan melakukan kegiatan pembuatan terumbu karang buatan sebagai media tempat tumbuh terumbu karang.

c. Pulau-pulau Kecil dan Wisata Bahari

Provinsi Riau memiliki kurang lebih 101 pulau-pulau kecil. Pulau pulau kecil tersebut menyebar pada beberapa Kabupaten Kota, yakni Kabupaten Rokan Hilir (15 Buah), Kabupaten Indragiri Hilir (25 buah), Kabupaten Bengkalis (17 Buah), Kabupaten Kepulauan Meranti (12 Buah) dan Kabupaten Pelalawan (32 Buah).

Adapun pulau pulau kecil, yang berada pada daerah perbatasan dengan Malaysia yaitu, Pulau Batu Mandi dan Pulau Rupa. Dari 101 buah pulau tersebut yang berpenghuni sebanyak 26 buah pulau dan sisanya kosong tidak berpenghuni. Besarnya jumlah pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni mengindikasikan tersedianya potensi wisata bahari yang belum digali dan

---

dipromosikan secara optimal. Contohnya wisata bahari di Pulau Rupa dan Pulau Jemur.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai kekayaan dan keragaman yang tinggi dalam bentuk ekosistem, jenis biota, struktur adat dan budayanya. Jumlah lokasi wisata bahari di Provinsi Riau yang sudah dikembangkan adalah sebanyak 1 lokasi, yaitu di Pulau Rupa dan menunjukkan perkembangan yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan sektor lain.

d. Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Secara geografis, kawasan pesisir Provinsi Riau sangat rawan terjadinya konflik antar nelayan serta tindak pidana perikanan, seperti penggunaan alat tangkap terlarang (*trawl*), pelanggaran jalur penangkapan ikan, penggunaan bahan peledak, *potasium*, pengambilan terumbu karang, penebangan mangrove, serta aktivitas *IUU fishing*.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau saat ini memiliki 3 orang (PPNS), yang didukung oleh pengawas Perikanan. Dengan melihat luasan wilayah perairan, tentu jumlah PPNS dan Pengawas Perikanan tidaklah seimbang dan perlu peningkatan kuantitas dan kualitas melalui pelatihan, terutama pelatihan dan pendidikan PPNS.

Di samping itu di Provinsi Riau sudah terbentuk 55 kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dan tersebar pada 12 Kabupaten/Kota. Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan di lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, agama, adat, LSM dari Sistem Pengawasan yang Berbasis Masyarakat (SISWASMAS).

Bentuk dukungan terhadap masyarakat yang aktif melakukan kegiatan pengawasan Sumber Daya Ikan (SDI), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah memberikan bantuan kapal pengawas kepada Pokwasmas sebanyak 6 unit, dan sebanyak 2 unit kepada Pos Pengawas di Kabupaten Siak dan Kabupaten Kuantan Singingi.

---

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan besar dalam peningkatan peran strategis sektor kelautan dan perikanan dalam peran sertanya dalam pembangunan Provinsi Riau. Peran strategis tersebut meliputi peran dalam penyediaan produk hasil-hasil kelautan dan perikanan, sehingga menjamin ketersediaan protein hewani berasal dari ikan, keseimbangan *supply-demand*, peningkatan pendapatan masyarakat perikanan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Revitalisasi organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Riau melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, merupakan dasar kebijakan pemerintah daerah provinsi untuk melaksanakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan pembangunan pada bidang kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan pada kurun waktu tahun 2014–2018 telah memberikan manfaat maupun dampak positif yang diperoleh masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan. Meskipun begitu, tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Bidang kelautan dan perikanan memiliki permasalahan kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat beberapa isu pengelolaan kelautan dan perikanan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

Pembelajaran lapangan yang didasari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama ini, khususnya pada kurun waktu 2014-2018 telah teridentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Permasalahan dan kendala itu diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.1. (Tabel T-B.35)  
Pemetaan Permasalahan Untuk Pentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Kemiskinan di Wilayah Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat daya saing rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan alat tangkap masih sederhana</li> <li>- Akses modal</li> <li>- Sumberdaya manusia</li> </ul>
2	Penurunan Potensi Sumberdaya Ikan (SDI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelebihan tangkap dan padat tangkap di wilayah perairan umum dan perairan pantai</li> <li>- Degradasi Lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan penangkapan dan wilayah tangkap belum optimal</li> <li>- Alat Tangkap yang tidak ramah lingkungan</li> <li>- Rusaknya ekosistem hutan mangrove</li> <li>- Limbah industri yang tidak terkendali</li> </ul>
3	IUU Fishing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya SDM Pengawasan</li> <li>- Keterbatasan Sarana dan Prasarana</li> <li>- Lemahnya Penegakan Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya rekrutmen SDM Pengawasan</li> <li>- Keterbatasan anggaran</li> <li>- Komitmen bersama antar aparat dan PPNS Perikanan dalam menindaklanjuti pelanggaran</li> </ul>
4	Pemanfaatan Potensi Budidaya Perikanan Belum Optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan modal</li> <li>- Biaya Input Produksi budidaya tinggi</li> <li>- Kenaikan harga ikan tidak sebanding dengan kenaikan biaya produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan akses perbankan</li> <li>- Industri Penyediaan Bahan baku pakan lokal masih terbatas</li> <li>- Pabrik pakan skala rumah tangga belum berkembang</li> </ul>

---

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan benih bermutu masih terbatas</li></ul>
5	Nilai Tambah Produk Perikanan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diversifikasi olahan terbatas</li><li>- Pengolahan belum sesuai standar (SSOP, GMP, HACCP)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lemahnya Akses teknologi</li><li>- Sumberdaya Manusia masih terbatas</li></ul>

---

## 1. Kemiskinan di Wilayah Pesisir

Perikanan Riau adalah perikanan rakyat, berciri khas modal yang terbatas dan tenaga yang terbatas, serta peralatan yang sederhana. Dengan ciri khas yang demikian, daya saing mereka rendah dibanding dengan nelayan lainnya.

Hal ini disebabkan masih belum diperolehnya dukungan permodalan usaha dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya dimana nelayan/pembudidaya akan masih kesulitan mengakui kredit karna tidak dapat memenuhi persyaratan perbankan.

Kualitas perairan Provinsi Riau telah terdedagrasasi, yang ditunjukkan adanya kecenderungan penurunan produksi ikan, yang dihasilkan para nelayan kecil. Gejala ini terduga sejak adanya *IUU Fishing*, dan beroperasinya armada perikanan yang berteknologi modern, yang berasal dari dalam dan dari luar Provinsi Riau, bahkan luar negeri.

Masih adanya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, adanya spesies tertentu yang belum dilindungi, eksploitasi sumberdaya ikan berlebihan di WPP, produksi perikanan belum dimanfaatkan oleh unit pengolahan ikan secara maksimal dan PNBP Perikanan yang masih rendah, produksi hasil perikanan belum dimanfaatkan oleh unit pengolahan Mata pencaharian mereka sebagai “pemburu ikan”, ketidakpastian produksi selalu besar. Dua hal tersebut mengakibatkan nelayan selalu tergantung dengan hubungan yang tidak seimbang antara “*patron*” dengan “*client*”, yang pada akhirnya berdampak sosial dan berdampak secara ekonomi. Secara sosial akses penangkapan ikan dikuasai oleh “*nelayan darat*” (*patroen*), dan akan berdampak secara ekonomi, yakni rendahnya pendapatan “*nelayan laut*” (*client*).

Produktivitas nelayan adalah sebesar 1.646,7 kg. Jika diasumsikan harga rata-rata ikan laut sebesar Rp. 35.000 per kg, maka penghasilan kotor pelaku usaha adalah sebesar Rp. 57.634.500 atau sebesar 4.802.875 per bulan. Penghasilan kotor tersebut biasanya digunakan untuk biaya operasional sebesar 40 % (bahan bakar, es dan perawatan mesin), sehingga taksiran pendapatan nelayan adalah sebesar Rp. 2.881.725 per bulan. Angka tersebut hampir sama jika dibandingkan dengan penerimaan pelaku usaha budidaya perikanan.

---

## 2. Penurunan Potensi Sumberdaya Ikan (SDI)

Adanya penurunan potensi Sumber Daya Ikan, khususnya pada perikanan tangkap di perairan laut dan perairan umum. Dugaan ini “terindikasikan”, produksi perikanan tangkap fluktuatif. Jumlah produksi perikanan, “naik-turun”. Secara teoritis, hal tersebut merupakan pertanda adanya gejala lebih tangkap dan padat tangkap pada suatu perairan.

Gejala lebih tangkap dan padat tangkap tersebut sangat beralasan dikemukakan data pendukung penyebab adanya gejala lebih tangkap dan padat tangkap. Faktanya pada dari tahun 2016-2017 kenaikan jumlah pelaku usaha perikanan tangkap sebesar 127%. Angka kenaikan yang tergolong cukup besar. Jika pada tahun 2016 rata-rata produktivitas setiap pelaku usaha adalah sebanyak 3,609 ton per pelaku usaha, maka pada tahun 2017 angka itu menjadi 1,647 per pelaku usaha. Makna dari data tersebut adalah ada penurunan produktivitas pelaku usaha penangkapan ikan di Provinsi Riau sebesar 119,1%.

Pemanfaatan potensi sumber daya ikan, yang tidak berkelanjutan, dan yang tidak *pro* lingkungan mengakibatkan terjadinya degradasi habitat di wilayah pesisir, terumbu karang, mangrove, dan perairan umum. Di sisi lain, kelebihan tangkap (*overfishing*) dan penurunan kualitas lingkungan juga disebabkan adanya pencemaran perairan oleh limbah industri serta limbah rumah tangga (*domestic waste*), serta penggunaan bahan peledak (*potassium*) dalam penangkapan ikan. Tentu semuanya, dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan sangat berpengaruh pada kualitas potensi sumber daya ikan, dan selanjutnya pada pendapatan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap dan pelaku usaha pada bidang perikanan budidaya.

*Statement* tersebut bukan tidak beralasan. Adanya aktifitas *IUU fishing* pada perairan laut dan perairan umum, dan sorotan pemberitaan media massa. *IUU Fishing* sering terjadi pada WPP 571 (Selat Melaka), dan khusus pada perairan umum, kejadian *IUU Fishing* adalah pada kelompok pengguna alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (listrik, *potasium*, tuba dan lainnya), yang saat ini marak dilakukan pada aliran sungai kecil di daerah kabupaten dengan komoditas tujuan udang galah.

---

Aktifitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada di daratan maupun sepanjang pesisir pantai dan lautan, tidak luput dari tantangan alam dan potensi bencana alam yang dapat terjadi. Bencana alam seringkali menimbulkan berbagai sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, perumahan penduduk hingga korban jiwa, yang memerlukan upaya mitigasi yang lebih baik. Pengendalian dan pengawasan sumber daya Ikan (SDI) melalui rehabilitasi dan konservasi mangrove; terumbu karang; pemasangan rumpon; pengalihan usaha penangkapan ikan (dari wilayah padat tangkap ke wilayah jarang tangkap); penawaran mata pencaharian alternatif di bidang budidaya perikanan dan penanganan hasil perikanan, serta pasca panen; peningkatan pengetahuan sumber daya manusia (SDM) baik teknik penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan serta peningkatan pengetahuan dan pembinaan terhadap ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

### **3. IUU Fishing**

Keberadaan Kapal Pengawas Perikanan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, serta yang ada pada beberapa daerah kabupaten aktifitas *IUU Fishing* yang terjadi sebenarnya dapat diminimalkan. Permasalahannya adalah, aparat petugas pada kapal tersebut, khususnya Kapal Pengawas *IUU Fishing* masih terbatas yang memiliki sertifikat Pengawas SDI dan sertifikat PPNS, sebagaimana yang dipersyaratkan. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak berjalan optimal. Penindakan tidak dapat dilakukan. Kewenangan tindakan pemeriksaan dan penghentian aktifitas *IUU Fishing* di lapangan hanya dapat dilakukan oleh petugas bersertifikat tersebut.

Meningkatnya aktifitas pengelolaan sumber daya di kawasan pesisir dan pantai, yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan serta pembuangan limbah industri dan rumah tangga yang mencemari perairan, telah mengakibatkan berbagai kerusakan pada kawasan mangrove, terumbu karang, aliran sungai yang mengakibatkan menurunnya kualitas perairan. Hal tersebut menyebabkan menurunnya kualitas sumberdaya perikanan dan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat perikanan.

Untuk itu, perlu melakukan pembinaan lebih intensif pada kelompok masyarakat pengelola sumber daya perikanan agar berperan

---

aktif pada pengelolaan sumberdaya ikan secara lestari, ramah lingkungan dan ikut serta merehabilitasi kerusakan kawasan bakau maupun terumbu karang serta meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait yang menangani pengelolaan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD) pada daerah kawasan bakau yang menyebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Di samping itu, solusi yang ditawarkan untuk menjaga kelestarian kawasan bakau adalah mengarahkan Pokwasmas agar mengambil peran aktif pada kegiatan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa khususnya yang berada di daerah kawasan bakau. Harapan dari solusi tawaran ini adalah masyarakat nelayan pada gilirannya akan mengambil manfaat lingkungan dan manfaat ekonomi dari keberadaan kawasan bakau yang ada di sekitar pemukiman nelayan.

#### **4. Pemanfaatan potensi budidaya perikanan belum optimal**

Perikanan Budidaya adalah peningkatan produksi perikanan budidaya, yang didukung oleh budidaya air tawar, air payau dan air laut. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan IKU tersebut adalah melalui : (i) pengembangan kawasan minapolitan; (ii) Pengembangan komoditas unggulan; (iii) Kemandirian yang meliputi kemandirian produksi dan sarana produksi, kemandirian pakan, kemandirian pembudidaya dan kemandirian kawasan.

Dalam rangka pembangunan perikanan dan kelautan yang “mengedepankan perikanan budidaya dan mengendalikan perikanan tangkap” perlu dukungan Infrastruktur, prasarana dan sarana perikanan. Jika tidak, akan berdampak pada sentra produksi, yakni tingginya biaya produksi hasil-hasil perikanan dan kelautan.

Faktanya, masih terbatas akses ke sentra-sentra produksi perikanan dan kelautan, khususnya pada perikanan tangkap. Pada usaha perikanan lepas pantai, infrastruktur belum memadai untuk memenuhi kebutuhan nelayan dalam mengeksploitasi sumberdaya perikanan yang ada. Sarana dan prasarana serta aparatur yang ada pada PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) belum memenuhi standar operasional.

Untuk itu perlu melanjutkan serta penyempurnaan secara bertahap pembangunan dan pengembangan sarana/prasarana usaha perikanan melalui dukungan APBN dan APBD Provinsi Riau, maupun sumber dana lainnya serta mengusulkan penambahan personal termasuk aparatur Penyuluh Perikanan, khususnya yang menangani operasional

---

PPI.

Selanjutnya, tingginya harga pakan, merupakan masalah pada pengembangan perikanan budidaya. Harga pakan pabrik masih relatif tinggi, dan ada kecenderungan akan terus meningkat sejalan dengan ketergantungan akan impor bahan baku pakan dan sudah tentu harga akan disesuaikan dengan nilai tukar (*kurs*) dollar.

Hal ini mengakibatkan biaya produksi usaha pembudidayaan ikan menjadi tinggi, sementara harga jual cenderung statis (tidak menunjukkan peningkatan harga yang signifikan), dan pada gilirannya tingkat keuntungan yang diterima pembudidaya rendah. Untuk itu, perlu pengembangan pakan mandiri berbasis bahan baku lokal melalui pengadaan mesin pakan, pengadaan bahan baku alternatif, yang mudah didapat dan murah harganya.

Pada sisi lain, jumlah dan mutu benih serta Induk ikan belum memadai. Ketersediaan benih dan induk baik dari segi jumlah maupun mutu masih sangat rendah, sementara kebutuhan akan benih dan induk guna memenuhi target produksi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya.

Untuk itu, perlu upaya optimalisasi peran dan fungsi Balai Benih Ikan Sentral (BBIS), Balai Benih Ikan (BBI) Lokal, Kolam Perbenihan Rakyat (KPR) dan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas calon induk ikan unggul dan peningkatan produksi benih, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi perbenihan serta penerapan sertifikasi Cara Pembudidayaan Ikan yang Baik (CPIB).

#### 5. Nilai Tambah Produk Perikanan

Ikan merupakan salah satu sumber protein yang sangat dibutuhkan oleh manusia, karena kandungan proteinnya tinggi, mengandung asam amino esensial, nilai biologisnya tinggi dan harganya relatif murah bila dibandingkan dengan sumber protein lainnya.

Masalahnya adalah ikan memiliki kelemahan karena cepat mengalami pembusukan, maka perlu dilakukan penanganan, pengolahan dan pengawetan hasil perikanan yang bertujuan selain mencegah kerusakan ikan sehingga dapat memperpanjang daya simpan juga untuk menganekaragamkan produk olahan hasil perikanan.

Masih dilakukannya penanganan dan perlakuan produk hasil

---

perikanan yang tidak mengikuti kaidah ketahanan dan keamanan pangan komoditas produk hasil perikanan, seperti pemakaian bahan berbahaya formalin dan pestisida pada aktivitas pengolahan pangan hasil perikanan dan pemakaian zat kimia berbahaya lainnya sebagai bahan tambahan pada pembuatan *pelet*, pakan ikan.

Pada sisi lain, dalam perdagangan hasil-hasil perikanan, persyaratan mutu telah ditentukan oleh negara pengimpor seperti Jepang, Uni Eropa dan USA. Persyaratan tersebut terkait dengan jaminan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan dan kelautan. Produksi hasil perikanan harus bebas dari pestisida, formalin dan khususnya antibiotik, menjadi permasalahan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat, khususnya dalam peningkatan ekspor hasil-hasil perikanan.

Selanjutnya, pembinaan kepada pembudidaya ikan melalui penerapan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB), bebas dari bakteri masih tergolong belum optimal dan masih perlu ditingkatkan, khususnya membentuk otoritas yang kompeten di daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengendalian jaminan mutu produk, dan perlunya meningkatkan jangkauan pelayanan dari pasar higienis.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Riau 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 adalah ***“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin di Asia Tenggara 2020”***.

Untuk memberikan gambaran secara nyata sebagai upaya penjabaran Visi Pembangunan Riau 2020, maka perlu visi antara selama 5 tahun, agar setiap tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dapat dicapai sesuai kondisi, kemampuan dan harapan yang ditetapkan berdasarkan ukuran-ukuran kinerja pembangunan. Pada penggalan tahun 2014 - 2019 rumusan Visi pemerintah Provinsi Riau adalah :

***“Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan dan Tersedianya Lapangan Kerja serta Pemanjapan Aparatur”***.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

Maju : Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan berkualitas serta berteknologi tinggi yang

- 
- dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat
- Sejahtera : Terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, aman dan nyaman serta merata dari segala aspek ekonomi, sosial, politik, hukum dan keamanan.
- Berdaya Saing : Suatu kondisi pemerintah dan masyarakat yang tangguh, unggul dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang terhadap dinamika perubahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya, tatanan sosial yang agamis.
- Menurunnya kemiskinan : Suatu kondisi masyarakat yang mampu memenuhi dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
- Lapangan Kerja : Tersedianya peluang dan kesempatan bagi angkatan kerja melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Sebagai provinsi yang menjadi pusat perekonomian pada tahun 2020, Provinsi Riau akan mempersiapkan infrastruktur, mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan dan ramah lingkungan, pembangunan kawasan perkotaan, pembangunan kawasan perdesaan, penanganan berbagai dampak dan isu pemanasan global, memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa datang.

Di samping itu, pemerintah Provinsi Riau memperhatikan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat melalui pembanguan infrastruktur perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui partisipasi masyarakat dengan melibatkan pelaku usaha.

Selanjutnya, perhatian pemerintah adalah pengembangan Sumber Daya Manusia, agar bermakna dan berkembang ke arah lebih baik dan mempunyai daya saing dengan daerah lain, mempermudah akses memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan pengembangan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi. Juga kemudahan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan sarana dan prasarana

masyarakat beragama, seni budaya dan moral.

Seterusnya, pemerintah Provinsi Riau tetap memperhatikan keikutsertaan dan peran pihak swasta dalam pembangunan perekonomian percepatan investasi dan stabilitas pembangunan ekonomi melalui penciptaan rasa aman, kepastian hukum, percepatan pelayanan perizinan usaha, penyiapan infrastruktur serta sarana dan prasarana dasar.

Di sisi lain, aparat pemerintah Provinsi Riau harus berkemampuan, professional, bermoral serta keteladanan pemimpin, melalui penguatan kelembagaan dan kualitas aparat, untuk pencapaian kehidupan yang sejahtera bertata kehidupan dan penghidupan, baik materil maupun spritual bagi setiap masyarakat.

Dari analisis rumusan Visi pemerintah Provinsi Riau 2014-2019 tersebut di atas ditetapkan Misi Provinsi Riau Tahun 2014-2019, yang sejalan dengan periode kepemimpinan Gubernur Riau Tahun 2014-2019, yakni :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan
4. Menurunkankan kemiskinan
5. Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya Melayu, beriman dan bertaqwa serta pematapan kehidupan politik
7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan
8. Meningkatkan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup serta pariwisata
9. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur Riau, Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini.

Tabel 3.2. Faktor penghambat dan pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

<b>Visi : “Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan dan Tersedianya Lapangan Kerja”.</b>				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan			
	Program 9.1. Program	1. Kapasitas aparatur dinas belum optimal	1. Mahalnya mina input (sarana	1. Komitmen Pimpinan.

	<p>Pengembangan Budidaya Perikanan</p> <p>9.2. Pengembangan Perikanan Tangkap</p> <p>9.3. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil</p> <p>9.4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</p>	<p>2. Jumlah petugas teknis tertentu masih kurang (Keterbatasan jumlah dan tingkat kualifikasi aparat penyelenggara pembangunan Kelautan dan Perikanan khususnya tenaga profesional bidang Kelautan dan Perikanan yaitu Sarjana Perikanan/ D4 dengan spesialisasi; ahli pembenihan, ahli penyakit ikan, ahli pengolah hasil perikanan, ahli uji mutu hasil perikanan, ahli pengelola sumberdaya perairan, ahli pakan ikan, ahli perkapalan/ alat penangkapan/ mesin kapal ikan, pengawas di laut/PPNS dan penyuluh perikanan)</p> <p>3. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan</p> <p>4. Akses terhadap data dan informasi perikanan tangkap dan volume perdagangan/ekspor hasil perikanan belum optimal</p> <p>5. Peran dan fungsi lembaga unit pelaksana teknis dan unit pelayanan teknis lainnya belum optimal</p> <p>6. Sinergitas Tupoksi antar bidang dan UPT belum terjalin dengan baik</p> <p>7. Tersebarunya nelayan di pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga sulit dijangkau dalam pembinaan dan pengawasannya</p>	<p>produksi budidaya, sarana produksi penangkapan, pengawasan, dan sarana pengujian mutu )</p> <p>2. Kemampuan permodalan pembudidaya dan nelayan terbatas.</p> <p>3. Penerapan teknologi terbatas</p> <p>4. Keterbatasan akses pasar</p> <p>5. Akses dan kesempatan memperoleh informasi oleh pembudidaya dan nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil terbatas</p> <p>6. Tidak tersedianya formasi rekrut-ment aparatatur yang dibutuhkan seperti sarjana perikanan, pengawas perikanan, dan penyuluh perikanan</p> <p>7. Kurangnya Sarjana Perikanan dengan keahlian khusus yang ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT).</p>	<p>2. Sudah adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pengentasan kemiskinan.</p> <p>3. Penyediaan tenaga aparatatur yang berkompeten.</p> <p>4. Tersedianya petugas KKMB dan tersedianya SKIM Kredit pada usaha perikanan.</p> <p>5. Peningkatan frekuensi penyuluh ke pembudidaya/ nelayan</p> <p>6. Tersedianya kartu sehat untuk nelayan</p> <p>7. Gencarnya promosi makan ikan melalui Forikan dan Gemarikan</p>
2.	<p>Misi 9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan Program</p> <p>2.1. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil</p>	<p>1. Akses terhadap data dan informasi bisnis di bidang perikanan belum optimal</p> <p>2. Keikutsertaan peran swasta belum optimal</p> <p>3. Persaingan kualitas dan harga dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jambi</p> <p>4. Belum terintegrasinya usaha perikanan dari hulu sampai hilir sehingga mengakibatkan kurang efisiennya mata rantai tataniaga perikanan</p>	<p>1. Keterbatasan permodalan dan akses ke Bank sangat terbatas.</p> <p>2. Belum adanya regulasi tentang pengembangan kawasan perikanan</p>	<p>1. Komitmen pimpinan</p> <p>2. Fasilitasi iklim berusaha melalui promosi hasil usaha perikanan</p> <p>3. Sudah adanya program dan kebijakan tentang keterlibatan sektor swasta dalam upaya peningkatan produksi perikanan</p>

---

Untuk pencapaian visi dan misi Gubernur Riau Tahun 2014-2019, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai peran dalam mewujudkan pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam upaya pengentasan kemiskinan, dan pencapaian masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Bagaimanapun pembangunan Kelautan dan Perikanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan masyarakat di Provinsi Riau. Keterkaitan dengan visi dan misi Gubernur Riau Tahun 2014-2019, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau bertanggungjawab terhadap pembangunan Kelautan dan Perikanan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, penyerapan tenaga kerja, menjamin ketersediaan protein hewani bersumber dari ikan, khususnya dalam meningkatkan konsumsi ikan per kapita, dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

Untuk mencapai misi tersebut, tentu tidak lepas dari dukungan sarana dan prasana produksi perikanan, tata pemerintahan yang handal dan kerjasama lintas sektor lingkup pemerintah Provinsi Riau. Di samping itu perlu dilakukan terobosan kinerja yang bersinerji, terintegrasi, dan akuntabel antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dengan pihak institusi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten-Kota.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

Analisis Renstra K/L dan OPD Provinsi di tujukan untuk menilai kelestarian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra dinas kelautan dan perikanan Provinsi Riau, mengaju pada tugas dan fungsi serta wewenang yang telah dimanfaatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kementerian kelautan dan perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 (tiga) pilar yang menjadi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni:

1. Kedaulatan (Sovereignty)

mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Keberlanjutan (Sustainability)

Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3. Kesejahteraan (Prosperity) yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan

Berdasarkan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan sasaran strategis yang merupakan ukuran kinerja pencapaian misi sesuai dengan tujuannya. Sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya yaitu:

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Sasaran Renstra K/L

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	- Kinerja aparatur belum maksimal	- Sosial budaya masyarakat	Dukungan kebijakan dan dana dari pemerintah
2.	Meningkatkan mutu dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan	- Pembinaan kepada pembudidaya dan nelayan belum optimal	- Bencana alam dan perubahan iklim	
3.	Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif	- Penyediaan prasarana dan sarana belum tepat sasaran	- Letak geografi yang jauh, terpencil dan diwilayah perbatasan	

Mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, agenda pembangunan Kelautan dan Perikanan penjabaran operasionalnya dituangkan dalam 3 prioritas utama yakni: (1) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, (2) Meningkatkan Mutu Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan, dan (3) Meningkatkan Iklim Berusaha yang Kondusif.

- Prioritas 1 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Meningkatkan pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Riau dilakukan melalui pengembangan usaha perikanan budidaya, khususnya budidaya perikanan air tawar melalui pengembangan kawasan sentra-sentra produksi. Pengembangan perikanan tangkap di laut dan perairan pantai

---

maupun di perairan umum, saatnya untuk dibatasi. Kegiatan pengembangan untuk bidang tersebut adalah pengembangan nilai tambah produk hasil perikanan.

- Prioritas 2 : Meningkatkan Mutu Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan:

Meningkatkan Mutu Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang higienis, peningkatan daya saing produk Kelautan dan Perikanan, peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya perikanan.

- Prioritas 3 : Meningkatkan Iklim Berusaha yang Kondusif.

Iklim usaha yang kondusif dengan sendirinya akan tercipta jika adanya keamanan usaha, sarana produksi tersedia dan harga terjangkau, harga penjualan hasil usaha menguntungkan, tersedia modal kerja dan adanya dukungan perbankan. Berusaha yang kondusif sangat terkait dengan sistem aquabisnis yang diterapkan pelaku usaha. Pemahaman pelaku usaha dengan komoditas yang “laku” di pasar merupakan modal awal untuk meningkatkan iklim berusaha yang kondusif.

Di samping 3 prioritas tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan terkait dengan pengarusutamaan dan lintas bidang, yakni Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan; Lintas Bidang Perubahan Iklim Global dan Lintas Bidang Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan.

Terkait dengan pengarusutamaan dan lintas bidang, pembangunan kelautan dan perikanan akan mendukung 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yakni: (1) ekonomi, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kontribusi kelautan dan perikanan pada PDB daerah, dan dampak ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan; (2) sosial, tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marjinal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) lingkungan hidup, dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem dan keanekaragaman hayati.

### **1. Pengembangan Kawasan Kampung Perikanan**

Kawasan Kampung Perikanan (Minapolitan) merupakan upaya percepatan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

---

Pengembangan Kawasan Kampung Perikanan bertujuan untuk (i) meningkatkan produksi perikanan, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas produk kelautan dan perikanan, (ii) meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan merata, serta (iii) mengembangkan Kawasan Kampung Perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Adapun sasaran pengembangan Kawasan Kampung Perikanan adalah sebagai berikut (i) ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil makin kuat, (ii) usaha kelautan dan perikanan kelas menengah ke atas makin bertambah dan berdaya saing tinggi, serta (iii) sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi daerah.

Pendekatan pengembangan Kampung Perikanan dilakukan melalui :

a. Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Berbasis Wilayah.

Mendorong penerapan manajemen hamparan untuk mencapai skala ekonomi, mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sekaligus mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan sarana produksi, proses produksi, pengolahan dan pemasaran hasil dan pengelolaan lingkungan dalam suatu kesisteman yang mapan

b. Kawasan Ekonomi Unggulan.

Memacu pengembangan komoditas yang memiliki kriteria (i) bernilai ekonomis tinggi, (ii) teknologi tersedia, (iii) permintaan pasar besar, dan (iv) dapat dikembangkan secara massal.

c. Sentra Produksi

Kawasan Kampung Perikanan berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin.

d. Unit Usaha

Seluruh unit usaha dilakukan dengan menggunakan prinsip bisnis secara profesional dan berkembang dalam suatu kemitraan usaha yang saling memperkuat dan menghidupi.

e. Penyuluhan

---

Penguatan kelembagaan dan pengembangan jumlah penyuluh merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan pengembangan Kawasan Kampung Perikanan. Penyuluh akan berperan sebagai fasilitator dan pendamping penerapan teknologi penangkapan dan budidaya ikan serta pengolahan hasil perikanan.

f. Lintas Sektor

Kawasan Kampung Perikanan dikembangkan dengan dukungan dan kerjasama berbagai instansi terkait untuk mendukung kepastian usaha antara lain terkait dengan sarana dan prasarana pemasara produk perikanan, tata ruang wilayah, penyediaan air bersih, listrik, akses jalan, dan BBM.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengembangkan Kawasan Kampung Perikanan antara lain:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana perikanan pada kawasan pengembangan kawasan budidaya, memenuhi kebutuhan benih ikan, Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- b. Pengembangan lembaga pembiayaan kelautan dan perikanan yang mampu menyalurkan dana pembiayaan melalui program KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank).
- c. Peningkatan kapasitas skala usaha dan kewirausahaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) pada usaha di perikanan budidaya, dan usaha pengolahan dan pemasaran.

## 2. Entrepreneurship

Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha (*entrepreneurship*) dilaksanakan melalui upaya membangun kepercayaan (*trust building*) bagi para pelaku, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan. Jiwa *entrepreneurship* para pelaku tersebut dibangun agar para pelaku dapat memanfaatkan fasilitas guna memperlancar pengelolaan usaha, baik yang diperoleh melalui kredit maupun melalui program-program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Strategi *entrepreneurship* akan memenuhi kebutuhan nelayan dan pembudidaya serta pemasar dan pengolah dalam berproduksi seperti kapal, BBM, jaring, benih, pengairan dan lain-lainnya, serta pemerintah mengupayakan kepastian pasar bagi penjualan produk perikanan dengan harga yang pantas.

---

Pengembangan kewirausahaan dilakukan dalam rangka penciptaan usaha di sektor kelautan dan perikanan bagi sarjana yang masih menganggur. Kegiatan yang dilakukan adalah pembekalan dan motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang mengenai budidaya perikanan, penangkapan, pengolahan dan pemasaran serta pembuatan proposal. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat memperoleh bantuan permodalan baik dari lembaga keuangan, BUMN, swasta maupun dari pemerintah melalui dana APBD. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemuda, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau memiliki UPT yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan teknis/magang budidaya perikanan seperti UPBAT Rumbai, UPBAL Sei Suir, BBIS Sei Tibun dan Dempond Kampar. Sementara untuk pengolahan ikan dapat digunakan Sentra Produksi Pengolahan Ikan Koto Masjid.

### **3. Networking**

Setiap individu, institusi, dan setiap wilayah punya potensi masing-masing yang sangat besar di samping juga masing-masing memiliki kekurangan atau kelemahan. Namun demikian setiap pelaku pembangunan kelautan dan perikanan bekerja sendiri-sendiri. Sampai saat ini masih ada pemangku kepentingan pembangunan kelautan dan perikanan yang belum terhimpun dalam suatu bentuk jaringan kerja bahkan masih terlihat indikasi bahwa masing-masing masih mengutamakan identitas diri. Keadaan tersebut akan berpengaruh pada hasil kerja yang kurang optimal dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau akan mengoptimalkan hasil pembangunan kelautan dan perikanan dengan memfasilitasi pengembangan jejaring kerja. Melalui penciptaan dan penguatan *networking*, baik secara internal antar bidang di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, antara provinsi-kabupaten/kota, antar daerah kabupaten-kota, antar instansi/lintas sektor, komunitas bisnis, kerjasama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau.

Melalui pembentukan jejaring kerja akan terbina interaksi yang baik, secara langsung dan tidak langsung, antara berbagai pemangku kepentingan dan instansi pemerintah, sehingga terjalin suatu kesatuan yang lebih besar dan kuat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengeliminir kekurangan dan kelemahan yang dimiliki.

### **4. Technology and Innovation**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau akan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan hanya jika dapat menguasai teknologi perikanan untuk

---

sistem akuakultur, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, serta teknologi konservasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim. Kegiatan adaptasi teknologi, uji terap lapangan dan pengembangan penelitian dilakukan untuk menemukan teknologi-teknologi baru dalam rangka meningkatkan optimasi pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari dan bertanggung jawab.

## **5. Empowering**

Kemiskinan merupakan permasalahan nelayan dan pembudidaya ikan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban dan dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, maka dibutuhkan pemberdayaan masyarakat.

Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberi fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan menuju kemandirian dan kesejahteraan. Secara umum, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kultur, penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal.

Pemberdayaan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan dalam jangka panjang diarahkan untuk (i) peningkatan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan masyarakat, (ii) peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan, (iii) pengembangan kemitraan dengan lembaga swasta dan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan antara lain pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan, pengawasan sumber daya ikan, pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini akan dilakukan (i) identifikasi dan kajian seluruh potensi dan permasalahan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada dalam rangka menyusun perencanaan pengelolaannya berbasis desa (ii) melibatkan secara aktif pemangku kepentingan terkait dengan

---

upaya pemberdayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat, (iii) meningkatkan kapasitas aparatur sebagai pengelola di wilayahnya, (iv) memperbaiki kualitas masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan permasalahan yang dihadapi terkait dengan peningkatan kapasitas usaha, (v) memanfaatkan secara optimal kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dibentuk oleh berbagai program sebelumnya atau membentuk kelompok masyarakat baru, (vi) mengoptimalkan peran tenaga pendamping sebagai fasilitator sekaligus motivator dalam proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan dan pelaporan di tingkat desa serta melakukan sosialisasi, serta (vii) menerapkan upaya pemberdayaan secara konsisten dan berkelanjutan dengan pola *bottom up* sehingga jenis kegiatan yang dilaksanakan merupakan aspirasi kelompok masyarakat di wilayahnya.

## **6. Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat**

Keberadaan kelompok masyarakat di bidang budidaya, penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran dan kelompok pengawasan akan memberikan keuntungan bagi anggota kelompoknya. Melalui kelompok akan terjadi interaksi antar anggota untuk saling tukar pengalaman dan menumbuhkan kesadaran bersama untuk menguatkan posisi tawar, serta kemudahan dalam pembinaan, penyampaian informasi, dan diseminasi teknologi.

Berbagai kelompok tercakup dalam Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan), KUB (Kelompok Usaha Bersama) penangkapan ikan, Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), dan Pokmas (Kelompok Masyarakat) pengelola terumbu karang. Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk akan terus diupayakan keberadaannya dan ditingkatkan kapasitasnya, sedangkan kelompok-kelompok baru akan ditumbuhkan. Pembentukan atau penguatan kelompok secara modern dapat memanfaatkan akses ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, sektor Kelautan dan Perikanan merupakan sektor andalan yang potensial untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kebutuhan ikan pada pasar nasional maupun pasar global dari tahun-tahun cenderung menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan semakin banyaknya permasalahan penyakit pada komoditas selain ikan terutama pada komoditas ternak (Flu babi, Flu burung, Sapi gila dan sebagainya). Dampaknya, terjadi pergeseran kebiasaan lokal khususnya pada masyarakat Eropa, Amerika dan Jepang dan negara maju lainnya, bahwa masyarakat maju tersebut mengutamakan mengkonsumsi protein berasal dari ikan.

Untuk meraih peluang tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah mencanangkan gerakan “*The Blue Revolution Polices*” . Sasarannya, pada tahun 2015, Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar dengan target peningkatan produksi perikanan sebesar 353 %.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tahun 2015 – 2019 harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau agar terwujud prinsip keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.

Persoalan yang dialami saat ini adalah dimana penyusunan Renstra 2014 – 2019 ini belum seluruhnya bisa mengacu kepada Rencana Pengembangan Kawasan Minapolitan, sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013, tentang penetapan kawasan Minapolitan di Provinsi Riau. Adapun kawasan Minapolitan adalah pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dikembangkan secara terpadu berbasis kawasan, kawasan Minapolitan di Tabel 3.4. Kawasan Minapolitan di Provinsi Riau.

Tabel 3.4. Kawasan Minapolitan di Provinsi Riau

	Kabupaten	Kawasan Minapolitan Budidaya	Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap
1.	Kuantan Singingi	a. Desa Marsawa b. Kecamatan Benai	- -
2.	Indragiri Hilir	Kecamatan Reteh	PPI Kuala Enok
3.	Kampar	Kecamatan XIII Kt. Kampar	-
4.	Indragiri Hulu	Kecamatan Pasir Penyau	-
5.	Dumai	Kecamatan S. Sembilan	PPI Dumai
6.	Kep. Meranti	-	PPI Tanjung Samak

Berkembangnya kawasan Minapolitan berdampak pada semakin luasnya peruntukaan lahan untuk usaha budidaya maupun penangkapan, maka kajian pengembangan kawasan minapolitan di kabupaten/kota juga harus mengikuti RTRW kabupaten/kota yang telah mengacu pada RTRW Provinsi Riau.

Ancaman krisis pangan akibat pemanasan global mengakibatkan kekeringan dan banjir setiap tahun. Berdasarkan analisis geologi, temperatur planet bumi telah meningkat beberapa derajat dibanding tahun sebelumnya, naiknya suhu bumi mengakibatkan naiknya permukaan air laut, sebagai contoh sebelum tahun 2000,

---

pertapakan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Dumai tidak pernah terendam air pasang laut (rob), namun lima tahun terakhir, setiap pasang purnama, areal SUPM Dumai terendam air pasang, akibatnya proses belajar mengajar terganggu karena air masuk ke ruangan, dan berkembangnya penyakit ikan pada usaha pembudidayaan.

Upaya yang dilakukan terhadap perubahan iklim dalam sektor kelautan dan perikanan hanya ada dua kegiatan, yakni mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Upaya mitigasi bencana yang dapat dilakukan adalah menjaga kelestarian dan merehabilitasi kehijauan hutan bakau (Mangrove) untuk meminimalkan terjadinya erosi dan abrasi pantai.

Sementara itu upaya yang dilakukan terkait dengan adaptasi terhadap perubahan iklim adalah memberi pemahaman dampak dari perubahan iklim terhadap nelayan dan pembudidaya ikan. Upaya lainnya adalah “mencari” species budidaya yang adaptif dengan perubahan iklim. Tentunya, di samping itu, yang dapat dilakukan adalah merelokasi perkampungan nelayan dari garis pantai, atau dari sempadan sungai.

Dari uraian di atas, keterkaitan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan perubahan iklim dan tata ruang adalah, menganalisis kembali peruntukan ataupun alokasi budidaya, khususnya untuk budidaya perairan. Pemanfaatan perairan waduk, danau, situ dan genangan air lainnya untuk keramba; pemanfaatan perairan pantai untuk penempatan keramba jaring apung (KJA); dan wilayah dan jalur penangkapan ikan perlu dikaji dan disesuaikan kembali. Artinya, peruntukan budidaya perairan pada tata ruang Provinsi Riau, perlu alokasi ruang yang jelas dan tegas.

Pembangunan Kelautan dan Perikanan berada dalam lingkup Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH). SDA-LH sangat penting dalam pembangunan daerah, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, SDA-LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang.

Lingkup pembangunan bidang SDA dan LH meliputi (1) revitalisasi sumber daya perikanan, dan (2) perbaikan pengelolaan SDA dan perbaikan fungsi LH. Pelaksanaan dari kebijakan ini memberikan hasil terhadap meningkatnya peran SDA dan LH dalam perkembangan perekonomian daerah. Hal ini dicerminkan

---

dengan semakin meningkatnya kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH terhadap pembentukan PDB Daerah selama periode tersebut. Selain itu, sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH juga menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar tenaga kerja, terutama di perdesaan dan pesisir.

#### **b.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan, secara umum isu-isu strategis pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Riau ditetapkan sebagai berikut :

1. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan bagi peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya belum maksimal

Pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap sebesar, 134.687,80 ton dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 81.794 orang. Rata rata produktivitas mereka adalah sebesar 1.646,7 kg, jika diasumsikan harga rata-rata ikan laut sebesar Rp. 35.000 per kg, maka penghasilan kotor pelaku usaha setiap tahun 2017 adalah sebesar Rp. 57.634.500 atau sebesar 4.802.875 perbulan. Penghasilan kotor tersebut biasanya digunakan untuk biaya operasional sebesar 40 % (bahan bakar, es dan perawatan mesin), sehingga taksiran pendapatan nelayan adalah sebesar Rp. 2.881.725 per bulan. Angka tersebut hampir sama jika dibandingkan dengan penerimaan pelaku usaha budidaya perikanan. Pada tahun 2017 total produksi perikanan budidaya sebesar 74.343,01, ton dan jumlah pelaku usaha budidaya perikanan sebanyak, 24.161 orang, maka produktivitas usahanya adalah sebesar 3.076 kg. Jika asumsi harga ikan sebesar Rp. 14.000/kg, maka penghasilan kotor pelaku usaha budidaya pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 43.064.000 per tahun, atau sebesar Rp.3.588,666 per bulan.

Sejalan dengan itu, perkembangan produk kelautan dan perikanan sebagai lapangan berusaha dan dalam rangka penyediaan bahan pangan protein bersumber dari ikan masih tergolong rendah, dan masih dapat ditingkatkan, khususnya pada perikanan budidaya.

2. Daya saing produk Kelautan dan Perikanan masih rendah

Daya saing produk usaha perikanan budidaya masih rendah. Hal ini disebabkan pengetahuan para pembudidaya masih terbatas.

Pada usaha perikanan budidaya, daya saing rendah dan tidak kompetitif dengan produk yang sama yang dihasilkan pembudidaya ikan dari provinsi terdekat, seperti dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Jambi, bahkan dengan komoditas ikan yang datang dari Malaysia dan Vietnam. Hal ini

---

disebabkan harga pakan ikan masih tergolong tinggi. Di samping itu, juga dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas benih yang digunakan pembudidaya ikan.

3. Diversifikasi produk olahan hasil-hasil perikanan masih terbatas

Daya saing dan diversifikasi produk perikanan masih rendah. Hal ini disebabkan pengetahuan para pengolah hasil perikanan masih terbatas.

Seperti halnya pada usaha perikanan budidaya, daya saing produk olahan hasil perikanan rendah dan tidak kompetitif dengan produk yang sama yang dihasilkan provinsi terdekat, seperti yang datang dari Sumatera Utara. Hal ini disebabkan skala usaha pengolahan hasil produk perikanan masih bersifat tradisional dan dilakukan dengan skala keluarga.

4. Penguasaan teknologi pembudidayaan perikanan, perbenihan dan pengolahan hasil perikanan masih rendah

Satu faktor penentu keberhasilan usaha perikanan budidaya adalah ketersediaan benih, baik secara kuantitas maupun kualitas. Perhatikan Tabel 3.6, bahwa produksi perikanan dari usaha budidaya ikan di Provinsi Riau Tahun 2017 adalah sebesar 74.343,01 ton. Jika diasumsikan setiap rata-rata berat ikan yang dipasarkan adalah seberat 400 gram, maka diperkirakan jumlah produksi perikanan budidaya Riau pada tahun 2017 adalah sebanyak 185.857.750 ekor. Sementara itu, pada tabel 6 belum dicantumkan pencapaian produksi benih ikan di Provinsi Riau pada tahun 2017. Fakta dari pengusaha benih selama ini, produksi benih ikan di Provinsi Riau masih berada dibawah kebutuhan. Untuk menutupi kekurangan, benih didatangkan dari Sumatera Barat, khususnya untuk komoditas ikan mas. Artinya masih ada peluang untuk bekerja dan berusaha pada usaha perbenihan. Di sisi lain, masih dibutuhkan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) Sentral untuk menyuplai calon induk berkualitas pada unit-unit KPR-UPR. Sementara itu kualitas dan kuantitas KPR-UPR masih memerlukan pengembangan.

5. Pemanfaatan sumber daya pengembangan perikanan budidaya belum optimal

Sejalan dengan poin 4 di atas, pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya belum optimal. Masih ada peluang berusaha di bidang perikanan budidaya, khususnya di bidang usaha perbenihan, pembuatan pakan lokal seterusnya usaha pemeliharaan dan pascapanen.

6. Kelestarian sumber daya perikanan

Kondisi kelestarian sumber daya perikanan di Provinsi Riau sudah pada tingkat mengawatirkan, khususnya pada perikanan pantai dan perikanan

---

perairan umum. Hal tersebut sejalan dengan maraknya industrialisasi di daerah wilayah pesisir dan juga di daerah aliran sungai (DAS). Berdasarkan laporan pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, bahwa beberapa parameter kualitas air pada empat aliran sungai besar di Riau tidak memenuhi baku mutu sebagaimana yang dipersyaratkan Peraturan Daerah Provinsi Riau, dan berada di atas ambang batas. Hal ini sejalan dengan maraknya *illegal mining* (Penambangan Emas Tanpa Izin) pada aliran sungai tersebut, khususnya Sungai Rokan, Sungai Indragiri, dan Sungai Kampar Kiri.

Kondisi tersebut jika dibiarkan terus, akan berdampak pada kualitas ikan peliharaan, dan akan mempengaruhi keamanan pangan. Sementara itu, pada perairan wilayah pesisir kondisi kawasan mangrove sudah pada tingkat mengawatirkan. Begitu juga dengan keberadaan tasik, situ, waduk, meander, danau yang selama ini merupakan lumbung ikan, kondisinya sudah pada tingkat mengawatirkan, sehingga perlu diawasi, dijaga dan dipantau keberadaannya.

---

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **1.1. Visi**

Pembangunan perikanan dan kelautan yang dilaksanakan telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian, perubahan tatanan nasional dan regional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan perikanan dan kelautan secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak dinamis tersebut.

Dalam pembangunan perikanan dan kelautan, keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya menjadi pertimbangan utama dan harus diupayakan secara konsisten. Kekayaan sumberdaya perikanan dan kelautan tidak saja dimanfaatkan untuk masyarakat saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Pada sisi lain, kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumber daya perikanan dan kelautan sebagai motor penggerak pembangunan daerah, tercermin dalam pencapaian peningkatan produksi perikanan budidaya pada beberapa kabupaten-kota, seperti di Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, pembentukan Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai ujung tombak di daerah menjadi sangat penting. Terlebih lagi, dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000, maka dilakukan reorganisasi pada Dinas Perikanan Provinsi Riau. Melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 telah dibentuk Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau yang diperkuat dengan dikeluarkannya PERDA Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau, dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Pemerintah Provinsi Riau.

Guna menjalankan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang maka kembali Dinas Kelautan dan Perikanan mengalami perubahan organisasi dengan nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

---

Dengan mempertimbangkan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur, tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau Tahun 2014–2019 sebagai berikut :

***“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”***

Merujuk visi dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan mengemban tugas mewujudkan masyarakat sejahtera dan berdaya saing melalui visi :

***“Mewujudkan Perikanan Dan Kelautan Riau Yang Tangguh Serta Lestari Tahun 2020”***

Pengertian dari kata kunci pada visi diatas adalah :

1. **Perikanan dan kelautan yang tangguh**, berarti mampu menghasilkan produk perikanan dan kelautan, yang kontinyu, berkualitas unggul secara kompetitif dan komparatif.
2. **Perikanan dan kelautan yang lestari**, artinya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan mampu bertahan dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang strategis.

## **1.2 Misi**

Untuk mewujudkan Visi diatas, telah ditetapkan Misi Pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan yang berkelanjutan
2. Meningkatkan pemantauan pengendalian, dan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan
3. Meningkatkan kesejahteraan pelaku perikanan dan kelautan yang mandiri.

## **3.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

---

Memperhatikan kondisi perikanan dan kelautan saat ini, kondisi yang diinginkan dan permasalahan yang ada serta mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sehingga dapat memperjelas penetapan program dan kegiatan pokok yang dilaksanakan.

Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

**MISI I : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan yang berkelanjutan**

Misi ini bertujuan untuk :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan dan Kelautan yang berkelanjutan
2. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keaneka ragaman hayati laut.
3. Meningkatkan daya saing produk pengolahan hasil perikanan dan kelautan

**MISI II : Meningkatkan pemantauan pengendalian, dan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan**

Misi ini bertujuan untuk :

1. Melaksanakan pemantauan, sumber daya perikanan dan kelautan,
2. Melaksanakan pengendalian sumber daya perikanan dan Kelautan
3. Melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan,
4. Meningkatnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan
5. Mengembangkan sistem pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati

**MISI III : Meningkatkan kesejahteraan pelaku perikanan dan kelautan yang mandiri.**

Misi ini bertujuan untuk :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Perikanan dan Kelautan
2. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
3. Mengembangkan inovasi IPTEK Perikanan dan Kelautan

**3.4 . Sasaran Strategis**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran indikator kinerja sesuai

---

tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

**MISI I : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan yang berkelanjutan**

Sasaran Strategis Misi ini untuk :

1. Terwujudnya produksi perikanan tangkap tidak melebihi daya dukung perairan
2. Terwujudnya produksi perikanan budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan
3. Peningkatan diversifikasi produksi pengolahan hasil perikanan yang berdaya saing
4. Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

**MISI II : Meningkatkan pemantauan pengendalian, dan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan**

Sasaran Strategis Misi ini untuk :

1. Terlaksana pemantauan, sumber daya perikanan dan kelautan
2. Terwujudnya Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan
3. Terlaksana pengendalian sumber daya perikanan dan Kelautan
4. Terlaksana pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan
5. Terlaksana penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan

**MISI III : Meningkatkan kesejahteraan pelaku perikanan dan kelautan yang mandiri.**

Sasaran Strategis ini untuk :

1. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pembudidaya Ikan dan Nelayan
2. Peningkatan Kesejahteraan dan Kapasitas SDM Pelaku Perikanan dan Kelautan

Tujuan dan sasaran pembangunan perikanan dan kelautan telah ditetapkan untuk mewujudkan misi dapat dilihat pada tabel 4.1. dibawah ini.

**Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan  
Jangka Menengah Provinsi Riau tahun 2014 – 2019**

No.	Tujuan	Sasaran
1.	<b>MISI I : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Produksi Perikanan dan Kelautan yang berkelanjutan</li> <li>2. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keaneka ragaman hayati laut.</li> <li>3. Meningkatkan daya saing produk pengolahan hasil perikanan dan kelautan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya produksi perikanan tangkap tidak melebihi daya dukung perairan</li> <li>2. Terwujudnya produksi perikanan budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan</li> <li>3. Peningkatan diversifikasi produksi pengolahan hasil perikanan yang berdaya saing</li> <li>4. Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil</li> </ol>
2.	<b>MISI II : Meningkatkan Pemantauan Pengendalian, dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pemantauan, sumber daya perikanan dan kelautan</li> <li>2. Melaksanakan pengendalian sumber daya perikanan dan Kelautan</li> <li>3. Melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan</li> <li>4. Meningkatnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan</li> <li>5. Mengembangkan sistem pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana pemantauan, sumber daya perikanan dan kelautan</li> <li>2. Terwujudnya Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan</li> <li>3. Terlaksana pengendalian sumber daya perikanan dan Kelautan</li> <li>4. Terlaksana pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan</li> <li>5. Terlaksana penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan</li> </ol>
3.	<b>MISI III : Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Perikanan dan Kelautan yang Mandiri.</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Perikanan dan Kelautan</li> <li>2. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat</li> <li>3. Mengembangkan inovasi IPTEK Perikanan dan Kelautan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pembudidaya Ikan dan Nelayan</li> <li>2. Peningkatan Kesejahteraan dan Kapasitas SDM Pelaku Perikanan dan Kelautan</li> </ol>

## 2.5 Kebijakan dan Strategi

### a. Kebijakan

- Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan.

- 
- Meningkatkan Pemantauan Pengendalian, dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
  - Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Perikanan dan Kelautan yang Mandiri.

**b. Strategi :**

1. Pengembangan Budidaya Perikanan
  - Kawasan Minapolitan (Kab. Pelalawan, Rokan Hulu)
  - Pakan Mandiri (6 kelompok)
  - Penyediaan Induk dan benih unggul
  - Domestifikasi Ikan langka/ekonomis tinggi khas daerah
  - Pengadaan Sarpras Perikanan Budidaya
2. Pengembangan Perikanan Tangkap
  - Pengadaan Alat Tangkap Ikan
  - Pengadaan Kapal Penangkap Ikan
  - Pemulihan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum
  - Peningkatan Kapasitas Operasional Pelabuhan Perikanan
3. Optimalisasi Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan
  - Peningkatan Sarpras Produk Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan
  - Promosi Produk Pengolahan Hasil Perikanan
  - Sosialisasi Gemarikan
4. Pengembangan Konservasi Sumberdaya Perikanan Dan Kelautan
  - Pencadangan Kawasan Konservasi Daerah
5. Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
  - Gelar operasi pengawasan terpadu
  - Peningkatan sarana prasarana pengawasan
6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  - Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi WP3K
  - Penyusunan Data Base Pesisir
7. Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan Dan Kelautan
  - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana

Tabel 4.2. (Tabel T-C.25)  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan  
 Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan Produksi Perikanan yang berkelanjutan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan (ton)	220.771,00	233.718,52	246.023,02	261.208,30	277.589,30
			Jumlah Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103,10	103,70	104,35	105,10	112
2	Meningkatkan Daya Saing Produk Pengolahan	Meningkatnya konsumsi makan ikan di Provinsi Riau	Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun	41,85	42,0	42,06	42,18	42,50
		Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan	Nilai Ekspor (USD)	8.000.000	8.200.000	8.500.000	8.800.000	9.000.000
3	Terlaksananya Konservasi di Kawasan Perairan Daerah	Terwujudnya Pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	Luas Kawasan Konservasi (Ha)	26	34	42	50	55
4	Meningkatkan Potensi/Daya Dukung Perairan	Meningkatnya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan laut	Menurunnya Tingkat Illegal Fishing (IUU)	-	-	-	61	79

---

Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan indikator kinerja sasaran dengan Formulasi perhitungan sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan

- Jumlah produksi perikanan

Formulasi perhitungan : Produksi hasil kompilasi (jumlah produksi perikanan tangkap + jumlah produksi budidaya)

- Jumlah Nilai Tukar Nelayan

Formulasi perhitungan :

$$\text{Nilai Tukar Nelayan} = \frac{\text{Total penerimaan nelayan}}{\text{Total pengeluaran nelayan}} \times 100$$

2. Meningkatnya konsumsi makan ikan di Provinsi Riau

- Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Formulasi perhitungan :

Angka Konsumsi Ikan = Konsumsi di Rumah Tangga (KIDRT) + Konsumsi di luar Rumah Tangga + Konsumsi tidak tercatat

Ket :

– Konsumsi di Rumah Tangga = Konsumsi ikan di rumah tangga

– Konsumsi di luar Rumah Tangga = Konsumsi ikan di hotel, restoran, catering dan rumah makan (15 %)

– Konsumsi tidak tercatat = Konsumsi pondok pesantren, panti asuhan, asrama pendidikan kedinasan full day scholl (10 %)

3. Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan

- Nilai Ekspor (U\$D)

Formulasi perhitungan :

Ekspor hasil kumulasi (Nilai Ekspor Kab/Kota) =

Jumlah ekspor (kg) x Harga (Per Kg) (Dalam Satuan U\$D)

4. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

- Luas Kawasan Konservasi (Ha)

Formulasi Perhitungan :

Luas Kawasan Konservasi = Luas yang ditetapkan + Luas yang dicadangkan

---

+ Calon yang dicadangkan

5. Meningkatnya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan laut

- Menurunnya Tingkat Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing

Formulasi Perhitungan :

Kasus pelanggaran yang dapat diselesaikan dalam 1 Tahun

---

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **1.1. Strategi**

Menentukan arah kebijakan dan strategi dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Riau dilakukan dengan pendekatan Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pemangku kebijakan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths), dan peluang (Opportunities), namun secara kebersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses), dan ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, dan strategis Organisasi Perangkat Daerah dalam menentukan kebijakan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) pada kondisi yang ada saat ini, faktor eksternal dan internal yang teridentifikasi dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yaitu:

1. Peningkatan Produksi Perikanan yang berkelanjutan  
Strategi di arahkan kepada Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana perikanan budidaya dan penangkapan, dan melakukan Pengelolaan Perizinan Kapal Perikanan Tangkap yang efektif.
2. Peningkatan Daya Saing Produk Pengolahan  
Upaya peningkatan daya saing produk pengolahan dilakukan dengan pembinaan mutu tersebut menitikberatkan pada penerapan hasil pengolahan perikanan yang memiliki daya saing. Pembinaan mutu tersebut meliputi upaya-upaya yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai pendistribusian untuk memenuhi persyaratan mutu keamanan hasil perikanan.
3. Fasilitasi Penetapan Konservasi di Kawasan Perairan Daerah  
Penetapan kawasan konservasi adalah untuk mempertahankan suatu habitat dan kondisi lingkungan agar tetap berkelanjutan dan melakukan penetapan Surat Keputusan pencadangan kawasan konservasi, Unit Organisasi Pengelola kawasan konservasi dan Dokumen Rencana Pengelolaan kawasan konservasi.
4. Peningkatan Potensi/Daya Dukung Perairan  
Peningkatan potensi/daya dukung perairan dengan melakukan Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya

---

Laut, dengan gelar operasi secara berkelanjutan dalam rangka pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

#### 5. Pengelolaan Tata Ruang

Pengelolaan tata ruang berkaitan dengan penataan wilayah pesisir dan laut dituangkan dalam rencana zonasi yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap - tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

### 5.2. Arah kebijakan

Arah kebijakan pembagunan kelautan dan perikanan Provinsi Riau akan berkontribusi terhadap peningkatan PDB perikanan Selain itu juga dapat meningkatkan produksi perikanan, tingkat konsumsi ikan, produk olahan Luas kawasan konservasi pengelolaan pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Arah kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2019.

#### 1. Kebijakan Umum

- Meningkatkan kualitas dan Kesejahteraan Pelaku Perikanan dan Kelautan dengan Peningkatan luas areal budidaya.
- Peningkatan jangkauan areal fishing ground penangkapan ikan. Optimalisasi peran serta masyarakat pembudidaya ikan, nelayan, Poksarkan dan stake holders lainnya, melalui KUB yang berbasis UMKM
- Meningkatkan dan berkelanjutannya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, melalui Optimalisasi Pemantauan, Pengendalian dan Pengawas Sumber daya Perikanan dan Kelautan
- Pemberdayaan masyarakat pesisir.

#### 2. Kebijakan Teknis

- Meningkatnya Sarana dan Prasarana budidaya Perikanan, melalui pemanfaatan fungsi Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan.
- Meningkatnya Mutu Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan, melalui Peningkatan nilai ekspor perikanan, dan Peningkatan konsumsi ikan.
- Pemantauan, Pengendalian dan Pengawas Sumber daya Perikanan dan Kelautan, melalui Optimalisasi pengawasan dan pengendalian kawasan per-airan sehingga mampu menurunkan aktifitas IUU, dan Melakukan Patroli pengawasan yang bersinergi dengan aparat terkait di lapangan.

**Tabel 5.1. (Tabel T-C 26)**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI: <i>“Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan dan Tersedianya Lapangan Kerja”.</i>			
MISI 7: Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Produksi Perikanan</li> <li>- Meningkatkan Konsumsi Ikan</li> <li>- Meningkatkan Nilai Ekspor Hasil Perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Budidaya Perikanan</li> <li>- Pengembangan Perikanan Tangkap</li> <li>- Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan dan Kelautan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensifikasi dan Ekstensifikasi budidaya perikanan</li> <li>- Meningkatkan fasilitas sarana produksi kelompok nelayan</li> <li>- Peningkatan jangkaun areal fishing ground penangkapan ikan.</li> <li>- Penguatan kelembagaan perikanan</li> <li>- Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya</li> </ul>
MISI 8 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan potensi/daya dukung perikanan dan kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunkan Tingkat IUU Fishing</li> <li>- Mengurangi degradasi lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut</li> <li>- Pengelolaan Tata Ruang Laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>- Pengawasan Sumberdaya Perairan</li> <li>- Penetapan Kawasan Konservasi</li> <li>- Rehabilitasi Hutan Mangrove</li> </ul>

---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan analisa situasi pembangunan kelautan dan perikanan di masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang dengan pendekatan SWOT. Adapun acuan penyusunan adalah Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Nasional, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan suatu program kerja.

Program Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah dirumuskan berdasarkan RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 yaitu

Program:

1. Program Pengembangan budidaya perikanan
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
3. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
6. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
7. Program Tata Ruang

Penunjang

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Pencapaian Kinerja Dan Keuangan

Implementasi Program

#### **I. Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

1. Pembangunan Keramba Tanjap KJA Galvanis dan Keramba Tancap
2. Pengadaan Mesin Pakan Ikan Skala Rumah Tangga dan Pengadaan Bahan Baku Pakan Lokal
3. Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
4. Revitalisasi Kawasan Budidaya air laut, air payau dan tawar

- 
5. Pembangunan kolam terpal dalam mendukung pengembangan kolam rakyat
  6. Peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan UPP se Riau
  7. Pekan Promosi/Pameran/Seminar/Expo Teknologi Perikanan Budidaya Tingkat Nasional
  8. Pembangunan sarana dan prasarana mendukung kawasan mina politan
  9. Sosialisasi pembinaan dan penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) se Riau
  10. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
  11. Pengadaan sarana dan Fasilitas pada stasiun pembinaan dan pengembangan BBAT di Sentra Produksi Koto Panjang
  12. Workshop Teknis Pembenihan Air Tawar
  13. Dukungan Operasional UPT Pembenihan
  14. Pengadaan Benih Ikan
  15. Pengadaan bibit dan pakan ikan masyarakat
  16. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembenihan Ikan
  17. Pembangunan Mess Pelatihan Pembenihan
  18. Pembangunan Kolam Rakyat
  19. Pembangunan jalan/jembatan di sentra produksi perikanan
  20. Pengadaan peralatan pembibitan ikan air tawar
  21. Pengadaan induk ikan langka
  22. Peningkatan sarana dan Prasarana UPT Pembenihan ikan
  23. Pembangunan Kolam Rakyat untuk mendukung rumah layak huni
  24. Pembangunan kolam terpal dalam mendukung pengembangan kolam rakyat
  25. Dukungan Operasional UPT Pembenihan
  26. Pembuatan Perencanaan DED Bangunan di BBIS sei Tibun
  27. Peningkatan operasional eskavator Untuk Perikanan Budidaya
  28. Pengembangan Data Produksi Potensi Perikanan Budidaya
  29. Fungsionalisasi Sekretariat, Sosialisasi, Pembinaan, sertifikat dan Survailan CBIB
  30. Optimalisasi Stasiun Pembinaan dan Pengembangan kawasan minapolitan
  31. Pembangunan Mess Pelatihan Pembenihan Tahap II

- 
32. Peningkatan Sistem dan cara pengelolaan laboratorium UPT Pembenihan
  33. Monitoring dan Evaluasi Unit Pembenihan
  34. Pembangunan Rehab Saluran Air Masuk di Denpond
  35. Pengembangan Data Pembenihan Se Provinsi Riau
  36. Pengadaan Keramba Jaring Apung
  37. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan Provinsi Riau (DAK 2015)
  38. Pembenihan ikan langka yang memiliki ekonomis tinggi
  39. Pengembangan teknologi anjuran Perikanan Budidaya
  40. Pengembangan Sistem Mutu Pakan dan Pengawasan Peredaran Pakan/Bahan Baku Pakan
  41. Pembinaan Pembudidaya Ikan Hias
  42. Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Penerima PUPM PB
  43. Pembinaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
  44. Pengembangan Kapasitas Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Beserta Peralatannya
  45. Teknik Aplikasi terhadap Pembenihan Ikan Air Tawar
  46. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kinerja UPTD Se Provinsi Riau
  47. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembenihan Ikan
  48. Masterplan Pengembangan Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau
  49. Monitoring dan Evaluasi Budidaya Perikanan
  50. Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pembenihan
  51. Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan (DAK)
  52. Pengelolaan Perizinan Perikanan di Provinsi Riau
  53. Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Hibah Tahun 2018
  54. Pengembangan sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
  55. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Budidaya Perikanan
  56. Peningkatan Pelayanan UPT Budidaya Perikanan
  57. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Budidaya Perikanan
  58. Pengembangan Bibit Unggul
  59. Penyusunan Database Perikanan Budidaya
  60. Revitalisasi Kawasan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau
  61. Pemulihan Potensi Sumberdaya Perikanan di Danau Larangan

---

## **II. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

1. Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap
2. Pertemuan FKPPS regional dan Pertemuan koordinasi Loog Book
3. Bimbingan Teknis Manajemen Usaha Perikanan Tangkap
4. Apresiasi Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap
5. Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak
6. Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan
7. Sertifikasi ANKAPIN III/Atkapin III Bagi Nelayan Penerima INKAMINA di Provinsi Riau
8. Pembinaan dan Operasional Forum KUB Perikanan Tangkap
9. Sosialisasi dan Penyusunan WKOPP Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak
10. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
11. Pengadaan Alat Tangkap Ikan
12. Pengadaan mesin tarik untuk kelompok ikan
13. Pembangunan kapal ikan > 30 GT dan alat penangkapan ikan (DAK)
14. Pengelolaan Sumberdaya di Teritorial
15. Pemulihan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum Daratan
16. Bimtek Manajemen Usaha Perikanan Tangkap
17. Pembinaan KUB Penerima Kapal INKAMINA Se Provinsi Riau
18. Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Investasi Permodalan Perikanan Tangkap
19. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu
20. Pengelolaan Perairan Teritorial di WPP
21. Penilaian Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap
22. Penataan dan Inventarisasi Kuota Penangkapan dan Alat Tangkap Ikan di Provinsi Riau
23. Pengadaan Kapal dan Alat Tangkap
24. Percepatan Kartu Nelayan
25. Diseminasi Asuransi Nelayan

## **III. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan**

- 
1. Peningkatan sarana dan prasaran serta infrastuktur pemasaran hasil perikanan
  2. Pengembangan menu ikan,kampanye makan ikan dan aktivitas makan ikan serta sosialisasi serta pengolahan ikan
  3. Pemberdayaan UMKM melalui pengembangan KKMB
  4. Pengembangan dan Pemantapan Kemitraan dalam Minapolitan industri hasil perikanan
  5. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Tani Nelayan, KUB,koperasi lembaga perekonomian pengolahn hasil perikanan
  6. Pameran/Bazar tingkat provinsi dan nasional, gemar ikan,serta etalas pemasaran produk perikanan di Pekanbaru
  7. Revitalisasi pengolahan hasil perikanan (pasca panen) se Riau
  8. Pembinaan dan Lomba UMKM pengolahan hasil perikanan
  9. Pembangunan sarana dan pendukung sentra pengolahan
  10. Pengembangan industrialisasi ikan patin di Prov Riau
  11. Fasilitas Pengembangan Nilai Produk Perikanan
  12. Pengembangan dan pembinaan unit pengolahan
  13. Peningkatan kapasitas dan operasional LPPMHP prov Riau
  14. Peningkatan sarana dan Prasarana pasar ikan higinis
  15. Bimbingan Teknis bagi petugas LPPMHP
  16. Pengadaan sarana dan prasarana Laboratorium
  17. Bimbingan dan akreditasi LPMHP
  18. Pembuatan dan penyanggahan audio visual iklan layanan masyarakat (tingkat konsumsi ikan keluarga) pada media TV online
  19. Lomba dan Penilaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan UMKM terbaik di Provinsi Riau
  20. Pengusulan Akreditasi LPPMHP
  21. Pengembangan Kelembagaan KKMB
  22. Fasilitasi dan Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelayakan (SKP) dan UMKM
  23. Pameran Bazar Kegiatan Strategis Perikanan dan Kelautan Tingkat Provinsi dan Nasional
  24. Peningkatan sarana dan Prasarana Produk Pengolahan Perikanan
  25. Bimtek Perhitungan Angka Konsumsi Ikan
  26. Pengembangan Nilai Produk Pengolahan Hasil Perikanan

- 
27. Industrialisasi Pengolahan Hasil Perikanan
  28. Pengembangan sarana dan prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan Hasil Perikanan
  29. Pendampingan Usaha UMKM Pengolahan Hasil Perikanan Dengan Pengusaha Perikanan
  30. Monev Kelembagaan UMKM Pengolahan Hasil Perikanan
  31. Bimtek Eksportir Pengolahan Hasil Perikanan
  32. Pembinaan Produk Perikanan Non Konsumsi Provinsi Riau
  33. Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan
  34. Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
  35. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan
  36. Pengujian Mutu Hasil Perikanan
  37. Peningkatan Pelayanan UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan

#### **IV. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERIKANAN DAN KELAUTAN**

1. Dukungan penyelenggaran Pendidikan SUPM Internasional Provinsi
2. Makan dan minum harian siswa SUPM Internasional Dumai
3. Peningkatan sarana dan prasarana SUPM Internasional Dumai
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan Perikanan
5. Dukungan Pengembangan UPT Pelatihan Perikanan
6. Pelatihan Hama Penyakit Ikan Air Tawar
7. Dukungan Pengembangan Instalasi Air Tawar Pada Air Tawar
8. Pelatihan Budidaya Air Payau dan Air Tawar Pada UPT Pelatihan
9. Pelatihan Budidaya Air Payau Untuk Insruktur pada UPT Pelatihan
10. Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
11. Pelatihan Pembenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar
12. Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT Riset dan pendidikan perikanan dan Kelautan
13. Dukungan Pelaksanaan Teknis Riset Perikanan dan Kelautan
14. Peningkatan Kapasitas Dan Operasional Komisi Penyuluhan Perikanan dan Kelautan
15. Monev Hasil Pembangunan SDM Perikanan dan Kelautan
16. Pelatihan Penerapan Teknologi Pengendalian Penyakit Ikan
17. Pelatihan Basic safety Training
18. Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan

#### **V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- 
1. Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove
  2. Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove
  3. Identifikasi Potensi Pencadangan KKPD (Kawasan Konservasi Perairan Daerah)
  4. Rehabilitasi Kawasan ekosistem Mangrove di Pesisir
  5. Analisa Usaha Perikanan Tangkap Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir
  6. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha
  7. Penyusunan dokumen KKLD
  8. Perlindungan dan Perkayaan Sumberdaya ikan perairan
  9. Identifikasi kawasan lubuk larangan/ikan larangan
  10. Rehabilitasi kawasan mangrove di kawasan pesisir
  11. Analisis Faktor pembangunan dan pengembangan perikanan Provinsi Riau
  12. Kajian Potensi ikan patin, tapah dan selais
  13. Kajian Kebijakan Pengembangan ekonomi berbasis usaha perikanan tangkap dan strategi pemberdayaan nelayan dalam konteks sumberdaya daya pesisir secara terpadu
  14. Sosialisasi Pergub 78 Tahun 2012 Tentang Penetapan Suaka Ikan Terubuk
  15. Perlindungan dan Perkayaan sumberdaya ikan
  16. Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Konservasi
  17. Pengelolaan Kawasan Konservasi Ikan Terubuk
  18. Penyusunan Pecadangan Kawasan Konservasi
  19. Supervisi Statistik dan PUSDATIN Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau
  20. Updating data Spasial Wilayah Pesisir dan Laut
  21. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Skala Kecil
  22. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan kapal pengawas
  23. Gelar Operasi Pengawasan Terpadu dan serta Penilai Lomba
  24. Pengadaan Speed Boad Pengawasn
  25. Pengadaan Peralatan dan perlengkapan pengawas
  26. Pengadaan kendaraan operasional Bid pengawas dan kelautan
  27. Pengadaan bahan harian kedai masyarakat pesisir

- 
28. Pengadaan peralatan penunjang Sistem Informasi Geografis Wilayah Pesisir

## **VI. PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA LAUT**

1. Pembinaan dan Pemberdayaan Serta Penilaian Pokmaswas
2. Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu
3. Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Kapal Pengawas
4. Pengadaan Speed Boad Pengawasn
5. Pelaksanaan Hari Nusantara
6. Pembangunan Pos Pengawas
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK)
8. Pembangunan Speed Boat Pengawas dan Perlengkapan Pokmaswas (DAK)
9. Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan Perikanan Wilayah I
10. Pengawasan dan Penegakan Hukum Terpadu Wilayah I
11. Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan Perikanan Wilayah II
12. Pengawasan dan Penegakan Hukum Terpadu Wilayah II
13. Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan Perikanan Wilayah III
14. Pengawasan dan Penegakan Hukum Terpadu Wilayah III

## **VII. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN**

1. Peningkatan Sumberdaya Manusia Penyuluh dan Pendamping Kelautan dan Perikanan

## **VIII. PROGRAM TATA RUANG**

1. Penyusunan Zonasi Wilayah Pesisir Pesisir Provinsi Riau

Adapun rencana besaran pendanaan pada setiap program dan kegiatan dicantumkan pada **Tabel 6.1 (T-C 27)**.

**Tabel 6.1. (Tabel T.C-27)  
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Kelautan Dan Perikanan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2014		2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp (Juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan pelayanan administrasi pembangunan perikanan dan kelautan	Pelayanan administrasi pembangunan perikanan dan kelautan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Baik																	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim		12 Bulan	20	12 Bulan	22	12 Bulan	30	12 Bulan	35	12 Bulan	35	12 Bulan	35	12 Bulan	35	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang Waktu Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik		12 Bulan	425	12 Bulan	467	12 Bulan	525	12 Bulan	550	12 Bulan	575	12 Bulan	575	12 Bulan	575	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang Waktu Penyediaan jasa Kebersihan Kantor		12 Bulan	160	12 Bulan	176	12 Bulan	225	12 Bulan	250	12 Bulan	275	12 Bulan	275	12 Bulan	275	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau

			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor		12 Bulan	110	12 Bulan	121	12 Bulan	100	12 Bulan	150	12 Bulan	175	12 Bulan	175	12 Bulan	175	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Rentang waktu Penyediaan Barang dan Penggandaan		12000 lembar	50	12000 lembar	55	12000 lembar	150	12000 lembar	175	12000 lembar	180	12000 lembar	180	12000 lembar	180	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan		40 paket	25	40 paket	28	40 paket	55	40 paket	60	40 paket	65	40 paket	65	40 paket	65	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		8 unit	300	8 unit	330	8 unit	575	8 unit	600	8 unit	650	8 unit	650	8 unit	650	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rentang Waktu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 Bulan	26,6	12 Bulan	29	12 Bulan	55	12 Bulan	60	12 Bulan	65	12 Bulan	65	12 Bulan	65	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		362 orang	50	370 orang	55	380 orang	75	390 orang	80	400 orang	85	400 orang	85	400 orang	85	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekwensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		51 kali	594	60 kali	654	65 kali	500	70 kali	550	75 kali	600	75 kali	600	75 kali	600	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor		12 Bulan	130	12 Bulan	143	12 Bulan	200	12 Bulan	220	12 Bulan	250	12 Bulan	250	12 Bulan	250	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau

			Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Rentang Waktu Layanan Informasi Kegiatan Pembangunan Perikanan		2 kali	396	2 kali	436	2 kali	420	2 kali	450	2 kali	500	2 kali	500	2 kali	500	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
Meningkatkan pelayanan administrasi pembangunan perikanan dan kelautan	Pelayanan administrasi pembangunan perikanan dan kelautan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur yang sesuai dengan Standar Kerja																	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia		6 unit	485	6 unit	534	6 unit	587	6 unit	646	6 unit	711	6 unit	711	6 unit	711	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Peralatan yang di Pelihara		12 Bulan	190	12 Bulan	209	12 Bulan	175	12 Bulan	200	12 Bulan	225	12 Bulan	225	12 Bulan	225	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara		12 Bulan	75	12 Bulan	83	12 Bulan	91	12 Bulan	100	12 Bulan	110	12 Bulan	110	12 Bulan	110	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Beroperasi yang diperihara		11 unit	136	12 unit	149	12 unit	125	12 unit	150	12 unit	175	12 unit	175	12 unit	175	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara		219 unit	62	219 unit	68	219 unit	125	219 unit	150	219 unit	175	219 unit	175	219 unit	175	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
Meningkatkan pelayanan administrasi pembangunan	Peningkatan pelayanan administrasi pembangunan		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Meningkatnya Kualitas dan Disiplin Aparatur																	

			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah ASN yang memperoleh pakaian khusus hari-hari tertentu	10 unit	68	10 unit	75	10 unit	82	10 unit	91	10 unit	100	10 unit	100	10 unit	100	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Rentang waktu pembinaan fisik dan Mental Aparatur yang dilaksanakan	12 Bulan	75	12 Bulan	83	12 Bulan	91	12 Bulan	100	12 Bulan	110	12 Bulan	110	12 Bulan	110	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
<b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Meningkatnya Kualitasa Sumberdaya Aparatur Sipil Negara</b>																
			Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Paket	700	1 Paket	950	1 Paket	950	1 Paket	950	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau						
			Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD	Jumlah Dokumen Yang dihasilkan	1 Paket	150	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau												
<b>Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan</b>																
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	6 dokumen	40	6 dokumen	40	6 dokumen	40	6 dokumen	45	7 dokumen	40	7 dokumen	45	7 dokumen	45	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah pelaporan	20 laporan	70	20 laporan	70	20 laporan	70	20 laporan	75	21 laporan	70	21 laporan	75	21 laporan	75	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau

		Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi		1 dokumen	118	-	118	-	118	1 dokumen	-	-	118	1 dokumen	-	1 dokumen	-	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
		Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Jumlah laporan (dokumen)		12 kab/kota	262	12 kab/kota	262	12 kab/kota	262	12 kab/kota	265	12 kab/kota	262	12 kab/kota	265	12 kab/kota	265	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi (Dokumen dan Frekuensi Monev)		12 kab/kota	82	12 kab/kota	82	12 kab/kota	82	12 kab/kota	100	12 kab/kota	82	12 kab/kota	100	12 kab/kota	100	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
		Audiovisual Dokumenter Pembangunan	Jumlah Dokumen Audiovisual		-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	150	2 dokumen	-	2 dokumen	151	2 dokumen	151	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
		Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah Dokumen Yang dihasilkan		1 dokumen	118	-	118	-	118	1 dokumen	-	-	118	1 dokumen	-	1 dokumen	-	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
		Supervisi dan statistik	Jumlah Parameter		-	-	12 kab/kota	-	12 kab/kota	-	12 kab/kota	200	12 kab/kota	-	12 kab/kota	201	12 kab/kota	201	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
		Penyediaan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan (orang)		20 laporan	70	20 laporan	70	20 laporan	70	20 laporan	75	21 laporan	70	21 laporan	75	21 laporan	75	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
<b>Meningkatnya Produksi Perikanan yang berkelanjutan</b>	<b>Meningkat Produksi Perikanan</b>	<b>Pengembangan Budaya perikanan</b>	<b>Jumlah Produksi (ton)</b>	<b>86.451,79</b>															Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
					<b>86.451,79</b>	<b>6.274</b>	<b>89,10</b>	<b>18.633,00</b>	<b>100.787,52</b>	<b>18.350</b>	<b>111.762,02</b>	<b>15.640,71</b>	<b>125.173,47</b>	<b>1829,52</b>	<b>136</b>	<b>1829,52</b>	<b>136</b>	<b>1829,52</b>		

			Pembangunan Keramba Tanjap KJA Galvanis dan Keramba Tancap	Jumlah Keramba Tanjap	Keramba 12 Kantong	Keramba 12 Kantong	554										Keramba 12 Kantong	554	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengadaan Mesin Pakan Ikan Skala Rumah Tangga dan Pengadaan Bahan Baku Pakan Lokal	Jumlah Mesin Pakan	6 Unit/6 Kelompok	6 Unit/6 Kelompok	358	1 Unit	350								7 Unit	350	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Kelompok yang di Bina	30 Kelompok	30 Kelompok	435	24 kelompok	567				20 Orang (Kab.Kuansing, Kampar dan Pelalawan)	94			104	94	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Revitalisasi Kawasan Budidaya air laut,air payau dan tawar	Jumlah Sarana yang Direvitalisasi	Hatchri mini 1 unit	Hatchri mini 1 unit	1018				Hatchri mini 1 unit	782					3	782	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembangunan kolam terpal dalam mendukung pengembangan kolam rakyat	Jumlah Kolam Terpal Yang di Bangun	110 unit	110 unit	11												Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan UPP se Riau	Jumlah UPP yang dibina	12 UPP	12 UPP	69		12 UPP	279							36 UPP	279	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pekan Promosi/Pameran/Seminar/Expo Teknologi Perikanan Bdudaya Tingkat Nasiona	Jumlah Pameran yang di Laksanakan	1 kali	1 kali	250	2 Kali	439	1 kali	375						5 Kali	375	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembangunan sarana dan prasaran mendukung kawasan mina politan	Jumlah sarana dan prasaran	1 Unit	1 Unit	225										2 Unit	225	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau

		Sosialisasi pembinaan dan penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) se Riau	Jumlah Pembudidaya yang disosialisasi Sistem CBIB di kab/kota	24 orang dan 100 pembudidaya	24 orang dan 100 pembudidaya	320	24 orang dan 100 pembudidaya	319	24 UPR dan BBI	219						96 Orang 300 Pembudidaya	219	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
		Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah bibit ikan unggul yang di produksi	10000 ekor	10000 ekor	500	10000 ekor	597	10000 ekor	295	10000 ekor	196	25000 Ekor Benih	350	1.166.250 Ekor	1148	1166325 ekor	350	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
		Pengadaan sarana dan Fasilitas pada stasiun pembinaan dan pengembangan BBAT di Sentra Produksi Koto Panjang	Jumlah sarana dan prasarana BBAT di Sentra Produksi Koto Panjang	1 Unit	1 Unit	341										2 Unit	341	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
		Workshop Teknis Pembenihan Air Tawar	Jumlah Pelaku Utama Perikanan	30 orang	30 orang	32			30 Orang	192						30 Orang	192	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
		Dukungan Operasional UPT Pembenihan	Rentang Waktu Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	1200										12 Bulan	1200	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
		Pengadaan Benih Ikan	Jumlah Benih Ikan	32 Ekor	32 Ekor	141										64 Ekor	141	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
		Pengadaan bibit dan pakan ikan masyarakat	Jumlah Bibit dan Pakan yang di berikanan	173.000 ekor dan 34.100 Kg	173.000 ekor dan 34.100 Kg	940										346000 ekor dan 68200 Kg	944	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
		Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembenihan Ikan	Jumlah Pelaku Utam Pembenihan	12 Orang	12 Orang	300										24 orang	300	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	

			Pembangunan Mess Pelatihan Pembenihan	Jumlah sarana yang di Bangun	2 Unit	2 Unit	562	1 Unit	30							5 unit	562	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembangunan Kolam Rakyat	Jumlah Kolam Rakyat Yang di Bangun	5 Unit	5 Unit	461									10 unit	461	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembangunan jalan/jembatan di sentra produksi perikanan	Jumlah Sarana sentra produksi yang dibangun	0 Paket Jalan	1 Paket Jalan	200									1 Paket Jalan	200	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengadaan peralatan pembibitan ikan air tawar	Jumlah Alat Pembibitan yang di sediakan	2 Kelompok	2 Kelompok	368									2 Kelompok	368	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengadaan induk ikan langka	Jumlah Induk Ikan Langka	7 Jenis	7 Jenis	200	7 Jenis	498							7 Jenis	200	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Peningkatan sarana dan Prasarana UPT Pembenihan ikan	Jumlah Sarana dan Prasarana	4 Unit	4 Unit	651	4 Unit	800	2 Unit	1345	5 Unit	501			15 Unit	501	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembangunan Kolam Rakyat untuk mendukung rumah layak huni	Jumlah Kolam yang di Bangun di Rumah Layak Huni	0 kolam	1650 kolam	4407									1650 kolam	4407	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembangunan kolam terpal dalam mendukung pengembangan kolam rakyat	Jumlah Kolam Terpal Yang di Bangun	25 unit	25 unit	518									50 unit	518	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau

			Dukungan Operasional UPT Pembenihan	Rentang Waktu Pelayanan	12 Bulan		12 Bulan	294	12 Bulan	1500						12 Bulan	1500	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembuatan Perencanaan DED Bangunan di BBIS sei Tibun	Jumlah Dokumen Perencanaan	0 Dokumen		1 Dokumen	370								1 Dokumen	370	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Peningkatan operasional eskavator Untuk Perikanan Budidaya	Rentang Waktu Pelayanan	12 bulan		12 bulan	54	12 bulan	294						12 bulan	294	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengembangan Data Produksi Potensi Perikanan Budidaya	Jumlah Variabel Data yang Dianalisis	1 Dokumen				1 Dokumen	350	1 dokumen	181				1 dokumen	531		se Provinsi Riau
			Fungsionalisasi Sekretariat, Sosialisasi, Pembinaan, sertifikat dan Surveilans CBIB	Rentang Waktu Pelayanan	24 orang dan 100 pembudidaya				24 orang dan 100 pembudidaya	859	24 orang dan 100 pembudidaya	22				72 orang dan 300 pembudidaya	859	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Optimalisasi Stasiun Pembinaan dan Pengembangan kawasan minapolitan	Jumlah Variabel Stasiun yang Dianalisis	30 kantong KJA				30 kantong KJA	182	30 kantong KJA	229				60 kantong KJA	182	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembangunan Mess Pelatihan Pembenihan Tahap II	Jumlah sarana yang di Bangun	1 unit				1 unit	30	1 unit (150 m2)	586				2 unit	586	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Peningkatan Sistem dan cara pengelolaan laboratorium UPT Pembenihan	Rentang Waktu Pelayanan	2 Orang				12 orang	200	12 Bulan	153	12 Unit	170		12 Unit	170	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau

			Monitoring dan Evaluasi Unit Pembenihan	Frekwensi Monitoring	12 Kab/Kota			12 Kali	200	12 Kali	195					12 Kali	195	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau		
			Pembangunan Rehab Saluran Air Masuk di Denpond	Jumlah Sarana saluran air yang dibangun	1 Unit			1 Unit	400							1 Unit	400	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau		
			Pengembangan Data Pembenihan Se Provinsi Riau	Jumlah Variabel Data yang Dianalisis	1 Dokumen			1 Dokumen	200	1 Laporan	208					1 Laporan	208	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau		
			Pengadaan Keramba Jaring Apung	Jumlah sarana perikanan budidaya	0			22 Kantong, 16 5000 ekor, 22000 kg Pakan	2180							22 Kantong, 16 5000 ekor, 22000 kg Pakan	2180	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau		
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan Provinsi Riau (DAK 2015)	Jumlah Sarana dan pembenihan yang dibangun (DAK)	0			16 Paket Budidaya	8943							16 Paket Budidaya	8943	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau		
			Pembenihan ikan langka yang memiliki ekonomis tinggi	Jumlah Benih Jenis Ikan Langka						3 Jenis	351	4 Jenis	1721			4 Jenis	1721	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau		
			Pengembangan teknologi anjuran Perikanan Budidaya	Jumlah Pokdakan yang menerapkan teknologi anjuran						30 sertifikat	543	40 sertifikat	427	40 Sertifikat dan 10 Auditor	188	50 Sertifikat	200	50 Sertifikat	200	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengembangan Sistem Mutu Pakan dan Pengawasan Peredaran Pakan/Bahan Baku Pakan	Jumlah Peserta yang Dilatih						20 Orang	184					20 Orang	184	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau		

			Pembinaan Pembudidaya Ikan Hias	Jumlah Peserta yang Dilatih					30 Orang	117							30 Orang	117	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Penerima PUPM PB	Jumlah Binaan Jenis Dan Pengembangan					150 Pokdakan	460	172 Pokdakan	230					172 Pokdakan	230	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembinaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pokdakan yang menerapkan teknologi anjuran					40 Pokdakan dan 6 Jenis Penyakit Ikan	353	40 Pokdakan dan 6 Jenis Penyakit Ikan	500			40 Pokdakan dan 6 Jenis Penyakit Ikan	151	160 Pokdakan dan 6 Jenis Penyakit Ikan	151	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengembangan Kapasitas Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Beserta Peralatannya	Jumlah Sarana Laboratorium yang di Buat					2 Unit	237							2 Unit	237	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Teknik Aplikasi terhadap Pembenihan Ikan Air Tawar	Jumlah Pelatihan					25 Orang	168							25 Orang	168	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kinerja UPTD Se Provinsi Riau	Jumlah UPTD yang di Latih					12 UPTD	366	12 UPTD	400					12 UPTD	400	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembenihan Ikan	Jumlah Peserta Binaan					18 Orang	174	10 orang	291					28 orang	291	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Masterplan Pengembangan Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau	Jumlah Dokumen yang dihasilkan					1 unit peta digital dan 1 dokumen	1046							1 unit peta digital dan 1 dokumen	1046	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau

			Monitoring dan Evaluasi Budidaya Perikanan	Frekwensi Monitoring					12 Kali	235	12 Kali	242					12 Kali	242	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pembenihan	Rentang Waktu Pelayanan					12 Bulan	1.315	12 Bulan	1450					12 Bulan	1450	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan (DAK)	Jumlah sarana yang di adakan							8 paket	1900					8 paket	1900	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengelolaan Perizinan Perikanan di Provinsi Riau	Jumlah Rekomendasi Perizinan di Keluarkan							12 kab/kota	368					12 kab/kota	368	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Hibah Tahun 2018	Jumlah Kelompok yang di Verifikasi							6 Kelompok	150					6 Kelompok	150	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengembangan sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun					1 paket	3,9	1 paket	9087	25 Paket (Rumah Jaga, Petakan Tambak)	5900	420000 Ekor, 9500 Kg, 10 Unit	1100	420000 Ekor, 9500 Kg, 10 Unit	1100	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Budidaya Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembenihan Air Payau									2 Paket (Peralatan Perlengkapan Kantor dan Alat-alat pengolahan pertanian dan Peternakan )	1778			2 Paket (Peralatan Perlengkapan Kantor dan Alat-alat pengolahan pertanian dan Peternakan )	1778	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau

			Peningkatan Pelayanan UPT Budidaya Perikanan	Rentang Waktu Pelayanan											12 Bulan	769	12 Bulan	769	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Budidaya Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembenuhan Air Payau											6 Unit	5462	6 Unit	5462	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Pengembangan Bibit Unggul	Jumlah Ketersediaan Benih Kakap Putih, Benur Udang, Calon Induk Kakap Putih							1.000 ekor calon induk	196			1166250 ekor	1148	1166250 ekor	1148	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Penyusunan Database Perikanan Budidaya	Jumlah Variabel Data yang Dianalisis					1 dokumen	286							1 dokumen	286	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Revitalisasi Kawasan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau	Jumlah Kelompok			3 Kelompok	1000									3 Kelompok	1000	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Pemulihan Potensi Sumberdaya Perikanan di Danau Larangan	Jumlah Lokasi			3 Lokasi	500									3 Lokasi	500	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
Meningkatnya Produksi Perikanan yang berkelanjutan	Meningkatnya Produksi Perikanan		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Hasil Tangkapan (Ton)	130.000	130.000	1.500	131.615	1.800	132931	2.000,00	134.261	2.454,01	135.603	4209,58	136.000	2719,61	136000	9383,19	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap	Jumlah Rekomendasi Perizinan	215 izin	70	300	70 izin	350	70 izin	244	70 izin	474	50 izin dan 30 Unit Kapal yang Terfasilitasi Dokumentasinya	281	70 izin	280	515 izin	280	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau

			Pertemuan FKPPS regional dan Pertemuan koordinasi Loog Book	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	200										2 Dokumen	200	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Bimbingan Teknis Manajemen Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok yang di latih	20 Orang	20 Orang	200										20 Orang	200	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Apresiasi Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok	<b>4 Kemitraan</b>	<b>4 Kemitraan</b>	<b>200</b>	<b>20 Orang</b>	<b>250</b>								<b>4 Kemitraan</b>	<b>200</b>	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak	Rentang Waktu Pelayanan	12 bulan	12 bulan	805	2 Paket	700	1 Kegiatan	1182	12 Bulan	373	12 bulan	184	12 bulan	239	12 bulan	239	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi pendaftaran dan penandaan kapal perikanan di Kab/Kota, serta tersusunnya basis data penandaan dan pendaftaran kapal perikanan (Kapal Penangkap Ikan yang Memiliki Buku Kapal Perikanan)	72 Unit Kapal	72 Unit Kapal	250	10 kapal	300	10 kapal	220						82 Unit	220	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	

			Sertifikasi ANKAPIN III/Atkapin III Bagi Nelayan Penerima INKAMINA di Provinsi Riau	Jumlah Pendidikan dan Latihan BST ( Basic Safety Training) dan Ahli Nautica/ANKA PIN III bagi Nelayan Perikanan Tangkap (Nelayan)	10 Orang	10 Orang	400		30 orang	396						30 orang	396	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Pembinaan dan Operasional Forum KUB Perikanan Tangkap	JUmlah Forum KUB dan nelayan yang Mandiri dan berkualitas secara Teknis (Forum KUB Perikanan Tangkap)	10 Forum KUB	10 Forum KUB	150	20 KUB	250	8 KUB	188	12 KUB	200		12 KUB	53	62 KUB	250	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Sosialisasi dan Penyusunan WKOPP Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak	Jumlah Sosialisasi dan penyusunan WKOPP	20 orang	20 orang	200			20 Orang	133					20 Orang	133	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan	1 Pelabuhan		1 pelabuhan	857	1 pelabuhan	581					1 pelabuhan	581	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Pengadaan Alat Tangkap Ikan	Jumlah Kapal dan Alat Tangkap Ikan untuk Masyarakat Nelayan (Nelayan)	6 paket Alat Tangkap	6 paket Alat Tangkap	440									6 paket Alat Tangkap	440	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Pengadaan mesin tarik untuk kelompok ikan	Jumlah sarana kelompok	1 Unit	1 Unit	110									1 Unit	110	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	

			Pembangunan kapal ikan > 30 GT dan alat penangkapan ikan (DAK)	Jumlah Kapal	6 Unit	6 Unit	10577									6 Unit	10577	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengelolaan Sumberdaya di Teritorial	Jumlah Kawasan yang di kelola			26 Orang	750										Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pemulihan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum Daratan	Jumlah Populasi Ikan yang diTebarakan diperairan Umum Daratan			125000 ekor	500	125000 ekor	413	1.185	906		74000 Ekor Benih Ikan Baung	128	200000 ekor	500	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Bimtek Manajemen Usaha Perikanan Tangkap	Frekwensi Bimtek					24 orang	149						24 orang	149	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembinaan KUB Penerima Kapal INKAMINA Se Provinsi Riau	Jumlah Binaa Jenis Kub Penerima					6 kab/kota	162						6 kab/kota	162	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Investasi Permodalan Perikanan Tangkap	Jumlah Gemba Jenis Usaha Perikanan					20 orang	182	150 orang	463				170 orang	463	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu	Jumlah Binaa Jenis Dan Pengembangan					4 kawasan	222						4 kawasan	222	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengelolaan Perairan Teritorial di WPP	Jumlah Dokumen					2 WPP 2 Laporan	506	2 WPP dan Laporan	294	2 WPP dan Laporan	150		2 WPP dan Laporan	150	Dinas kelautan dan Perikanan	se Provinsi Riau

																				Provinsi Riau	
			Penilaian Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap	Frekwensi Penilaian						25%	171							25%	171	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Penataan dan Inventarisasi Kuota Penangkapan dan Alat Tangkap Ikan di Provinsi Riau	Jumlah Variabel Data yang Dianalisis						10 variabel data	277							10 variabel data	277	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengadaan Kapal dan Alat Tangkap	Jumla Kapal dan Alat Tangkap									79 Unit	10379	23 Unit dan 320 Piece/Bal	1886	23 Unit dan 320 Piece/Bal	1886	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Percepatan Kartu Nelayan	Jumlah Kartu Nelayan									4600 Orang Nelayan	339			4600 Orang Nelayan	339	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Diseminasi Asuransi Nelayan	Jumlah Asuransi yang diterbitkan											100 Orang	100	100 Orang	100	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
Meningkatnya Daya Sing Produk Pengolahan	Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan Kg/Kapita/Tahun		Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1.)Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Akses pemasaran.2 ).Nilai Ekspor Produk Perikanan	Kelompok: 2 Nilai Ekpor (US\$):8.50 0.000	Kelompok: 2 Nilai Ekpor (US\$):8.50 0.000	2400	Kelompok: 3 Nilai Ekpor (US\$):8.60 0.000	2500	Kelompok: 4 Nilai Ekpor (US\$):8.70 0.000	2500	Kelompok: 5 Nilai Ekpor (US\$):8.50 0.000	2788,5	Kelompok: 10 Nilai Ekpor (US\$):8.80 0.000	3003,9	Kelompok: 15 Nilai Ekpor (US\$):8.90 0.000	8881,76	Kelompok: 15 Nilai Ekpor (US\$):8.90 0.000	8881,76	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur pemasaran hasil perikanan	Jumlah sarana dan prasarana	130 Unit	130 Unit	199	333 Unit	397								463 Unit	397	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	

			Pengembangan menu ikan,kampanye makan ikan dan aktivitas makan ikan serta sosialisasi serta pengolahan ikan	Jumlah peserta Sosialisasi	50 orang	50 orang	487	500 orang	384							1500 orang	384	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pemberdayaan UMKM melalui pengembangan KKMB	Jumlah sarana yang di Berdaya	12 KKMB	12 KKMB	125									12 KKMB	125	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengembangan dan Pemantapan Kemitraan dalam Minapolitan industri hasil perikanan	Jumlah Pendampingan Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	3025									12 Kelompok	3025	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Tani Nelayan, KUB,koperasi lembaga perekonomian pengolahan hasil perikanan	Jumlah Kelompok Binaan Jenis Dan Pengembangan	12 Kelompok	12 Kelompok	75									12 Kelompok	75	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pameran/Bazar tingkat provinsi dan nasional, gemar ikan,serta etalas pemasaran produk perikanan di Pekanbaru	Jumlah Bazar yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	300	4 kali	388	6 Kali	595	4 kali	500			4 kali	500	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Revitalisasi pengolahan hasil perikanan (pasca panen) se Riau	Jumlah pengolahan hasil yang dibangun (pasca panen) se Riau)	30 Orang	30 Orang	176									30 Orang	176	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembinaan dan Lomba UMKM pengolahan hasil perikanan	Jumlah Sarana lomba umkm yang dibangun	12 UMKM	12 UMKM	193			12 UMKM	163					12 UMKM	163	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau

			Pembangunan sarana dan pendukung sentra pengolahan	Jumlah Variabel sarana yang Dianalisis	2 Unit	2 Unit	182	2 Paket	357	24 unit	189						24 unit	189	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengembangan industrialisasi ikan patin di Prov Riau	Jumlah Sarana ikan patin yang dibangun	30 Orang	30 Orang	122										30 Orang	122	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Fasilitas Pengembangan Nilai Produk Perikanan	Jumlah sarana yang di lilitas	41 Orang	41 Orang	122										41 Orang	122	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengembangan dam pembinaan unit pengolahan	Jumlah sarana yang di adakan	8 paket	8 paket	114										8 paket	114	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Peningkatan kapasitas dan operasional LPPMHP prov Riau	Jumlah Pengujian Sampel	12 Bulan	12 Bulan	400	12 Bulan	250			12 Bulan	483				12 Bulan	483	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Peningkatan sarana dan Prasarana pasar ikan higinis	Rentang Waktu Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	434	12 Bulan	115								12 Bulan	115	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Bimbingan Teknis bagi petugas LPPMHP	Frekwensi Bimbingan	40 Orang	40 Orang	200			52 Orang	256						52 Orang	256	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengadaan sarana dan prasarana Laboratorium	Jumlah Pengadaan	0	12 Unit	300			11 Unit	1566						23 Unit	1566	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau

			Bimbingan dan akreditasi LPMHP	Jumlah Dokumen Akreditasi	1 Dokumen	1 Dokumen	200	1 Dokumen	300								1 Dokumen	300	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembuatan dan penayangan audio visual iklan layanan masyarakat (tingkat konsumsi ikan keluarga) pada media TV online	Jumlah dan penayangan yang dibangun (tingkat konsumsi ikan keluarga) pada media TV online)	8 Kali	8 Kali	150										8 Kali	150	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Lomba dan Penilaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan UMKM terbaik di Provinsi Riau	Jumlah dan Penilaian pengolahan ikan (UPI) dan UMKM yang dibangun (UPI) dan UMKM terbaik di Provinsi Riau)			12 UMKM	350	UMKM Kab/Kota	262	3 pemenang UMKM	270	12 UMKM	89	36 UMKM	200	36 UMKM	200	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengusulan Akreditasi LPPMHP	Rentang Waktu Pelayanan			1 Dokumen	200									1 Dokumen	200	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengembangan Kelembagaan KKMB	Jumlah Kelembagaan KKMB			30 KKMB	75	KKBM 12 Kb/Kota	176							KKBM 12 Kb/Kota	176	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Fasilitasi dan Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelayakan (SKP) dan UMKM	Jumlah dan Pelayanan pertifikat yang dibangun (SKP) dan UMKM)			12 Usulan	140	UMKM Kab/Kota	167	3 pelaku usaha	200	5 Usulan Sertifikat	140	36 Usulan Sertifikat	121	12 Usulan	140	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau

			Pameran Bazar Kegiatan Strategis Perikanan dan Kelautan Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Bazar yang dilaksanakan				4 kali	350	6 kali	595						3 Kali (Pekanbaru, Surabaya, Batam)	385			13 kali	385	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Peningkatan sarana dan Prasarana Produk Pengolahan Perikanan	Jumlah Sarana Dan Prasarana						12 unit	126										12 unit	126	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Bimtek Perhitungan Angka Konsumsi Ikan	Frekwensi Bimtek						12 orang	159										12 orang	159	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengembangan Nilai Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Orang yang di Latih						100 Ekps	210	50 eks/100 orang	350	60 Orang	71						60 Orang	71	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Industrialisasi Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Jenis Pengolahan Hasil						100 orang	248										100 orang	248	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengembangan sarana dan prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Gempa Jenis Sarana Dan						75 orang	203			12 Unit	1089	5 Unit (Freezer)	122				5 Unit (Freezer)	122	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pendampingan Usaha UMKM Pengolahan Hasil Perikanan Dengan Pengusaha Perikanan	Jumlah Dampi Jenis Usaha Umkm						3 akses pemasaran	137	3 akses pemasaran	200								3 akses pemasaran	200	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau

			Monev Kelembagaan UMKM Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Kelembagaan UMKM						12 UMKM	169							12 UMKM	169	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Bimtek Eksportir Pengolahan Hasil Perikanan	Frekwensi Bimtek						25 Orang	169							25 Orang	169	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembinaan Produk Perikanan Non Konsumsi Provinsi Riau	Jumlah Binaa Jenis Produk Perikanan						24 orang	138			25 Orang	24			25 Orang	24	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Inovasi Menu Serba Ikan (menu)						36 Menu	468	40 menu	725	36 Menu	242	36 Menu	200	36 Menu	200	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Jumlah Sosialisasi Gemarikan (kali)						600 orang	114	400 orang	209	4 Kali	384	8 Pembinaan Gemarikan	285	8 Pembinaan Gemarikan	285	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Binaa Jenis Dan Pengawasan								12 UPI (UMKM)	200	12 UPI (UMKM)	71			12 UPI (UMKM)	71	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah sarana yang di uji										Sertifikat Akreditasi 24 SDM	545			Sertifikat Akreditasi 24 SDM	545	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau

			Peningkatan Pelayanan UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Sarana UPT yang dibangun										6 Personel	196	12 personel	425	12 personel	425	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			<b>Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan dan Kelautan</b>	<b>Peningkatan Jumlah SDM Bidang Perikanan dan Kelautan yang Bersertifikat (CPIP dan CBIB)</b>	50																	
						50	3900	50	4000	50	4100	50	4190,8	50	1479,95	50	1479,95	150	7150,7	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Dukungan penyelenggaran Pendidikan SUPM Internasional Provinsi	Rentang Waktu Pelayanan	12 Bulan														12 Bulan	669	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Makan dan minum harian siswa SUPM Internasional Dumai	Jumlah Porsi Makan minum	12 Bulan														12 Bulan	494	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Peningkatan sarana dan prasarana SUPM Internasional Dumai	Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun	12 Bulan														12 Bulan	1064	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan Perikanan	Jumlah Jenis Sarana Dan	2 Unit																	
						2 Unit	575	4 unit	1.781	2 Unit	4485	2 Unit	2500	1 Unit	420				7 Unit	420	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Dukungan Pengembangan UPT Pelatihan Perikanan	Jumlah sarana	1 Paket														1 Paket	2000	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
						1 Paket	2000															

			Pelatihan Hama Penyakit Ikan Air Tawar	Jumlah Jenis Hama Penyakit	13 orang	13 orang	1000										13 orang	1000	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Dukungan Pengembangan Instalasi Air Tawar Pada Air Tawar	Rentang Waktu Pelayanan	1 paket	1 paket	185	1 paket	525								1 paket	525	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pelatihan Budidaya Air Payau dan Air Tawar Pada UPT Pelatihan	Jumlah Peserta yang Dilatih	40 orang	40 orang	200		12 orang	153	2 angkatan	400	35 Orang (7 Kab/Kota)	469			35 Orang	469	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pelatihan Budidaya Air Payau Untuk Insruktur pada UPT Pelatihan	Jumlah Peserta yang Dilatih	40 orang	40 orang	400		110 org	1101							150 org	1101	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Peserta yang Dilatih	15 orang	15 orang	170	25 orang	200	27 org	179						53 org	179	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pelatihan Pembenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar	Jumlah Peserta yang Dilatih	13 orang	13 orang	150	25 orang	200	50 org	315						88 org	315	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT Riset dan pendidikan perikanan dan Kelautan	Jumlah Sarana yang dibangun	1 paket	1 paket	450										1 paket	450	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Dukungan Pelaksanaan Teknis Riset Perikanan dan Kelautan	Rentang Waktu Pelayanan	12 bulan	12 bulan	300										12 bulan	300	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau

			Peningkatan Kapasitas Dan Operasional Komisi Penyuluhan Perikanan dan Kelautan	Rentang Waktu Pelayanan	12 bulan															Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Monev Hasil Pembangunan SDM Perikanan dan Kelautan	Frekwensi Monitoring		12 bulan	300	12 Bulan	150	1 tahun	220								1 tahun	220	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pelatihan Penerapan Teknologi Pengendalian Penyakit Ikan	Jumlah kelompok						25 org	161								25 org	161	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pelatihan Basic safety Training	Jumlah Peserta yang Dilatih						20 org	238								20 org	238	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan	Rentang Waktu Pelayanan						2 lokasi	1112	2 lokasi	1290	1 lokasi	560				3 lokasi	560	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
Terlaksananya Konservasi di Kawasan Perairan Daerah	Luas Kawasan Konservasi (Ha)		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dibina (Ha)	20 Lokasi 20 Ha	20 Lokasi 20 Ha	500	20 Lokasi 20 Ha	600	20 Lokasi 20 Ha	700	20 Lokasi 20 Ha	770	20 Lokasi 20 Ha	3300	40 Lokasi 20 Ha	3300	40 Lokasi 20 Ha	3300	3300	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Jumlah Kawasan yang di Rehabilitasi								1 Kabupaten (Kep. Meranti))	388						1 Kabupaten (Kep. Meranti))	388	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Jumlah Kawasan (Ha)										4 Kab/Kota (50 ha)	880	2	150	4 jenis	150		Dinas kelautan dan Perikanan	se Provinsi Riau

																				Provinsi Riau	
			Identifikasi Potensi Pencadangan KKPD (Kawasan Konservasi Perairan Daerah)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500											1 Dokumen	500	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Rehabilitasi Kawasan ekosistem Mangrove di Pesisir	Jumlah Kawasan (Ha)	2100/3 lokasi	2100/3 lokasi	300		3 lokasi	388								3 lokasi	388	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Analisa Usaha Perikanan Tangkap Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir	Jumlah Analisis	1 dokumen	1 dokumen	550											1 dokumen	550	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	Jumlah Kelompok yang di bina					16 Paket sarana pesisir, 30 cool box	3692								16 Paket sarana pesisir, 30 cool box	3692	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Penyusunan dokumen KKLD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500		1 dokumen	512								1 dokumen	512	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Perlindungan dan Perkayaan Sumberdaya ikan perairan	Jumlah Jenis Sumberdaya	130000 ekor	130000 ekor	300		130000 ekor	490								130000 ekor	490	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Identifikasi kawasan lubuk larangan/ikan larangan	Jumlah Kawasan Lubuk	3 Lokasi	3 Lokasi	300											3 Lokasi	300	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau

			Rehabilitasi kawasan mangrove di kawasan pesisir	Jumlah Kawasan Mangrove	3 Lokasi	3 Lokasi	300			1200 batang	453					1200 batang	453	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Analisis Faktor pembangunan dan pengembangan perikanan Provinsi Riau	Jumlah Kawasan	1 dokumen	1 dokumen	200									1 dokumen	200	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Kajian Potensi ikan patin, tapah dan selais	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	256									1 Dokumen	256	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Kajian Kebijakan Pengembangan ekonomi berbasis usaha perikanan tangkap dan strategi pemberdayaan nelayan dalam konteks sumberdaya daya pesisir secara terpadu	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	187									1 Dokumen	187	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			sosialisasi Pergub 78 Tahun 2012 Tentang Penetapan Suaka Ikan Terubuk	Jumlah Sosialisasi	35 orang	35 orang	150									35 orang	150	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Perlindungan dan Perkayaan sumberdaya ikan	Frekwensi Perlindungan						20 Orang	490					20 Orang	490	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Konservasi	Frekwensi Perlindungan						20 orang	461					20 orang	461	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengelolaan Kawasan Konservasi Ikan Terubuk	Jumlah orang di sosialisasi						40 Orang	356					40 Orang	356	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau

			Penyusunan Pecadangan Kawasan Konservasi	Jumlah luas kawasan konservasi							1 lokasi	284					1 lokasi	284	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Suervisi Statistik dan PUSDATIN Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau	Jumlah Variabel Data yang Dianalisis														10 variabel data	121	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Updating data Spasial Wilayah Pesisir dan Laut	Jumlah Dokumen														1 dokumen	500	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Peningkatan Ekonomi Masyarakat Skala Kecil	Jumlah Kelompok	4 unit genset, 1 kolam dan kelengkapannya	4 unit genset, 1 kolam dan kelengkapannya	650											4 unit genset, 1 kolam dan kelengkapannya	650	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan kapal pengawas	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 unit	1 unit	750											1 unit	750	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Gelar Operasi Pengawasan Terpadu dan serta Penilai Lomba	Jumlah operasi pengawasan	7 kelompok	7 kelompok	450											7 kelompok	450	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengadaan Speed Boad Pengawasn	Jumlah Sarana	4 unit	4 unit	700											4 unit	700	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau

			Pengadaan Peralatan dan perlengkapan pengawas	Jumlah Sarana	1 unit	1 unit	180										1 unit	180	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Pengadaan kendaraan operasional Bidang pengawas dan kelautan	Jumlah Sarana	1 unit	1 unit	380										1 unit	380	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Pengadaan bahan harian kedai masyarakat pesisir	Jumlah kedai	2 paket	2 paket	75										2 paket	75	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Pengadaan peralatan penunjang Sistem Informasi Geografis Wilayah Pesisir	Jumlah sarana	1 Paket	1 Paket	254										1 Paket	254	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
<b>Meningkatnya Potensi/Daya Dukung Perairan</b>	<b>Penegakan Hukum di bidang Kelautan dan Perikanan</b>		<b>Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut</b>	<b>Berkurangnya IUU Fsihing (Kasus)</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>1750</b>	<b>14</b>	<b>1700</b>	<b>12</b>	<b>1670,23</b>	<b>5</b>	<b>672,33</b>	<b>3</b>	<b>672,33</b>	<b>3</b>	<b>3014,89</b>	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pembinaan dan Pemberdayaan Serta Penilaian Pokmaswas	Jumlah Pokmaswas	143 klpk	0	0	12 kelompok	350	12 KUB	264	<b>12 KUB</b>	<b>328</b>	30 Kelompok (11 Kab/Kota)	<b>91</b>	12 Kelompok (4 Kab/Kota)	<b>54</b>	12 Kelompok (4 Kab/Kota)	<b>54</b>	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu	Jumlah operasi terpadu	14 kali	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 kali</b>	<b>450</b>	<b>7 kali</b>	<b>374</b>	<b>7 Kab/Kota</b>	<b>763</b>	7 Kab/Kota	<b>550</b>			7 Kab/Kota	<b>550</b>	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Jumlah kapal pengawas	1 unit	0	0	1 unit	600	<b>1 kapal</b>	<b>682</b>	<b>1 kapal</b>	<b>379</b>	3 Unit (Kota Dumai)	<b>604</b>			3 Unit (Kota Dumai)	<b>604</b>	Dinas kelautan dan Perikanan	se Provinsi Riau

																				Provinsi Riau			
			Pengadaan Speed Boad Pengawasn	Jumlah Speed Boat				1 unit	200										1 unit	200	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Pelaksanaan Hari Nusantara	Jumlah Partisipasi				20 orang	330	20 Orang	333								20 Orang	333	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Pembangunan Pos Pengawas	Jumlah Pos Pengawas						5 pos	540	2 Loksai	200						2 Loksai	200	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK)	Jumlah Sarana dan pengawasan Sumberdaya yang dibangun (DAK)								6 Unit	1311						6 Unit	1311	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Pembangunan Speed Boat Pengawas dan Perlengkapan PoKMASWA (DAK)	Jumlah Speed Boat pyang dibangun (DAK)										1 Paket (Pengadaaan SpeedBoad )	6195				1 Paket (Pengadaaan SpeedBoad )	6195	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau	
			Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan Perikanan Wilayah I	Rentang Waktu Pelayanan														12	270	12	270	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau
			Pengawasan dan Penegakan Hukum Terpadu Wilayah I	Jumlah operasi terpadu														7 Kali	438	7 Kali	438	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	se Provinsi Riau





---

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
**PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**TAHUN 2015-2019**

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Perikanan dan Kelautan
2. Penyerapan Tenaga Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan dan Kelautan
3. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Sub Sektor Perikanan (NTP-Pi)
4. Konsumsi Ikan di Provinsi Riau (Kg/Kap/Tahun)
5. Jumlah Nilai Ekspor Perikanan
6. Menurunnya IUU Fishing
7. Meningkatnya Kesadaran dan Penegakan Hukum (Pelaku Usaha yang Taat Hukum)
8. Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (ha)

Indikator kinerja utama Rencana Pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Riau Tahun 2014-2019 mengacu pada tujuan dan sasaran rencana strategis Tahun 2014-2019.

Tabel 7.1. (Tabel T-C.28) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Riau Tahun 2015-2019

No	Aspek/fokus/Bidang Usaha/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJM763D 2014	Target Capaian Pada Tahun					Kondisi Kinerja akhir RPJM 2019
			2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Jumlah Produksi Perikanan dan Kelautan (Ton)	<b>216.763,79</b>	<b>220.711,00</b>	<b>233.718,52</b>	<b>246.023,02</b>	<b>260.776,47</b>	<b>286.854,12</b>	<b>286.854,12</b>
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	86.451,79	89.096	100.787,52	111.762,02	125.173,47	130.000,00	130.000,00
	Meningkatnya Hasil Tangkapan	130.312,00	131.615,00	132.931,00	134.261,00	135.603,00	140.000,00	140.000,00
	Meningkatnya Usaha Bidang Perikanan dan Kelautan: 1) Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Budidaya (RTP)	22.631,81	28.683	26.055	81.794	85.884	90.178	90.178
	Perikanan Budidaya (RTP)	30.660	30.431	30.876	29.706	32.677	35.948	35.948
	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	452	335	371	388	400	410	410
	NTN dan NTPi (%)							
	– NTN	102,60	103,10	103,70	103,34	105,10	106,00	106,00
	– NTPi	103,21	103,58	103,99	104,05	104,50	104,90	104,90
	Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Tangkapan (Kg/Kapita/Tahun)	41,74	41,85	42,0	42,0	42,18	42,50	42,50

	Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US \$)	7.500.000	8.000.000	8.200.000	8.500.000	8.800.000	9.000.000	9.000.000
II	Persentase Menurunnya IUU Fishing	-	-	-	15 %	20 %	25 %	25 %
	Peningkatan Kesadaran Hukum (Pelaku Usaha Yang Taat Hukum)	-	-	-	46	61	76	76
	Meningkatnya Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (Luas Kawasan)	-	55 Ha	60 Ha	42 Ha	50 Ha	55 Ha	55 Ha
	Tidak Over Fishing/Ketersediaan Ikan di Perairan (Kepmen KP.47 Tahun 2016)	-	-	-	1.627.755 Ton	-	-	-

---

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang telah berhasil disusun merupakan langkah awal pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Dengan telah dirumuskannya Rencana Strategis ini, berarti seluruh jajaran dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau harus menyiapkan diri dalam menghadapi masa depan dengan arah kebijakan dan program, serta yang akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang (2014-2019).

Dengan rencana strategis ini diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan. Rencana strategis ini juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana, program, dan kegiatan masing-masing Bidang maupun Sekretariat, serta dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Dengan demikian diharapkan dapat menumbuhkan komitmen bersama serta memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mencapai visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang telah dirumuskan dan ditetapkan.

Rencana strategis ini dapat direvisi disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis.